

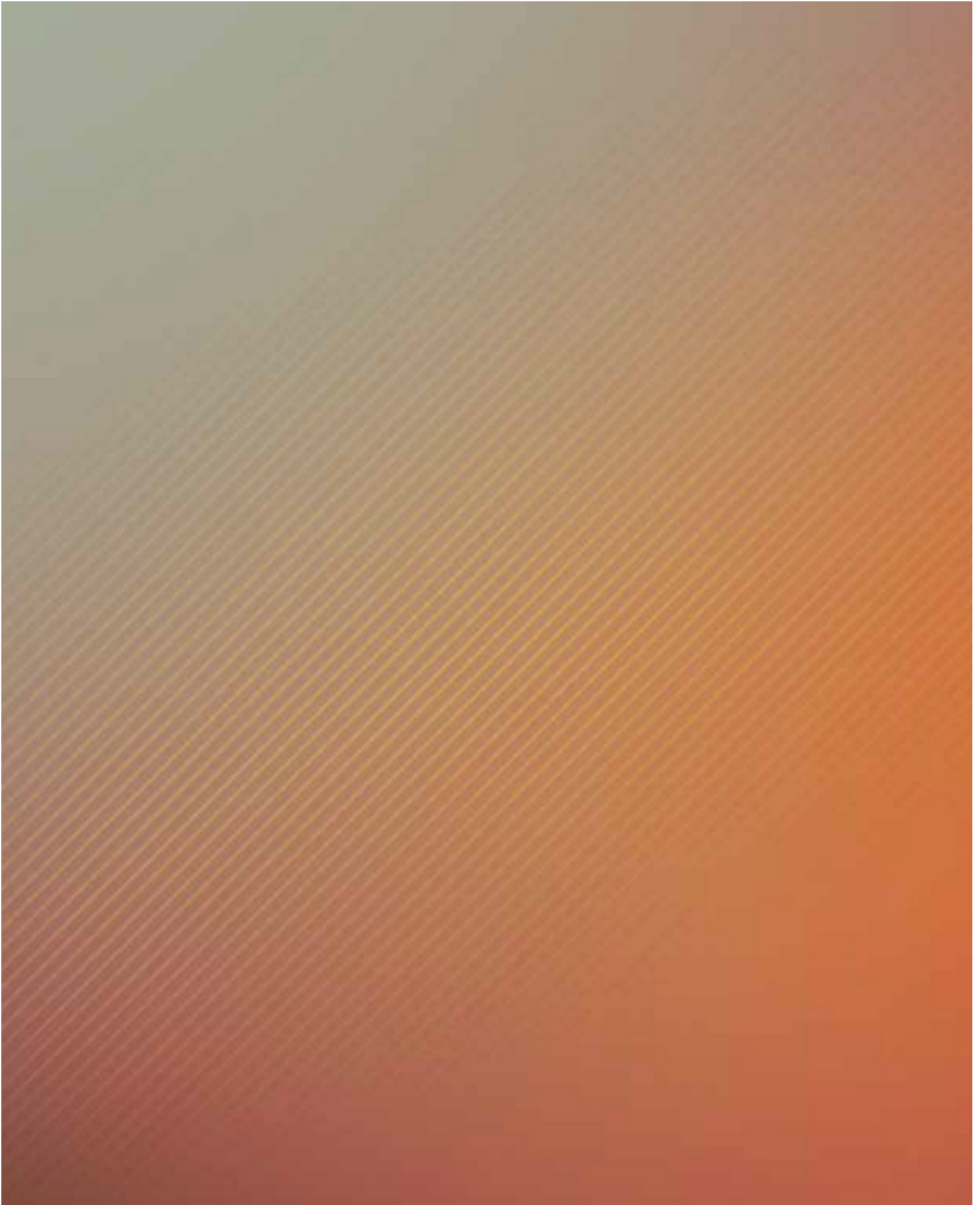
# Ringkasan Eksekutif Laporan Tahunan 2021



Mahkamah Agung  
Republik Indonesia



***Akselerasi  
Perwujudan  
Peradilan Modern***





**Mahkamah Agung Republik Indonesia**

Ringkasan Eksekutif  
**LAPORAN TAHUNAN 2021**

**Akselerasi Perwujudan  
Peradilan Modern**



**Prof. Dr. H. Muhammad Syarifuddin, S.H., M.H.**  
Ketua Mahkamah Agung RI



**Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.**  
Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial



**Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.**  
Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial



**Prof. Dr. H. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M**  
Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung RI



**Prof. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.**  
Ketua Kamar Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI



**Prof. Dr. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M.**  
Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung RI



**Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**  
Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung RI



**Mayjen TNI (Purn) Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**  
Ketua Kamar Militer Mahkamah Agung RI



**I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.**  
Ketua Kamar Perdata Mahkamah Agung RI



**Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.**  
Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung RI

# Daftar Isi

<b>07</b>	<b>PENJELASAN TEMA</b>	<b>53</b>	<b>MANAJEMEN KEUANGAN, ASET DAN TEKNOLOGI INFORMASI</b>
<b>08</b>	<b>MANAJEMEN PERKARA</b>	53	PROGRAM PEMBARUAN
08	PROGRAM PEMBARUAN	54	MANAJEMEN KEUANGAN
12	KEADAAN PERKARA DI MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN DI BAWAHNYA	61	MANAJEMEN ASET
18	PENYELESAIAN PERKARA PADA PENGADILAN TINGKAT BANDING	67	MANAJEMEN TEKNOLOGI INFORMASI
18	PENYELESAIAN PERKARA PADA PENGADILAN TINGKAT PERTAMA	<b>68</b>	<b>PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN HUKUM DAN PERADILAN DAN PUTUSAN-PUTUSAN PENTING (LANDMARK DECISIONS)</b>
18	KINERJA PENANGANAN PERKARA MELALUI LAYANAN PENGADILAN ELEKTRONIK	68	PROGRAM PEMBARUAN
21	AKSEPTABILITAS PUTUSAN PENGADILAN	69	PROGRAM PENELITIAN, PENGEMBANGAN, DAN PENGKAJIAN
22	PENYELESAIAN PERKARA MELALUI MEDIASI DAN DIVERSI	70	PERAN SERTA DAN KERJA SAMA
23	PENANGANAN PENYAMPAIAN DOKUMEN PENGADILAN DALAM PERKARA PERDATA KE LUAR NEGERI	74	JURNAL HUKUM DAN PERADILAN
23	RASIO BEBAN DAN KINERJA PENANGANAN PERKARA	76	PUTUSAN-PUTUSAN PENTING (LANDMARK DECISIONS)
24	KONTRIBUSI KEUANGAN PERKARA TERHADAP KEUANGAN NEGARA	<b>81</b>	<b>PENGAWASAN</b>
<b>27</b>	<b>REFORMASI BIROKRASI DAN AKSES TERHADAP KEADILAN</b>	81	PROGRAM PEMBARUAN
27	REFORMASI BIROKRASI DI MAHKAMAH AGUNG	82	PENGELOLAAN SISTEM PENGAWASAN
31	AKSES TERHADAP KEADILAN DAN PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK	89	SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL (SPI)
<b>36</b>	<b>MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA</b>	91	TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BPK
36	PROGRAM PEMBARUAN	91	IMPLEMENTASI APLIKASI SIWAS
38	REKRUTMEN SUMBER DAYA MANUSIA	91	LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN)
41	PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	<b>92</b>	<b>PERANSERTA DAN KERJASAMA</b>
45	PROMOSI DAN MUTASI	92	KERJA SAMA MULTILATERAL
52	PELAKSANAAN KEBIJAKAN NASIONAL	92	KERJA SAMA YUDISIAL BILATERAL
		93	KERJA SAMA DENGAN MITRA PEMBANGUNAN
		95	REFORMASI KEMUDAHAN BERUSAHA
		95	PARTISIPASI DALAM FORUM INTERNASIONAL





## Akselerasi Perwujudan Peradilan Modern

Peradilan modern merupakan amanat yang tertuang dalam Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010--2035 yang implementasinya telah dimulai sejak peluncuran aplikasi e-Court pada tahun 2018 yang lalu. Saat ini, Mahkamah Agung terus melakukan perbaikan terhadap sarana dan prasarana IT serta menyiapkan ketersediaan SDM yang andal guna mempercepat terwujudnya peradilan modern. Munculnya Pandemi Covid-19 pada awal tahun 2020 semakin mempercepat proses transformasi dari peradilan konvensional ke peradilan

modern karena dipicu oleh kondisi darurat yang memaksa penyelenggaraan peradilan dilakukan secara daring untuk menghindari penularan wabah Covid-19. Akselerasi perwujudan peradilan modern merupakan tekad dan semangat seluruh komponen di Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya untuk melangkah bersama dan berupaya dengan segala kemampuan yang ada dalam upaya mewujudkan visi Mahkamah Agung yaitu terwujudnya badan peradilan Indonesia yang agung.



# MANAJEMEN PERKARA

## PROGRAM PEMBARUAN

### PEMBARUAN BIDANG TEKNIS

Pembaruan di bidang teknis merupakan upaya merevitalisasi fungsi Mahkamah Agung sebagai pengadilan tertinggi dalam menjaga kesatuan hukum dan upaya meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan. Implementasi peran untuk melakukan pembaruan dalam bidang teknis oleh Mahkamah Agung merujuk pada kewenangan yang diberikan oleh Pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yakni dalam rangka membuat peraturan sebagai pelengkap guna mengisi kekurangan atau kekosongan hukum sehingga penyelenggaraan fungsi peradilan berjalan secara efektif. Pembaruan bidang teknis yudisial yang dilakukan Mahkamah Agung sepanjang tahun 2021 adalah sebagai berikut.

#### **Perubahan Regulasi Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Penitipan Ganti Kerugian ke Pengadilan Negeri dalam Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum**

Mahkamah Agung telah menerbitkan Perma Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Penitipan Ganti Kerugian ke Pengadilan Negeri dalam

Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Perma tersebut diterbitkan sebagai pelengkap atas kekurangan atau kekosongan hukum dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mengubah ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 dengan menambahkan norma bahwa pengadilan negeri paling lama dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari wajib menerima penitipan ganti kerugian, sebagai berikut.

- a. *SEMA Nomor 2 Tahun 2021 tentang Ketentuan Tenggang Waktu Penyelesaian Permohonan Penitipan Ganti Kerugian Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Penitipan Ganti Kerugian ke Pengadilan Negeri dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.*
  - b. *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Penitipan Ganti Kerugian ke Pengadilan Negeri dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum*
- Beberapa ketentuan baru yang diatur dalam Perma

Nomor 2 Tahun 2021 adalah sebagai berikut.

1. Mengubah definisi *hari* dari *hari kerja* menjadi *hari kalender* dengan ketentuan jika hari terakhir jatuh pada hari libur, berlaku hari kerja berikutnya. Penggunaan *hari kalender* menjadikan penanganan perkara menjadi lebih cepat.
2. Menetapkan batasan waktu 14 (empat belas hari) bagi pengadilan negeri untuk menerima ganti rugi dalam hal pihak yang berhak menolak bentuk dan/atau besarnya ganti rugi berdasarkan hasil musyawarah atau putusan pengadilan negeri ataupun putusan Mahkamah Agung.
3. Mengubah prosedur pengajuan permohonan penitipan ganti rugi dengan mewajibkan pemohon untuk menyetor uang ganti rugi ke rekening pengadilan pada waktu pendaftaran permohonan ke pengadilan.

### **Perubahan Regulasi Tata Cara Pengajuan dan Pemeriksaan terhadap Keberatan terhadap Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha**

Mahkamah Agung telah menerbitkan Perma Nomor 3 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 941), sebagai tindak lanjut atas terbitnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang telah mengubah beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Mahkamah Agung menindaklanjuti perubahan tata cara pengajuan dan pemeriksaan keberatan terhadap Putusan KPPU dengan menerbitkan beberapa regulasi sebagai berikut.

- a. *Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2021 tentang Peralihan Pemeriksaan Keberatan terhadap Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha ke Pengadilan Niaga*
  - b. *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemeriksaan Keberatan terhadap Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha di Pengadilan Niaga*
- Beberapa ketentuan baru yang diatur dalam Perma Nomor 3 Tahun 2021 adalah sebagai berikut.
- 1) Perubahan definisi hari dari *hari kerja* menjadi *hari kalender*;

- 2) Pengaturan yang lebih terperinci terkait tata cara pengajuan keberatan ialah pemohon keberatan wajib memuat alasan yang menjadi keberatan, dan pemohon keberatan wajib menyerahkan kelengkapan administrasi pengajuan keberatan meliputi: surat kuasa, permohonan keberatan, salinan putusan KPPU dan salinan jaminan bank yang dilegalisir dalam hal putusan KPPU memuat sanksi tindakan administratif berupa denda. Majelis hakim menolak permohonan yang tidak memuat alasan keberatan.
- 3) Pemanggilan ataupun pemberitahuan sidang, persidangan, pembacaan, dan penyampaian putusan dilakukan secara elektronik dalam hal pengajuan keberatan dilakukan melalui sistem informasi pengadilan. Pemanggilan/pemberitahuan secara elektronik tersebut dapat dilakukan tanpa memerlukan persetujuan KPPU sebagai pihak termohon.
- 4) Tata cara pemeriksaan keberatan diatur lebih terperinci, antara lain (1) mengatur ruang lingkup pemeriksaan dilakukan terhadap aspek formil dan/atau materiel berdasarkan salinan putusan dan berkas, (2) mekanisme pengajuan ulang saksi dan/atau ahli dari kedua belah pihak, dan (3) larangan pengajuan bukti surat dan/atau dokumen, baik yang pernah diajukan dalam pemeriksaan KPPU maupun bukti surat dan/atau dokumen baru.

### **Pengaturan Penanganan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan**

Mahkamah Agung menerbitkan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penerapan Beberapa Ketentuan dalam Penanganan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan. Materi muatan yang diatur dalam SEMA ini adalah sebagai berikut. *Pertama*, tindak pidana perpajakan dapat dimintakan pertanggungjawaban kepada orang pribadi dan korporasi. *Kedua*, subjek hukum korporasi, selain dijatuhi pidana denda dapat dijatuhi pidana tambahan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. *Ketiga*, pemeriksaan perkara praperadilan dalam tindak pidana perpajakan dilakukan oleh pengadilan negeri dalam daerah tempat kedudukan penyidik atau penuntut umum.

*Keempat*, ketika korporasi mengalami pailit dan/atau bubar, hal itu tidak menghapuskan pertanggungjawaban pidana pengurusnya dan/atau pihak lain atas tindak pidana di bidang perpajakan yang dilakukan pada saat terjadinya tindak pidana. *Kelima*, tindak pidana perpajakan tidak dapat dijatuhkan pidana percobaan.

### **Penguatan Sistem Kamar pada Mahkamah Agung**

Penerapan sistem kamar pada Mahkamah Agung merupakan agenda pembaruan peradilan yang berkelanjutan. Dalam peta jalan pembaruan peradilan, agenda penguatan sistem kamar berlangsung mulai tahun 2010 sampai dengan akhir tahun 2025. Agenda penguatan sistem kamar pada tahun 2021 adalah sebagai berikut.

#### **a. Penerbitan Surat Edaran Pemberlakuan Hasil Rumusan Pleno Kamar tahun 2021**

Salah satu instrumen sistem kamar adalah dibentuknya Lembaga Pleno Kamar yang bertujuan untuk menjaga kesatuan penerapan hukum dan konsistensi putusan. Untuk pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno kamar tahun 2021, Mahkamah Agung telah menerbitkan SEMA Nomor 5 Tahun 2021 tanggal 28 Desember 2021.

#### **b. Penerapan Sistem Kamar pada Pengadilan Tingkat Banding**

Cetak Biru Pembaruan Peradilan mencanangkan sistem kamar diterapkan di tingkat Mahkamah Agung dan pengadilan tingkat banding. Penerapan dan penguatan sistem kamar pada Mahkamah Agung merupakan agenda berkelanjutan dari tahun 2010 sampai dengan akhir tahun 2025. Mahkamah Agung mulai menggulirkan kembali rencana implementasi sistem kamar pada pengadilan tinggi pada tahun 2021. Sistem kamar pada pengadilan tingkat banding diterapkan dengan membentuk Kamar Pidana dan Kamar Perdata pada Pengadilan Tinggi.

### **Rancangan Peraturan Mahkamah tentang Administrasi Pengajuan Upaya Hukum dan Persidangan Kasasi dan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung secara Elektronik**

Ketua Mahkamah Agung telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor 240/KMA/SK/IX/2020 tanggal 22 September 2020 tentang Kelompok Kerja Pengajuan Upaya Hukum dan Persidangan di Mahkamah Agung Secara Elektronik. Salah satu gagasan utama dalam Perma tersebut adalah upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali dilakukan secara elektronik mulai dari tahapan administrasi pengajuan upaya hukum pada pengadilan tingkat pertama hingga pemeriksaan perkara di Mahkamah Agung dan pengiriman salinan putusan ke pengadilan pengaju. Penerapan sistem elektronik dalam administrasi pengajuan upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali tersebut berlaku untuk semua perkara, baik pada tingkat pertama yang dilakukan melalui persidangan elektronik maupun yang dilakukan secara manual.

### **PEMBARUAN BIDANG MANAJEMEN PERKARA**

Pembaruan bidang manajemen perkara merujuk pada ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa badan peradilan wajib membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan. Program pembaruan di bidang manajemen perkara sepanjang tahun 2020 adalah sebagai berikut.

#### **Penguatan Fungsi Pemilahan Perkara pada Mahkamah Agung**

Sistem penanganan perkara di Mahkamah Agung disempurnakan dengan menambahkan tahapan pemilahan perkara pada awal penerimaan perkara berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 268/KMA/SK/XII/2019 tanggal 30 Desember 2019. Sistem pemilahan perkara mulai efektif berlaku pada 1 Maret 2020.

### **Penyempurnaan Aturan Pengiriman Berkas Perkara ke Mahkamah Agung**

Kepaniteraan Mahkamah Agung telah menerapkan kebijakan penggunaan amplop berstiker warna tertentu berdasarkan jenis perkara pada tahun 2020 berdasarkan surat Panitera Mahkamah Agung Nomor 352/PAN/OT.01.3/2/2020 tanggal 13 Februari 2020. Penerapan kebijakan ini untuk memberikan kemudahan secara visual dalam memilah berkas sesuai dengan jenis perkaranya. Berkas yang telah dikelompokkan berdasarkan kesamaan warna tersebut didistribusikan kepada 7 (tujuh) Kepaniteraan Muda Perkara.

### **Pemberlakuan Prosedur Laporan Kasasi Perkara Pidana untuk Perkara Jinayah pada Mahkamah Syar'iyah**

Kepaniteraan Mahkamah Agung menata ulang prosedur penyampaian laporan kasasi perkara pidana yang terdakwa dalam status tahanan melalui surat Nomor 2304/PAN/HK.01/12/2020 tanggal 16 Desember 2020 yang berlaku efektif pada tahun 2021. Prosedur baru penyampaian laporan kasasi tersebut diberlakukan juga untuk Mahkamah Syar'iyah di Aceh dalam penanganan perkara jinayah terhitung mulai 1 November 2021. Pemberlakuan prosedur ini tertuang dalam Surat Panitera Mahkamah Agung Nomor 2193/PAN/HK.05/10/2021 tanggal 11 Oktober 2021. Kepaniteraan Mahkamah Agung telah menambahkan pilihan menu perkara jinayah pada menu perpanjangan penahanan pada aplikasi Direktori Putusan Mahkamah Agung.

### **Penguatan Fungsi Dukungan Administrasi Yudisial dalam Penanganan Perkara Mahkamah Agung**

Penguatan sumber daya manusia pelaksana fungsi pemberian dukungan administrasi yudisial dalam penanganan perkara di Mahkamah Agung merupakan aspek penting dalam peningkatan kinerja penanganan perkara. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/018/SK/III/2006 tanggal 14 Maret 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menggagas lahirnya tenaga fungsional pranata peradilan sebagai salah satu pelaksana fungsi dukungan administrasi yudisial. Gagasan tersebut terwujud dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Pranata Peradilan yang berlaku sejak tanggal 13 Desember 2019.

### **Penerapan e-Payment untuk Pembayaran Panjar Biaya Perkara Non e-Court**

Pembayaran biaya perkara secara elektronik (e-payment) menggunakan akun virtual merupakan salah satu layanan dalam sistem peradilan elektronik (e-court). Sesuai dengan arah pembaruan peradilan di bidang manajemen perkara, pada tahun 2021 Mahkamah Agung memberlakukan sistem e-payment untuk perkara di luar e-Court. Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) telah diupdate untuk menyesuaikan kebijakan tersebut melalui rilis versi 4.0.1. Untuk mengakomodasi kebutuhan proses penanganan perkara, sistem e-payment diterapkan juga untuk tambahan panjar biaya perkara.

## KEADAAN PERKARA DI MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN DI BAWAHNYA

### GAMBARAN UMUM PENANGANAN PERKARA DI SELURUH INDONESIA TAHUN 2021

Tabel Keadaan Perkara Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya Tahun 2021

Peradilan	Sisa 2020	Masuk 2021	Jumlah Beban	Putus 2021	Cabut	Sisa 2021	% Penyelesaian
Mahkamah Agung	199	19.209	19.408	19.233	0	175	99,10%
Pengadilan Tk Banding	2.580	23.688	26.268	23.772	29	2.467	90,61%
Pengadilan Tk Pertama	75.598	2.691.649	2.767.247	2.652.790	53.147	61.310	97,78%
Pengadilan Pajak	7.430	17.654	25.084	12.906	0	12.178	51,45%
Jumlah	85.807	2.752.200	2.838.007	2.708.701	53.176	76.130	97,32%

### GAMBARAN UMUM PENYELESAIAN PERKARA DI MAHKAMAH AGUNG Indikator Kinerja Utama Penanganan Perkara Mahkamah Agung

No.	IKU Penanganan Perkara MA	Keterangan
1.	Rasio produktivitas memutus ( <i>case-deciding productivity rate</i> ) di atas 70% dari beban perkara	Rasio produktivitas memutus adalah perbandingan antara jumlah perkara putus dan jumlah beban perkara pada satu periode.
2.	Rasio penyelesaian perkara ( <i>clearance rate</i> ) di atas 100%	Rasio penyelesaian perkara adalah perbandingan antara jumlah perkara masuk dan keluar dalam satu periode atau perbandingan jumlah perkara yang dikirim ke pengadilan pengaju dengan perkara yang masuk ke Mahkamah Agung.
3.	70 persen perkara diselesaikan sesuai dengan jangka waktu penanganan perkara ( <i>on time case processing</i> ).	Jangka waktu penanganan perkara berdasarkan SK KMA nomor 214/KMA/SK/XII/2014 adalah 250 hari. Waktu memutus perkara ditetapkan maksimal selama 3 (tiga) bulan sejak perkara diterima majelis hakim, sedangkan waktu minutasasi adalah 3 (tiga) bulan sejak perkara diputus.
4.	Menurunnya persentase perkara tunggakan dari keseluruhan perkara aktif ( <i>case backlog</i> ).	Tunggakan perkara adalah perkara yang belum diselesaikan sesuai dengan jangka waktu penanganan perkara.

### Gambaran Umum Kinerja Penanganan Perkara Mahkamah Agung Tahun 2021

Tabel Keadaan Perkara Mahkamah Agung Tahun 2021 berdasarkan Jenis Perkara

Jenis Perkara	Sisa 2020	Masuk 2021	Jumlah Beban	Putus 2021	Sisa 2021	Rasio Produktivitas
Perdata	17	4.857	4.874	4.858	16	99,67%
Perdata Khusus	12	1.525	1.537	1.526	11	99,28%
Pidana	10	1.605	1.615	1.605	10	99,38%
Pidana Khusus	144	5.779	5.923	5.799	124	97,91%
Perdata Agama/Jinayah	8	1.135	1.143	1.136	7	99,39%
Pidana Militer	0	210	210	210	0	100,00%
Tata Usaha Negara	8	4.098	4.106	4.099	7	99,83%
Jumlah	199	19.209	19.408	19.233	175	99,10%

Tabel Keadaan Perkara Mahkamah Agung Tahun 2021 Berdasarkan Jenis Kewenangan

No.	Jenis Kewenangan	Sisa 2020	Masuk 2021	Jumlah Beban	Putus 2021	Sisa 2021
A.	Perkara					
1.	Kasasi	138	13.678	13.816	13.694	122
2.	Peninjauan Kembali	56	2.057	2.113	2.069	44
3.	Peninjauan Kembali Perkara Pajak	0	3.369	3.369	3.369	0
4.	Grasi	5	54	59	50	9
5.	Hak Uji Materiel (PPU)	0	48	48	48	0
6.	Sengketa Kewenangan Mengadili	0	0	0	0	0
7.	Permohonan Uji Pendapat	0	1	1	1	0
8.	Pelanggaran Administrasi Pemilihan	0	2	2	2	0
	Jumlah	199	19.209	19.408	19.233	175
B.	Nonperkara					
	Permohonan Fatwa	0	22	22	22	0

Tabel Rasio Penyelesaian Perkara Mahkamah Agung Tahun 2021

No.	Jenis Perkara	Jumlah Masuk	Jumlah Kirm	%
1.	Perdata	4.857	5.003	103,01%
2.	Perdata Khusus	1.525	1.583	103,80%
3.	Pidana	1.605	1.746	108,79%
4.	Pidana Khusus	5.779	6.467	111,91%
5.	Perdata Agama/Jinayah	1.135	1.318	116,12%
6.	Pidana Militer	210	208	99,05%
7.	Tata Usaha Negara	4.098	5.261	128,38%
	Jumlah	19.209	21.586	112,37%

Tabel Rerata Waktu Memutus Perkara pada Tingkat Pemeriksaan Mahkamah Agung Tahun 2021

No.	Jenis Perkara	Lamanya Pemeriksaan (dalam bulan)					Jumlah
		1 s.d. 3	3 s.d. 6	6 s.d. 12	12 s.d. 24	> 24	
1.	Perdata	4.702	140	15	1	0	4.858
2.	Perdata Khusus	1.505	18	3	0	0	1.526
3.	Pidana	1.596	4	5	0	0	1.605
4.	Pidana Khusus	5.652	89	46	12	0	5.799
5.	Perdata Agama/Jinayah	1.131	4	1	0	0	1.136
6.	Pidana Militer	209	1	0	0	0	210
7.	Tata Usaha Negara	4.010	88	1	0	0	4.099
	Jumlah	18.805	344	71	13	0	19.233
	%	97,77%	1,79%	0,37%	0,07%	0	

Tabel Rerata Waktu Minutasi Perkara Mahkamah Agung Tahun 2021

No.	Jenis Perkara	Lamanya Proses Minutasi (dalam bulan)					Jumlah
		1 sd 3	3 sd 6	6 sd 12	12 sd 24	> 24	
1.	Perdata	303	2.198	2.410	92	0	5.003
2.	Perdata Khusus	762	579	222	20	0	1.583
3.	Pidana	100	341	568	548	189	1.746
4.	Pidana Khusus	396	1.142	1.998	2.059	872	6.467
5.	Perdata Agama/Jinayah	133	547	635	3	0	1.318
6.	Pidana Militer	39	93	68	8	0	208
7.	Tata Usaha Negara	1.879	2.592	729	61	0	5.261
Jumlah		3.612	7.492	6.630	2.791	1.061	21.586
%		16,73%	34,71%	30,71%	12,93%	4,92%	

Tabel Perkara Belum Minutasi pada tanggal 31 Desember 2021

No.	Jenis Perkara	Jumlah Perkara Belum Minutasi	Status Usia Perkara Belum Minutasi			
			di atas 3 Bulan (tunggakan)	%	di bawah 3 bulan (bukan tunggakan)	%
1.	Perdata	1.613	277	17,17%	1336	82,83%
2.	Perdata Khusus	271	66	24,35%	205	75,65%
3.	Pidana	1.287	735	57,11%	552	42,89%
4.	Pidana Khusus	5.362	3063	57,12%	2299	42,88%
5.	Perdata Agama	268	7	2,61%	261	97,39%
6.	Pidana Militer	47	18	38,30%	29	61,70%
7.	Tata Usaha Negara	515	109	21,17%	406	78,83%
Jumlah		9.363	4275	45,66%	5088	54,34%

Tabel Rekapitulasi Perkara Aktif pada Akhir Tahun 2021

No.	Kategori	Tahun 2020	Tahun 2021	Perbandingan 2020-2021
1.	Belum Putus	199	175	-12,06%
2.	Sudah Putus Belum Minutasi	12.869	9.363	-27,24%
3.	Sudah Minutasi Belum Kirim	0	0	
		13.068	9.538	-27,01%



Tabel Rekapitulasi Amar Putusan Kasasi Mahkamah Agung Tahun 2021

No.	Jenis Perkara	Amar Putusan					Jumlah
		Kabul	Tolak	Tolak Perbalkan	No	Pencabutan	
1.	Perdata	522	3036	221	3	8	3.790
2.	Perdata Khusus	260	896	308	7	6	1.477
3.	Pidana	205	1.078	204	14	5	1.506
4.	Pidana Khusus	509	2.118	2.571	12	2	5.212
5.	Perdata Agama/Jinayah	126	605	208	64	4	1.007
6.	Pidana Militer	4	151	34	6	0	195
7.	Tata Usaha Negara	50	379	25	51	2	507
Jumlah		1.676	8.263	3.571	157	27	13.694
%		12,24%	60,34%	26,08%	1,15%	0,20%	

Tabel Rekapitulasi Amar Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Tahun 2021

No.	Jenis Perkara	Amar Putusan					Jumlah
		Kabul	Tolak	No	Pencabutan	Putusan Sela	
1.	Perdata	135	911	17	5	0	1068
2.	Perdata Khusus	11	31	6	1	0	49
3.	Pidana	12	76	0	0	0	88
4.	Pidana Khusus	194	353	2	0	0	549
5.	Perdata Agama/Jinayah	13	99	15	2	0	129
6.	Pidana Militer	3	11	0	0	0	14
7.	Tata Usaha Negara	7	155	8	0	0	170
8.	Pajak	213	3.041	103	1	11	3.369
Jumlah		588	4.677	151	9	11	5.436
%		10,82%	86,04%	2,78%	0,17%	0,20%	

Tabel Klasifikasi Pemohon Upaya Hukum Kasasi dalam Perkara Pidana Umum, Pidana Khusus, dan Pidana Militer Tahun 2021

No.	Pemohon	Pidana Umum		Pidana Khusus		Pidana Militer		Ket
		Kesel	%	Kesel	%	Kesel	%	
1..	Terdakwa	298	19,77%	1.784	34,31%	118	60,51%	
2..	Jaksa/Oditur	946	62,77%	2.291	44,06%	74	37,95%	
3..	Terdakwa dan Jaksa/Oditur	263	17,45%	1.125	21,63%	3	1,54%	
Jumlah		1.507		5.200		195		

## Pencapaian Target Indikator Kinerja Utama Penanganan Perkara Mahkamah Agung Tahun 2021

Pencapaian kinerja penanganan perkara Mahkamah Agung Tahun 2021 dengan merujuk pada indikator kinerja utama sebagaimana diuraikan di atas adalah sebagai berikut.

- 1) Rasio jumlah perkara yang telah diputus dengan jumlah beban perkara (rasio produktivitas memutus perkara) tahun 2021 sebesar 99,10%. Capaian tersebut 24,10 % melampaui dari target yang ditetapkan sebesar 75%. Rasio produktivitas Mahkamah Agung dalam memutus perkara tahun 2021 meningkat 0,06% dari tahun 2020 yang memiliki rasio produktivitas sebesar 99,04%. Rasio produktivitas memutus tahun 2021 melampaui target IKU dan melampaui capaian kinerja tahun 2020 dan menjadi capaian tertinggi dalam sejarah Mahkamah Agung.
- 2) Jumlah perkara yang diputus oleh Mahkamah Agung sesuai dengan jangka waktu penanganan perkara (*on time case processing*) sebanyak 18.805 dari 19.233 perkara atau 97,77%. Jumlah tersebut meningkat 1,12.% jika dibandingkan dengan tahun 2020 yang capaiannya sebesar 96,65%.
- 3) Perkara yang diminutasi sesuai dengan jangka waktu penanganan perkara sebanyak 3.612 dari 21.586 perkara (16,73%). Jumlah itu berkurang 20,75% jika dibandingkan dengan tahun 2020 yang berjumlah 6.836 perkara (37,48%).
- 4) Jumlah sisa perkara pada akhir tahun berkurang 12,06% dari keseluruhan perkara aktif jika dibandingkan dengan tahun 2020. Jumlah sisa perkara tahun 2021 merupakan sisa terkecil dalam sejarah Mahkamah Agung.
- 5) Rasio penyelesaian perkara (*clearance rate*) sebesar 112,37%.

## KEADAAN PERKARA DAN PERMOHONAN LAINNYA DI LUAR PERMOHONAN KASASI DAN PENINJAUAN KEMBALI

### Permohonan Grasi

Tabel Kinerja Penyelesaian Permohonan Grasi Tahun 2021

Jenis Perkara	Sisa 2020	Masuk 2021	Jml. Beban	Diberikan Pertimbangan	Sisa 2021	% Penyelesaian
Pidana Umum	1	11	12	11	1	91,67%
Pidana Khusus	4	42	46	38	8	82,61%
Pidana Militer	0	1	1	1	0	100,00%
Jumlah	5	54	59	50	9	84,75%

### Permohonan Pengujian Peraturan Perundang-undangan di Bawah Undang-Undang (PPPU)

Tabel Kinerja Penyelesaian Perkara Permohonan Hak Uji Materiel Tahun 2021

No.	Klasifikasi Peraturan Perundang-undangan	Sisa	Masuk 2021	Jumlah Beban	Diberikan Pertimbangan	Sisa Akhir
1.	Peraturan Menteri	0	14	14	14	0
2.	Peraturan Pemerintah	0	9	9	9	0
3.	Peraturan Bupati	0	5	5	5	0
4.	Peraturan Daerah Kab/Kota	0	4	4	4	0
5.	Peraturan Konsil Kedokteran	0	4	4	4	0
6.	Keputusan Bersama Tiga Menteri	0	2	2	2	0

No.	Klasifikasi Peraturan Perundang-undangan	Sisa	Masuk 2021	Jumlah Beban	Diberikan Pertimbangan	Sisa Akhir
7.	Peraturan Gubernur	0	2	2	2	0
8.	Peraturan Presiden	0	2	2	2	0
9.	Peraturan Daerah Provinsi	0	1	1	1	0
10.	Peraturan Bawaslu	0	1	1	1	0
11.	Peraturan BUMN (PT Bank Mandiri, Tbk.)	0	1	1	1	0
12.	Peraturan KPK	0	1	1	1	0
13.	Peraturan KPU	0	1	1	1	0
14.	Surat Edaran Satgas Covid	0	1	1	1	0
	Jumlah	0	48	48	48	0

### Permohonan Uji Pendapat Keputusan DPRD tentang Pemberhentian Kepala Daerah

Mahkamah Agung berdasarkan ketentuan Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah diberi kewenangan untuk memeriksa, mengadili, memutus perkara uji pendapat DPRD atas keputusannya memberhentikan kepala daerah karena keadaan sebagaimana ketentuan Pasal 78 ayat (2) huruf c, d, e, dan f UU No 23 Tahun 2014. Sepanjang tahun 2021 Mahkamah Agung menangani permohonan uji pendapat sebanyak 1 perkara. Seluruh perkara tersebut berhasil diputus dan diminutasi serta dikirim ke pihak pemohon.

### Permohonan Upaya Hukum atas Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan (PAP)

Perkara PAP terkait dengan gugatan dari pasangan calon kepala daerah yang terkena sanksi administratif berupa pembatalan pencalonannya oleh Komisi Pemilihan Umum provinsi atau kabupaten. Pasangan calon yang terkena sanksi administratif tersebut menilai keputusan KPU tersebut tidak berdasar sehingga memohon keadilan kepada Mahkamah Agung. Jumlah perkara upaya hukum atas sengketa pelanggaran administratif pemilihan yang diterima oleh Mahkamah Agung pada tahun 2021

sebanyak 2 perkara. Keseluruhan perkara tersebut telah diputus dan diminutasi serta dikirim ke pihak pemohon.

### Permohonan Fatwa

Pada tahun 2021 Mahkamah Agung menerima permohonan fatwa dari lembaga negara/pemerintah sebanyak 22 permohonan dan Mahkamah Agung RI telah menjawab semua permohonan fatwa tersebut dalam bentuk pendapat hukum (nasihat hukum) dengan data sebagai berikut.

No.	Lembaga	Jumlah	%
1.	Kepolisian	6	27,27%
2.	Pemerintah Kabupaten/Kota	4	18,18%
3.	Kejaksaan	4	18,18%
4.	Kementerian	2	9,09%
5.	Badan Pertanahan Nasional	2	9,09%
6.	DPR/DPRD	1	4,55%
7.	Badan Amil Zakat Nasional	1	4,55%
8.	BPJS Kesehatan	1	4,55%
9.	Komisi Pemberantasan Korupsi	1	4,55%
	Jumlah	22	

## PENYELESAIAN PERKARA PADA PENGADILAN TINGKAT BANDING

Tabel Keadaan Perkara pada Pengadilan Tingkat Banding Tahun 2021

Lingkungan Peradilan	Sisa 2020	Masuk 2021	Jumlah Beban	Putus 2021	Cabut	Sisa 2021	% Penyelesaian
Peradilan Umum	2.302	19.453	21.755	19.554	0	2.201	89,88%
Peradilan Agama	38	2.889	2.927	2.865	23	39	98,67%
Peradilan Militer	7	307	314	292	3	19	93,95%
Peradilan TUN	233	1.039	1.272	1.061	3	208	83,65%
Pengadilan Pajak	7.430	17.654	25.084	12.906	0	12.178	51,45%
Jumlah	10.010	41.342	51.352	36.678	29	14.645	71,48%

## PENYELESAIAN PERKARA PADA PENGADILAN TINGKAT PERTAMA

Tabel Kinerja Penanganan Perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama dari Empat Lingkungan Peradilan Tahun 2021

Lingkungan Peradilan	Sisa 2020	Masuk 2021	Jumlah Beban	Putus 2021	Cabut	Sisa 2021	% Penyelesaian
Peradilan Umum	38.856	2.049.045	2.087.901	2.046.150	4.396	37.355	98,21%
Peradilan Agama	35.953	637.783	673.736	602.423	48.253	23.060	96,58%
Peradilan Militer	105	2.489	2.594	2.453	17	124	95,22%
Peradilan TUN	684	2.332	3.016	1.764	481	771	74,44%
Jumlah	75.598	2.691.649	2.767.247	2.652.790	53.147	61.310	97,78%

## KINERJA PENANGANAN PERKARA MELALUI LAYANAN PENGADILAN ELEKTRONIK

### PERKARA E-COURT PADA PENGADILAN TINGKAT PERTAMA

Tabel Data Penanganan Perkara e-Court 2019--2021

No.	Badan Peradilan	2019	2020	2021	% kenaikan
1.	Pengadilan Negeri	21.895	82.225	90.041	9,51%
2.	Pengadilan Agama	24.776	102.690	132.869	29,39%
3.	Pengadilan Tata Usaha Negara	573	2.072	2.162	4,34%
TOTAL		47.244	186.987	225.072	20,37%

Tabel Penyelesaian Perkara e-Court yangn Berlanjtu dengan Persidangan Elektronik

No.	Lingkungan Peradilan	Jumlah Perkara		% e-litigasi	Kualifikasi				
		e-court	e-litigasi		Pengguna layanan	Pengguna Terdaftar	%	Pengguna Lainnya	%
1.	Pengadilan Negeri	90041	6658	7,39%	24656	16772	68,02%	7884	47,01%
2.	Pengadilan Agama	132869	3181	2,39%	3043	2628	86,36%	415	15,79%
3.	Pengadilan TUN	2162	1978	91,49%	1978	1967	99,44%	11	0,56%
Jumlah		225072	11817	5,25%	29677	21367	72,00%	8310	38,89%

Tabel perbandingan perkara e-Court dan konvensional

No.	Lingkungan Peradilan	Jumlah Perkara Perdata	Jumlah Perkara e-Court	Rasio Perkara e-Court
1.	Pengadilan Negeri	98.929	90.041	91,02%
2.	Pengadilan Agama	637.303	132.869	20,85%
3.	Pengadilan TUN	2.308	2.162	93,67%
Jumlah		738.540	225.072	30,48%

## PERKARA E-COURT PENGADILAN TINGKAT BANDING

Tabel penanganan perkara e-court pada pengadilan tingkat banding

No.	Lingkungan Peradilan	Jumlah Perkara e-Court yang terdaftar	Jumlah Perkara e-Court yang telah diputus	Sisa Perkara
1.	Peradilan Umum	1.050	959	91
2.	Peradilan Agama	192	192	0
3.	Peradilan Tata Usaha Negara	634	561	73
Jumlah		1.876	1.712	164

## PENGGUNA LAYANAN E-COURT

Tabel rekapitulasi pengguna layanan e-court

No.	Jenis Pengguna	Tahun 2020	Tahun 2021	Jumlah
1.	Pengguna Terdaftar (Advokat)	39.006	8996	48.002
2.	Pengguna lainnya	83.705	77144	160.849
Jumlah		122.711	86.140	208.851

Tabel Rincian Pengguna Lainnya dalam Aplikasi e-Court

No.	Pengguna Non Advokat	Tahun 2020	Tahun 2021	Jumlah
1.	Perorangan	79.838	74.906	154.744
2.	Pemerintah	674	439	1.113
3.	Badan Hukum	2.823	1.566	4.389
4.	Kuasa Insidentil	370	233	603
TOTAL		83.705	77.144	160.849

## PERSIDANGAN PERKARA PIDANA SECARA ELEKTRONIK (TELECONFERENCE)

Tabel Perkara Pidana yang Disidangkan Secara Teleconference Tahun 2021

No.	Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi	Jumlah perkara pidana yang disidangkan secara teleconference	No.	Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi	Jumlah perkara pidana yang disidangkan secara teleconference
1.	Pengadilan Tinggi Surabaya	15098	16.	Pengadilan Tinggi Banda Aceh	2848
2.	Pengadilan Tinggi Medan	13283	17.	Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah	2325
3.	Pengadilan Tinggi Bandung	9177	18.	Pengadilan Tinggi Palangka Raya	2113
4.	Pengadilan Tinggi Banten	8679	19.	Pengadilan Tinggi Denpasar	2071
5.	Pengadilan Tinggi Jawa Tengah	7439	20.	Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat	2054
6.	Pengadilan Tinggi Palembang	7135	21.	Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara	1891
7.	Pengadilan Tinggi Makassar	6883	22.	Pengadilan Tinggi Yogyakarta	1788
8.	Pengadilan Tinggi Pekanbaru	6845	23.	Pengadilan Tinggi Manado	1743
9.	Pengadilan Tinggi Tanjungkarang	5079	24.	Pengadilan Tinggi Bengkulu	1428
10.	Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur	5068	25.	Pengadilan Tinggi Jayapura	1359
11.	Pengadilan Tinggi Jambi	4838	26.	Pengadilan Tinggi Kupang	1292
12.	Pengadilan Tinggi DKI Jakarta	4742	27.	Pengadilan Tinggi Bangka Belitung	1182
13.	Pengadilan Tinggi Banjarmasin	4685	28.	Pengadilan Tinggi Ambon	721
14.	Pengadilan Tinggi Pontianak	3667	29.	Pengadilan Tinggi Maluku Utara	464
15.	Pengadilan Tinggi Padang	3330	30.	Pengadilan Tinggi Gorontalo	348

## AKSEPTABILITAS PUTUSAN PENGADILAN

### AKSEPTABILITAS PUTUSAN PENGADILAN TINGKAT PERTAMA

Tabel Tingkat Akseptabilitas Putusan Pengadilan Tingkat Pertama Tahun 2021

Keadaan Perkara per Tingkat Pengadilan	Umum		Agama		Militer	TUN	Jumlah
	Perdata	Pidana	Perdata Agama	Jinayah			
Jumlah perkara diputus pengadilan tingkat pertama	37.445	131.397	468.526	501	1.942	1.739	604.105
Jumlah perkara banding	7.311	12.142	2.849	40	307	1.039	16.377
Rasio upaya hukum banding	19,52%	9,24%	0,61%	7,98%	15,81%	59,75%	2,71%
Tingkat akseptabilitas putusan tingkat pertama	80,48%	90,76%	99,39%	92,02%	84,19%	40,25%	97,29%

### AKSEPTABILITAS PUTUSAN PENGADILAN TINGKAT BANDING

Tabel Tingkat Akseptabilitas Putusan Pengadilan Tingkat Banding

Keadaan Perkara per Tingkat Pengadilan	Umum			Agama		Militer	TUN Jumlah	
	Perdata Khusus	Perdata	Pidana	Perdata Agama	Jinayah			
Jumlah perkara yang diputus pada pengadilan khusus dan pengadilan banding	4.058	7.415	12.139	2.825	40	292	1.061	27830
Jumlah permohonan kasasi	1475	3792	6707	990	16	195	503	13678
Rasio upaya hukum kasasi	36,35%	51,14%	55,25%	35,04%	40,00%	66,78%	47,41%	49,15%
Tingkat akseptabilitas putusan banding	63,65%	48,86%	44,75%	64,96%	60,00%	33,22%	52,59%	50,85%

### AKSEPTABILITAS PUTUSAN KASASI MAHKAMAH AGUNG

Tabel Tingkat Akseptabilitas Putusan Kasasi Mahkamah Agung Tahun 2021

Keadaan Perkara per Tingkat Pengadilan	Perdata Khusus	Perdata	Pidana	Pidana Khusus	Agama	Militer	TUN	Jumlah
Jumlah perkara yang diputus pada tingkat kasasi	1477	3790	1506	5212	991	195	507	13678
Jumlah putusan kasasi yang diajukan permohonan upaya hukum peninjauan kembali	35	866	54	184	79	13	107	1338
Rasio upaya hukum peninjauan kembali	2,37%	22,85%	3,59%	3,53%	7,97%	6,67%	21,10%	9,78%
Tingkat akseptabilitas putusan kasasi	97,63%	77,15%	96,41%	96,47%	92,03%	93,33%	78,90%	90,22%

## PERKARA YANG DIAJUKAN PENINJAUAN KEMBALI

Tabel Data Putusan Berkekuatan Hukum Tetap yang Diajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali Tahun 2021

No.	Jenis Permohonan	Jumlah	Putusan BHT yang Diajukan PK			
			PK	Kasasi	Banding	Pertama
1.	Perdata	1065	24	866	101	74
2.	Perdata khusus	50	1	35	0	14
3.	Pidana	87	1	54	11	21
4.	Pidana khusus	537	13	184	63	277
5.	Perdata agama	129	3	79	13	34
6.	Pidana militer	14	0	13	0	1
7.	Tata usaha negara	173	1	107	39	26
	Jumlah	2055	43	1338	227	447
	Persentase (%)		2,09%	65,11%	11,05%	21,75%
	PK putusan pengadilan pajak	3369	38	0	3331	0
	Jumlah	5424	81	1338	3558	447

## PENYELESAIAN PERKARA MELALUI MEDIASI DAN DIVERSI

### PENYELESAIAN PERKARA MELALUI MEDIASI

Tabel Data Penyelesaian Perkara Melalui Mediasi pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Tahun 2021

No.	Pengadilan	Jumlah Perkara Mediasi	Status Keberhasilan Mediasi			
			Berhasil	Tidak Berhasil	Tidak Dapat Dilaksanakan	Dalam Proses
1.	Pengadilan Negeri	39.888	1.187	16.251	21.193	1.257
		%	2,98%	40,74%	53,13%	3,15%
2.	Pengadilan Agama	62.464	8.964	52.596	904	0
		%	14,35%	84,20%	1,45%	0,00%
	Jumlah	102.352	10.151	68.847	22.097	1.257
	Persentase	%	9,92%	67,26%	21,59%	1,23%

### PENYELESAIAN PERKARA PIDANA ANAK MELALUI DIVERSI

Tabel Data Penyelesaian Perkara Pidana Anak Melalui Diversi

Lingkungan Peradilan	Jumlah Perkara Pidana Anak	Jumlah Perkara Diversi	Status Keberhasilan		
			Berhasil	Tidak Berhasil	Dalam Proses
Peradilan Umum	5178	142	30	19	93
		%	21,13%	13,38%	65,49%



## PENANGANAN PENYAMPAIAN DOKUMEN PENGADILAN DALAM PERKARA PERDATA KE LUAR NEGERI

Tabel Penyampaian Dokumen Pengadilan dalam Masalah Perdata ke Luar Negeri Tahun 2021

No.	Pengadilan	Jumlah Pengadilan	Jenis Dokumen		Jumlah Pgl/Pbt	Jml Negara
			Panggilan	Pemberitahuan		
1.	Pengadilan Negeri	46	348	114	462	31
2.	Pengadilan Agama	54	85	54	139	28
Jumlah		100	697	212	601	59

## RASIO BEBAN DAN KINERJA PENANGANAN PERKARA

### RASIO BEBAN PENANGANAN PERKARA DENGAN JUMLAH HAKIM

Tabel Rasio Beban Penanganan Perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding Tahun 2021

No.	Rasio Beban Kerja	Peradilan Umum	Peradilan Agama	Peradilan Militer	Peradilan TUN	Pengadilan Pajak	Jumlah
1.	Jumlah beban perkara tk pertama	2.087.901	673.736	2.594	3.016		2.767.247
	Jumlah hakim	3.850	2.701	100	298		6.949
	Rasio hakim dengan jumlah perkara	1:542	1:249	1:26	1:10		1:398
	Rata-rata beban tiap hakim	1.627	748	78	30		1.195
2.	Jumlah beban perkara tk banding	21.755	2.927	314	1.272	25.084	51.352
	Jumlah hakim	886	361	31	46	63	1.387
	Rasio hakim dengan jumlah perkara	1:25	1:8	1:10	1:28	1:398	1:37
	Rata-rata beban tiap hakim	74	24	30	83	1194	111

Catatan:

- Rata-rata beban per hakim adalah jumlah rasio perkara bagi setiap hakim dilakikan 3 (tiga). Karena persidangan dilakikan dengan majelis, setiap perkara didistribusikan kepada tiga orang hakim.
- Jumlah perkara pada pengadilan tingkat pertama di lingkungan peradilan umum pada tabel di atas, termasuk perkara pelanggaran lalu lintas sebanyak 1.777.670 perkara, dilaksanakan persidangan dengan hakim tunggal.
- Jumlah perkara pada pengadilan negeri di luar pelanggaran lalu lintas sebanyak 810.231 perkara. Dengan jumlah itu, rasio hakim dengan jumlah perkara adalah 1: 81, sedangkan rata-rata beban per hakim sebanyak 242 perkara.

Tabel Rasio Beban Penanganan Perkara pada Mahkamah Agung RI Tahun 2021

Jumlah	Perdata	Pidana	Agama	Militer	TUN	Jumlah
Jumlah beban perkara	6411	7538	1143	210	4106	19408
Jumlah hakim agung	17	17	6	4	6	50
Rasio hakim agung dengan perkara	1:377	1:443	1:191	1:53	1:684	1:388
Rerata beban kerja setiap hakim	1131	1330	572	158	2053	1164

## RASIO KINERJA PENANGANAN PERKARA DENGAN JUMLAH HAKIM

Tabel Rasio Kinerja Penanganan Perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding Tahun 2021

No.	Produktivitas	Peradilan Umum	Peradilan Agama	Peradilan Militer	Peradilan TUN	Pengadilan Pajak	Jumlah
1.	Perkara putus pengadilan tingkat pertama	2.046.150	602.423	2.453	1.764		2.652.790
	Jumlah hakim	3850	2701	100	298		6949
	Rasio	1:531	1:223	1:25	1:6		1:382
	Rata-rata produktivitas tiap hakim	1594	669	74	18		1145
2.	Perkara putus pengadilan tingkat banding	19554	2865	292	1061	12906	36678
	Hakim	886	361	31	46	63	1387
	Rasio	1:22	1:8	1:9	1:23	1:205	1:26
	Rata-rata produktivitas tiap hakim	66	24	28	69	615	79

Tabel Rasio Kinerja Penanganan Perkara pada Mahkamah Agung RI Banding Tahun 2021

Jumlah	Perdata	Pidana	Agama	Militer	TUN	Jumlah
Jumlah perkara putus	6.384	7.404	1.136	210	4.099	19.233
Jumlah hakim agung	17	17	6	4	6	50
Rasio hakim agung dengan perkara	1:376	1:436	1:189	1:53	1:683	1:385
Rerata produktivitas tiap hakim	1.127	1.307	568	158	2.050	1.154

## KONTRIBUSI KEUANGAN PERKARA TERHADAP KEUANGAN NEGARA

### KONTRIBUSI DARI PNBP

No.	Akun	Realisasi (Rp)
1.	425231 Pendapatan pengesahan surat di bawah tangan	182.800.000,00
2.	425232 Pendapatan uang meja (leges) dan upah pada Panitera Badan Peradilan	2.827.582.501,00
3.	425233 Pendapatan ongkos perkara	24.387.725.028,00
4.	425239 Pendapatan kejaksaan dan peradilan lainnya	48.854.015.140,00
	Jumlah	76.252.122.669,00

## POTENSI KONTRIBUSI TERHADAP KEUANGAN NEGARA YANG BERASAL DARI UANG DENDA DAN UANG PENGGANTI BERDASARKAN PUTUSAN PERKARA PIDANA.

### Putusan Mahkamah Agung

No.	Jenis	Jumlah (Rp)
1.	Uang denda dari perkara tindak pidana korupsi, narkoba, kehutanan, perlindungan anak, perikanan, pencucian uang, dll	4.072.702.883.198,00
2.	Uang pengganti dari perkara tindak pidana korupsi, narkoba, lingkungan hidup, dll	17.922.428.602.348,20
Jumlah		21.995.131.485.546,20

### Putusan Berkekuatan Hukum Tetap pada Pengadilan Tingkat Pertama di lingkungan Peradilan Umum

No.	Jenis	Jumlah (Rp)
1.	Uang denda perkara lalu lintas	Rp 167.207.877.104,00
2.	Uang denda dari perkara tindak pidana korupsi, narkoba, kehutanan, perlindungan anak, perikanan, pencucian uang, dll	Rp 45.455.827.478.938,00
3.	Uang Pengganti dari perkara tindak pidana korupsi, narkoba, lingkungan hidup, dll	Rp 6.247.641.051.558,00
Jumlah		Rp 51.870.676.407.600,00

### Putusan Berkekuatan Hukum Tetap pada Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Peradilan Militer

No.	Klasifikasi	Jumlah Perkara	Jumlah Denda	Uang Pengganti	Jumlah (Rp)
1.	Kejahatan	2.231	33.757.350.000,00	500.000.000,00	34.257.350.000,00
2.	Pelanggaran	520	98.155.015,00		98.155.535,00
Jumlah		2.751	33.855.505.015,00	500.000.000,00	34.355.505.535,00

## PENGELOLAAN KEUANGAN PERKARA PADA MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN DI BAWAHNYA

### Biaya Penyelesaian Perkara di Mahkamah Agung

No.	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran
1.	Saldo awal tahun 2021	29.036.857.892,00	
2.	Penerimaan tahun 2021	19.356.920.000,00	
3.	Penggunaan biaya proses 2021		17.861.029.462,00
4.	Saldo akhir 2021		30.532.748.430,00
	Jumlah	48.393.777.892,00	48.393.777.892,00

Pembayaran biaya perkara kasasi/peninjauan kembali/hak uji materiel pada tahun 2021 yang dilakukan menggunakan rekening virtual berjumlah Rp16.637.500.000,00 (enam belas miliar enam ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah). Jumlah tersebut sebesar 85,95% jika dibandingkan dengan penerimaan biaya perkara MA tahun 2021 yang berjumlah Rp19.356.920.000,00 (sembilan belas miliar tiga ratus lima puluh enam juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah). Perkembangan tingkat kepatuhan pengadilan dalam pengiriman biaya perkara menggunakan rekening virtual tergambar dalam tabel berikut.

Kategori	Jumlah Biaya Perkara (dalam Rupiah) per tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah biaya perkara dikirim menggunakan VA	263.013.000,00	8.820.000.000,00	17.426.500.000,00	16.637.000.000,00	16.637.500.000,00
Total penerimaan biaya perkara	19.247.524.847,00	21.283.405.637,00	21.574.552.689,00	17.906.015.000,00	19.356.920.000,00
% Pembayaran menggunakan VA	1,37%	41,44%	80,77%	92,91%	85,95%

### Biaya Penyelesaian Perkara pada Pengadilan Tingkat Banding

No.	Jenis Perkara	Jumlah perkara	Biaya Proses	Jumlah (Rp)
1.	Peradilan Umum (Perdata)	7311	150.000	Rp 1.096.650.000,00
2.	Peradilan Agama (Perdata)	2849	150.000	Rp 427.350.000,00
3.	Peradilan Tata Usaha Negara	1039	250.000	Rp 259.750.000,00
	Jumlah			Rp 1.783.750.000,00



# REFORMASI BIROKRASI DAN AKSES TERHADAP KEADILAN

## REFORMASI BIROKRASI DI MAHKAMAH AGUNG

### PROGRAM PEMBARUAN

Untuk mewujudkan target sasaran reformasi birokrasi Mahkamah Agung sesuai dengan perencanaan dan penetapannya, perlu dilakukan pemantauan dan evaluasi internal ataupun eksternal secara berkala. Evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi Mahkamah Agung secara internal/mandiri (*self-assessment*) dilakukan oleh asesor pada Badan Pengawasan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah yang telah mengalami perubahan beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

#### Area I: Manajemen Perubahan

1. Penerbitan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 154/SEK/SK/II/2021 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas serta Tim Penilai Internal (TPI) di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya Tahun 2021.
2. Pembuatan film pendek berjudul "Pesan Bermakna" untuk membangkitkan rasa kebanggaan terhadap institusi peradilan, serta menumbuhkan semangat integritas dan nilai-nilai kejujuran.
3. Penerbitan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 249/KMA/SK/XII/2021 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 13/KMA/SK/I/2020 tentang Insentif bagi Hakim dan Pegawai pada Unit Kerja yang Memperoleh Predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.

### Area II: Deregulasi Kebijakan

1. Penerbitan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pengadaan Hakim.
2. Penerbitan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Penitipan Ganti Kerugian ke Pengadilan Negeri dalam Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.
3. Penerbitan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemeriksaan Keberatan terhadap Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha di Pengadilan Niaga.

### Area III: Penataan dan Penguatan Organisasi

1. Penerbitan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 107/KMA/SK/VI/2021 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 200/KMA/SK/X/2018 tentang Kelas, Tipe dan Daerah Hukum Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding pada Empat Lingkungan Peradilan.
2. Pengalihan Pejabat Koordinator pada Kepaniteraan dan Pejabat Struktural pada Direktorat Pranata dan Tata Laksana Perkara, Direktorat Jenderal Badan Peradilan, menjadi Pejabat Fungsional Pranata Peradilan melalui metode inpassing.
3. Mendorong pembentukan 13 (tiga belas) pengadilan tingkat banding melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Bali, Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat, Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau, Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Barat dan Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Papua Barat, Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau,

Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat, dan Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara, serta Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram, dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado.

### Area IV: Penataan Ketatalaksanaan

1. Peluncuran aplikasi Electronic State Asset Development and Enhancement Work Application (e-SADEWA) yang merupakan inovasi tingkat lanjut di bidang pengelolaan barang milik negara (BMN) melalui peningkatan fungsi pada aplikasi Siperhari.
2. Peningkatan penerapan keterbukaan informasi publik melalui penyelenggaraan program-program kreatif, antara lain "MARI Berbincang", "Ruang Inspirasi", dan "MA Goes to Campus."
3. Pengembangan sistem informasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (ePPID) secara daring dengan alamat situs web eppid.mahkamahagung.go.id.
4. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama menerima anugerah *Top Digital Awards* Tahun 2021 yang diselenggarakan oleh Majalah *IT Works* dan didukung oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi serta Dewan TIK Nasional.

### Area V: Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur

1. Pelaksanaan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 723 Tahun 2021 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Mahkamah Agung RI Tahun Anggaran 2021.
2. Penyelenggaraan pelatihan sertifikasi program prioritas nasional, pelatihan sertifikasi, dan pelatihan teknis yudisial dengan jumlah total sebanyak 4.048 (empat ribu empat puluh delapan) aparatur.

3. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan aparatur secara daring dengan *output* sebanyak 30.371 (tiga puluh ribu tiga ratus tujuh puluh satu) peserta.
4. Pusdiklat Menpim meraih dua kategori akreditasi dari Lembaga Administrasi Negara, yaitu Akreditasi Program Pelatihan Pemerintah dengan nilai triple A dan Akreditasi Lembaga Penyelenggara Pelatihan Pemerintah dengan penghargaan bintang 2.
5. Unit penilaian Kompetensi (*Assessment Center*) Mahkamah Agung menerima Akreditasi Penyelenggara Penilaian Kompetensi Kategori B dari Badan Kepegawaian Negara.
6. Penerbitan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor /KMA/SK/XII/2021 tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 209/KMA/SK/VIII/2020 tentang Penetapan Kelas Jabatan Pegawai di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.

#### Area VI: Penguatan Akuntabilitas

1. Mahkamah Agung menerima Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk yang kesembilan kali secara berturut-turut.
2. Peluncuran aplikasi *Electronic Budgeting Implementation Monitoring and Accountability (e-BIMA)*, inovasi Mahkamah Agung yang berfungsi sebagai sarana monitoring dana keuangan.

#### Area VII: Penguatan Pengawasan

1. Ketua Mahkamah Agung menerima anugerah Pemimpin Perubahan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
2. Penganugerahan predikat WBBM kepada 5 (lima) unit kerja dan predikat WBK kepada 43 (empat puluh tiga) unit kerja di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.

3. Penyerahan sertifikat Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) oleh Badan Pengawasan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pengadilan Negeri Yogyakarta, Pengadilan Negeri Denpasar, Pengadilan Negeri Makassar, Pengadilan Negeri Ternate, Pengadilan Negeri Padang dan Pengadilan Negeri Pangkalpinang.

#### Area VIII: Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Berbagai capaian Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung pada Area VIII adalah sebagai berikut.

1. Mahkamah Agung bersama Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Hukumonline mempersembahkan "Anugerah Mahkamah Agung 2021" kepada pengadilan-pengadilan serta advokat dan juga hakim mediator dalam memanfaatkan peradilan elektronik (*E-Court*), pelaksanaan gugatan sederhana, dan mediasi.
2. Penyelenggaraan lomba penilaian Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum.
3. Salah satu unit kerja di Mahkamah Agung, yaitu Pengadilan Agama Kabupaten Malang, menjadi nomine dalam Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik tahun 2021 yang diselenggarakan oleh Kementerian PANRB, dan berhasil masuk dalam kategori Top 15 Replikasi dengan inovasi berupa Pelayanan Terpadu Satu Pintu *Online*.
4. Apresiasi oleh Presiden Republik Indonesia pada saat Pidato Kenegaraan pada tanggal 16 Agustus 2021, terhadap pelaksanaan proses administrasi dan persidangan di Mahkamah Agung secara elektronik (*E-Court*) yang dinilai telah mampu mempercepat penanganan perkara dan proses peradilan dengan tepat dan cepat di tengah pandemi *Covid-19*.

## HASIL EVALUASI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

Tabel Penilaian Lembar Kerja Evaluasi Instansi Mahkamah Agung (Pusat) Tahun 2021 (Unevaluated)

No.	Komponen	Bobot	Nilai 2021 (Unevaluated)
<b>KOMPONEN PENGUNGKIT</b>			
I	PEMENUHAN	20,00	19,76
1.	Manajemen Perubahan	2,00	1,96
2.	Deregulasi Kebijakan	2,00	2,00
3.	Penataan dan Penguatan Organisasi	3,00	3,00
4.	Penataan Tata Laksana	2,50	2,50
5.	Penataan Sistem Manajemen SDM	3,00	2,90
6.	Penguatan Akuntabilitas	2,50	2,50
7.	Penguatan Pengawasan	2,50	2,43
8.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	2,50	2,48
II	HASIL ANTARA AREA PERUBAHAN	10,00	4,29
1.	Kualitas Pengelolaan Arsip	1,00	0,44
2.	Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	1,00	0,00
3.	Kualitas Pengelolaan Keuangan	1,00	0,92
4.	Kualitas Pengelolaan Aset	1,00	0,00
5.	Sistem Merit (Merit System)	1,00	0,00
6.	ASN Profesional	1,00	0,69
7.	Kualitas Perencanaan	1,00	0,00
8.	Maturitas SPIP	1,00	0,66
9.	Kapabilitas APIP	1,00	0,60
10.	Tingkat Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik	1,00	0,97
III	REFORM	30,00	26,22
1.	Manajemen Perubahan	3,00	2,66
2.	Deregulasi Kebijakan	3,00	3,00
3.	Penataan dan Penguatan Organisasi	4,50	4,50
4.	Penataan Tata Laksana	3,75	3,75
5.	Penataan Sistem Manajemen SDM	4,50	2,15

No.	Komponen	Bobot	Nilai 2021 (Unevaluated)
6.	Penguatan Akuntabilitas	3,75	3,16
7.	Penguatan Pengawasan	3,75	3,25
8.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	3,75	3,75
TOTAL PENGUNGKIT		60,00	50,26
<b>KOMPONEN HASIL</b>			
1.	Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	10,00	8,17
2.	Kualitas Pelayanan Publik	10,00	9,73
3.	Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN	10,00	9,83
4.	Kinerja Organisasi	10,00	8,44
TOTAL HASIL		40,00	36,16
NILAI EVALUASI REFORMASI BIROKRASI MAHKAMAH AGUNG (PUSAT)		100,00	86,42

Tabel Nilai Evaluasi Unit Eselon I pada Mahkamah Agung Tahun 2021 (Unevaluated)

Uraian	Nilai PMPRB Mahkamah Agung (unevaluated)
	Tanggal 18 Juni 2021
Mahkamah Agung (Pusat)	86,42
Mahkamah Agung (Unit Eselon I)	33,67
001. Badan Urusan Administrasi	34,47
002. Kepaniteraan	35,48
003. Direktorat Badan Peradilan Umum	34,87
004. Direktorat Badan Peradilan Agama	34,56
005. Direktorat Badan Peradilan Militer dan TUN	34,30
006. Badan Penelitian dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum Peradilan Mahkamah Agung	30,27
007. Badan Pengawasan	34,00
Nilai Total Indeks PMPRB Mahkamah Agung 2021	86,12



Tabel Indeks Nilai Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung tahun 2017 s.d. 2021

Tahun Evaluasi	2017	2018	2019	2020	2021 (Unevaluated)
Indeks RB Mahkamah Agung	74,05	75,50	78,40	79,04	86,12

### PENILAIAN MANDIRI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS (PMPZI)

Berdasarkan evaluasi eksternal pembangunan Zona Integritas tahun 2021 yang dilakukan oleh TPN terhadap 4.331 (empat ribu tiga ratus tiga puluh satu) unit kerja dari 243 (dua ratus empat puluh tiga) Instansi Pemerintah, diperoleh hasil yaitu 486 (empat ratus delapan puluh enam) unit kerja memenuhi persyaratan meraih WBK dan 72 (tujuh puluh dua) unit kerja memenuhi persyaratan meraih WBBM, dan telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1472 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Tahun 2021. Dari 314 unit kerja yang diajukan Mahkamah Agung, sebanyak 48 (empat puluh delapan) unit kerja ditetapkan berpredikat WBK/WBBM, dengan rincian sebagai berikut:

- 43 (empat puluh tiga) unit kerja berpredikat WBK; dan
- 5 (lima) unit kerja berpredikat WBBM.

### AKSES TERHADAP KEADILAN DAN PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK

#### PROGRAM PEMBARUAN

##### Perma Nomor 4 tahun 2020

Dalam rangka memenuhi tuntutan masyarakat akan terwujudnya kepastian hukum yang berkeadilan melalui peradilan secara sederhana, cepat, dan berbiaya ringan, Mahkamah Agung menerapkan sistem peradilan secara elektronik. Sebagai dasar impelementasinya Mahkamah Agung menerbitkan Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik dan Perma Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik.

#### AKSES TERHADAP KEADILAN

##### Optimalisasi kinerja pengadilan baru

Dengan bertambahnya 85 pengadilan baru pada tahun 2018, Mahkamah Agung pada tahun 2021 telah melengkapi kekurangan sumber daya manusia dengan 1.825 orang terdiri atas 509 orang hakim, 584 orang tenaga teknis kepaniteraan, 283 orang pejabat struktural, dan 449 orang staf. Terkait dengan pembangunan gedung kantor sampai tahun 2021 Mahkamah Agung telah melaksanakan pembangunan 37 pengadilan baru meskipun belum sepenuhnya selesai karena adanya kebijakan penghematan anggaran dari Kementerian Keuangan. Penyelesaian pembangunan gedung tersebut menjadi prioritas Mahkamah Agung pada tahun 2022. Mahkamah Agung tahun 2022 merencanakan akan melaksanakan pembangunan 26 gedung kantor pengadilan baru.

##### Peningkatan pelayanan peradilan melalui persidangan elektronik

Dalam rangka mendukung pelaksanaan pengadilan elektronik, Mahkamah Agung melalui Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 161/KMA/SK/VIII/2021 tentang Penerima Anugerah Mahkamah Agung Tahun 2021 yang diikuti oleh pengadilan tingkat pertama se-Indonesia diperoleh hasil sebagai berikut.

PERADILAN UMUM	
Kelas I A Khusus	1. Pengadilan Negeri Surabaya
	2. Pengadilan Negeri Semarang
	3. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
Kelas I A	1. Pengadilan Negeri Padang
	2. Pengadilan Negeri Jambi
	3. Pengadilan Negeri Banyuwangi
Kelas I B	1. Pengadilan Negeri Kandangan
	2. Pengadilan Negeri Pangkalan Bun
	3. Pengadilan Negeri Subang
Kelas II	1. Pengadilan Negeri Muara Bulian
	2. Pengadilan Negeri Lasusua
	3. Pengadilan Negeri Amuntai

PERADILAN AGAMA	
Kelas I A	1. Pengadilan Agama Metro
	2. Pengadilan Agama Manado
	3. Pengadilan Agama Padang
Kelas I B	1. Pengadilan Agama Bangkinang
	2. Mahkamah Syariah Takengon
	3. Pengadilan Agama Mungkid
Kelas II	1. Pengadilan Agama Tamiyang Layang
	2. Pengadilan Agama Kuala Kurun
	3. Pengadilan Agama Kandangan

PERADILAN TATA USAHA NEGARA	
Tipe A	1. Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang
	2. Pengadilan Tata Usaha Negara Medan
	3. Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar
Tipe B	1. Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru
	2. Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin
	3. Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda
Tipe C	1. Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari
	2. Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkal Pinang
	3. Pengadilan Tata Usaha Negara Palu

## Penyelesaian Perkara Gugatan Sederhana, Mediasi, dan Diversi

### Gugatan Sederhana

Pada tahun 2021 pengadilan tingkat pertama telah menerima total sebanyak 8.331 perkara gugatan sederhana, yaitu sebanyak 8.028 perkara di lingkungan Peradilan Umum dan sebanyak 303 perkara di lingkungan Peradilan Agama. Mahkamah Agung melalui Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 161/KMA/SK/VIII/2021 tentang Penerima Anugerah Mahkamah Agung Tahun 2021 yang diikuti oleh pengadilan tingkat pertama se-Indonesia diperoleh hasil sebagai berikut.

PERADILAN UMUM	
Kelas I A Khusus	1. Pengadilan Negeri Semarang
	2. Pengadilan Negeri Surabaya
	3. Pengadilan Negeri Makassar
Kelas I A	1. Pengadilan Negeri Yogyakarta
	2. Pengadilan Negeri Cilacap
	3. Pengadilan Negeri Tegal
Kelas I B	1. Pengadilan Negeri Kandangan
	2. Pengadilan Negeri Curup
	3. Pengadilan Negeri Maros
Kelas II	1. Pengadilan Negeri Pacitan
	2. Pengadilan Negeri Sangatta
	3. Pengadilan Negeri Waikabubak

PERADILAN AGAMA	
Kelas I A	1. Pengadilan Agama Cibinong
	2. Pengadilan Agama Bandung
	3. Pengadilan Agama Medan
Kelas I B	1. Pengadilan Agama Mojokerto
	2. Pengadilan Agama Gunung Sugih
	3. Pengadilan Agama Wonogiri
Kelas II	1. Pengadilan Agama Pematang Siantar
	2. Pengadilan Agama Kepahiang
	3. Pengadilan Agama Kota Madya Madiun

### Mediasi

Mahkamah Agung melalui Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 161/KMA/SK/VIII/2021 tentang Penerima Anugerah Mahkamah Agung Tahun 2021 telah menetapkan pengadilan berprestasi dalam hal mediasi sebagai berikut.

PERADILAN UMUM	
Kelas I A Khusus	1. Pengadilan Negeri Makassar
	2. Pengadilan Negeri Surakarta
	3. Pengadilan Negeri Bekasi
Kelas I A	1. Pengadilan Negeri Jambi
	2. Pengadilan Negeri Mamuju
	3. Pengadilan Negeri Cilacap
Kelas I B	1. Pengadilan Negeri Curup
	2. Pengadilan Negeri Pematang Siantar
	3. Pengadilan Negeri Kab. Magelang di Mungkid
Kelas II	1. Pengadilan Negeri Toli-Toli
	2. Pengadilan Negeri Rembang
	3. Pengadilan Negeri Pare-Pare

PERADILAN AGAMA	
Kelas I A	1. Pengadilan Agama Bogor
	2. Pengadilan Agama Metro
	3. Pengadilan Agama Tulungagung
Kelas I B	1. Pengadilan Agama Kab. Madiun
	2. Pengadilan Agama Dumai
	3. Pengadilan Agama Martapura
Kelas II	1. Pengadilan Agama Bengkulu
	2. Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam
	3. Pengadilan Agama Penajam

Pada tahun 2021 perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi sebanyak 10.151 perkara. Data Mediasi lingkungan Peradilan Umum sebanyak 1.187 perkara dan mediasi berhasil di lingkungan Peradilan Agama sebanyak 8.964 perkara.

### Keadilan Restoratif

Pelaksanaan *restorative justice* yang masih terbatas pada diversifikasi merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana. Pada tahun 2021 perkara pidana anak yang berhasil diselesaikan melalui diversifikasi sebanyak 315 perkara.

### Peningkatan Pelayanan Publik

#### Akreditasi Penjaminan Mutu (APM)

Tabel Jumlah Akreditasi Penjaminan Mutu di Lingkungan Peradilan Umum Tahun 2021

No.	Nama Pengadilan	Jumlah
1.	Pengadilan Tinggi	30
2.	Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus	15
3.	Pengadilan Negeri Kelas I A	24
4.	Pengadilan Negeri Kelas I B	78
5.	Pengadilan Negeri Kelas II	264
	Jumlah	412

Tabel Jumlah Akreditasi Penjaminan Mutu di Lingkungan Peradilan Agama Tahun 2021

No.	Nama Pengadilan	Jumlah
1.	Mahkamah Syar'iyah Aceh/ Pengadilan Tinggi Agama	29
2.	Mahkamah Syar'iyah Aceh/ Pengadilan Agama Kelas I A	82
3.	Mahkamah Syar'iyah Aceh/ Pengadilan Agama Kelas I B	108
4.	Mahkamah Syar'iyah Aceh/ Pengadilan Agama Kelas II	222
	Jumlah	441

Tabel Akreditasi Penjaminan Mutu di Lingkungan Peradilan Militer Tahun 2021

No.	Nama Pengadilan	Jumlah
1.	Pengadilan Militer Utama	1
2.	Pengadilan Militer Tinggi	3
3.	Pengadilan Militer	19
	Jumlah	23

Tabel Akreditasi Penjaminan Mutu di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara Tahun 2021

No.	Nama Pengadilan	Jumlah
1.	Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara	4
2.	Pengadilan Tata Usaha Negara	30
	Jumlah	34

### Inovasi Pelayanan Publik

Aplikasi yang berhasil dibuat pada tahun 2021 adalah sebagai berikut.

- Aplikasi Layanan Elektronik Terpadu (Lentera)
- Aplikasi Survei Pelayanan Elektronik (Sisuper)
- Aplikasi Pengawasan Elektronik Eksekusi (Perkusi)
- Pusat Data Perkara
- Portal Ekonomi Syariah
- Aplikasi PTSP *Online* Pengadilan Tingkat Banding
- Aplikasi Penilaian APM (Akreditasi Penjamin Mutu)
- Laporan Elektronik (E-Laporan)
- Aplikasi Virtualisasi Surat Izin Online (Vision+) Satuan Kerja di Lingkungan Peradilan Agama
- Aplikasi E-BIMA (*Electronic Budgeting Implementation Monitoring And Accountability*)
- Aplikasi E-SADEWA (*Electronic State Asset Development and Enhancement Work Application*)

### Layanan Peradilan Bagi Masyarakat Tidak Mampu

- a) Layanan Pembebasan Biaya Perkara

Tabel Realisasi Layanan Pembebasan Biaya Perkara pada Tahun 2021

No.	Lingkungan Peradilan	Jumlah Perkara
1.	Peradilan Umum	1.523
2.	Peradilan Agama	1.799
3.	Peradilan Tata Usaha Negara	11
	Total	3.333

- b) Pos Bantuan Hukum (Posbakum)

Tabel Data Layanan Posbakum di Peradilan Umum, Peradilan Agama, dan Peradilan Tata Usaha Negara pada Tahun 2021

No.	Lingkungan Peradilan	Jumlah Jam Layanan
1.	Peradilan Umum	111.368
2.	Peradilan Agama	1.899
3.	Peradilan Tata Usaha Negara	1.044
	Total	114.311

- c) Sidang di Luar Gedung Pengadilan

Tabel Data Layanan Sidang di Luar Gedung Pengadilan di Peradilan Umum, Peradilan Agama, dan Peradilan Militer pada Tahun 2021

No.	Lingkungan Peradilan	Jumlah Layanan
1.	Peradilan Umum	4.872
2.	Peradilan Agama	5.589
3.	Peradilan Militer	-
	Total	10.461

- d) Pelayanan Terpadu Sidang Keliling

Pelayanan terpadu sidang keliling yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah pada tahun 2021 telah memberikan layanan sebanyak 184 perkara.

### Kemudahan Akses bagi Penyandang Disabilitas

Dalam rangka melanjutkan pemenuhan layanan peradilan bagi penyandang disabilitas, Mahkamah Agung pada tahun 2021 telah menetapkan 50 pengadilan sebagai percontohan dalam sarana prasarana bagi penyandang disabilitas yang akan diberi anggaran untuk pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana penyandang disabilitas.

### Keterbukaan Informasi Publik

a) Pelayanan Informasi

Tabel Data Publikasi Putusan

No.	Lingkungan Peradilan	Jumlah Perkara Dipublikasi
1.	Umum	355.333
2.	Agama	606.837
3.	Militer	2.124
4.	Tata Usaha Negara	3.032
5.	Mahkamah Agung	13.328
Total		980.654

b) Pelayanan Meja Informasi dalam PTSP

Meja informasi telah terintegrasi dalam PTSP di pengadilan seluruh Indonesia. Meja informasi berfungsi sebagai pelayan bagi masyarakat yang membutuhkan informasi hal-hal yang berkaitan dengan pengadilan, seperti prosedur berperkara dan pelayanan informasi umum lainnya.

### DATA PELAYANAN INFORMASI PTSP PENGADILAN

No.	Informasi	Jumlah Layanan
1.	Layanan Informasi Mahkamah Agung	1.932
2.	Layanan Informasi Badilum	2.051
3.	Layanan Informasi Badilag	266.943
4.	Layanan Informasi Badilmiltun (Peradilan Militer)	118
5.	Layanan Informasi Badilmiltun (Peradilan TUN)	428
Total		271.472

c) Publikasi Melalui Media Cetak

### Majalah Mahkamah Agung

Majalah Mahkamah Agung pada tahun 2021 telah diterbitkan tiga edisi sebanyak 3.600 eksemplar. Pada edisi 25 sebanyak 1.200 eksemplar, edisi 26 sebanyak 1.200 eksemplar dan edisi 24 sebanyak 1.200 eksemplar. Majalah Mahkamah Agung juga dapat diakses secara elektronik melalui tautan <https://www.mahkamahagung.go.id/id/majalah>.

### Newsletter Kepaniteraan

Pada tahun 2021 *Newsletter* Kepaniteraan Mahkamah Agung telah terbit satu edisi sebanyak 600 eksemplar. *Newsletter* dapat diakses di <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/index.php/newsletterkepaniteraan>

### Majalah Dandapala

Dandapala terbit setiap dua bulan dengan jumlah edisi sebanyak 130.000 edisi sejak tahun 2015 dan dicetak 3.500 eksemplar tiap edisi. Majalah ini sangat diminati oleh kalangan internal dan eksternal secara luas karena rubrik yang tersaji selalu mengangkat tema-tema *up to date* tentang program dan kebijakan Mahkamah Agung.

### Majalah Peradilan Agama

Pada tahun 2021 majalah peradilan agama telah menerbitkan dua edisi sebanyak 1700 eksemplar. Selain bentuk cetak, *Majalah Peradilan Agama* juga dapat diakses secara elektronik dengan tautan <https://badilag.mahkamahagung.go.id/majalah/publikasi/majalah/majalah-peradilan-agama>.

### Jurnal Hukum dan Peradilan

Pada tahun 2021 *Jurnal Hukum dan Peradilan* telah menerbitkan tiga edisi sebanyak 1200 eksemplar dan dapat diakses secara elektronik melalui: <http://jurnalhukumdandanperadilan.org>



# MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA

## PROGRAM PEMBARUAN

Mahkamah Agung fokus pada pendekatan pengelolaan SDM sebagai aset yang dikenal sebagai *human capital*. Salah satu contoh konkret di dalam pengelolaan SDM di Mahkamah Agung berbasis *human capital* adalah membentuk Manajemen Talenta sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memberikan opsi pengelolaan sumber daya manusia (SDM), seperti mengenali potensi dan kompetensi serta manajemen kinerja sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil.

## SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEPEGAWAIAN (SIKEP)

SIKEP merupakan sistem informasi yang digunakan untuk mengelola data kepegawaian pada Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di bawahnya sejak diluncurkan tahun 2018. Adapun kegiatan yang dilakukan terkait pengembangan SIKEP pada tahun 2021 adalah sebagai berikut.

- 1) Sinkronisasi data pegawai SIKEP-SAPK BKN
- 2) Pengembangan Modul Penghargaan Satya Lencana
- 3) Sinkronisasi data Pegawai Sikep-Sitara Tapera
- 4) Pengembangan modul Pengangkatan CPNS-PNS

## PENYUSUNAN STANDAR KOMPETENSI

Penyusunan standar kompetensi teknis dilakukan sebagai berikut:

- a) melakukan diskusi kelompok terpumpun (DKT) atau *focus group discussion* (FGD) dengan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang penyusunan standar kompetensi teknis bidang tugas Mahkamah Agung sesuai dengan fungsinya sebagai Lembaga peradilan;

- b) melakukan DKT dengan perwakilan dari setiap Direktorat Jenderal yang berada di bawah Mahkamah Agung terkait penyusunan kamus kompetensi teknis perkara dan persidangan;
- c) menganalisis fungsi Mahkamah Agung guna memperoleh *output* dan *outcome* yang digunakan untuk mengidentifikasi kompetensi teknis jabatan;
- d) mengategorisasikan fungsi Mahkamah Agung menjadi 6 bidang kekhususan, yaitu kebijakan, hukum materiel, hukum formil, administrasi perkara, pengawasan, dan pemberian pertimbangan;
- e) merumuskan definisi dari setiap bidang kekhususan tersebut untuk diturunkan menjadi 26 (dua puluh enam) kompetensi;
- f) mendeterminasi kompetensi berdasarkan tingkat kemahiran yang dibagi menjadi 5 kategori kemahiran; dan
- g) menetapkan indikator perilaku dari setiap tingkat kemahiran.

### **ASSESSMENT CENTER**

Unit Penilaian Kompetensi (*Assessment Center*) Mahkamah Agung RI ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung RI dengan menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 7/KMA/SK/I/2020 tanggal 17 Januari 2020 tentang Pembentukan Unit Penilaian Kompetensi Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pada tahun 2021 Mahkamah Agung telah melantik 1 (satu) orang ke dalam jabatan fungsional asesor SDM aparatur jenjang ahli muda melalui penyesuaian/ inpassing berdasarkan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI 281/SEK/Kp.I/SK/IV/2021 tanggal 1 April 2021 tentang Penyesuaian/Inpassing dalam Jabatan Fungsional Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur dan 5 (lima) orang ke dalam jabatan fungsional asesor SDM aparatur jenjang ahli pertama melalui perpindahan dari jabatan lain berdasarkan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 1177/SEK/Kp.I.SK/XI/2021 tanggal 15 November 2021 tentang Pengangkatan melalui Perpindahan dari Jabatan Lain ke dalam Jabatan Fungsional Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur. Dengan demikian, Unit Penilaian Kompetensi Mahkamah Agung saat ini telah memiliki 6 (enam) orang asesor.

### **PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN**

Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI telah menggulirkan beberapa inovasi dan peningkatan sistem dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pelatihan bagi SDM Mahkamah Agung yang terus dilakukan secara berkesinambungan dan berkelanjutan, yaitu sebagai berikut.

- Pengelolaan Pelatihan Berbasis Teknologi Informasi Komunikasi (TIK)
- Metode Pembelajaran pada Masa Pandemi
- Penyelenggaraan Kelas Inspirasi
- Pengembangan Modul Pelatihan Pimpinan Pengadilan

### **SISTEM DAN JAM KERJA DALAM TATANAN NORMAL BARU.**

Melalui Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Surat Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengaturan Jam Kerja dalam Tatanan Normal Baru pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya untuk wilayah Jabodetabek dan wilayah dengan status zona merah Covid-19,

## REKRUTMEN SUMBER DAYA MANUSIA

### REKRUTMEN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS)

Tabel Jumlah dan Komposisi Sumber Daya Manusia Tahun 2021

Jabatan	MA	Peradilan Umum		Peradilan Agama		Peradilan Militer		Peradilan TUN		Jumlah
		Tingkat Banding	Tingkat Pertama	Tingkat Banding	Tingkat Pertama	Tingkat Banding	Tingkat Pertama	Tingkat Banding	Tingkat Pertama	
Hakim Agung	50									50
Hakim Tinggi Yustisial	68									68
Hakim Yustisial	178									178
Hakim		886	3850	361	2701	31	100	46	298	8273
Panitera		699	4166	408	2903	25	77	73	313	8664
Jurusita			1804		1174			7	85	3070
SDM Non Teknis	758	704	3454	473	2399	96	296	64	270	8514
Jabatan Fungsional	472	134	375	151	521	1	9	7	64	1734
<b>Total</b>	<b>1526</b>	<b>2423</b>	<b>13649</b>	<b>1393</b>	<b>9698</b>	<b>153</b>	<b>482</b>	<b>197</b>	<b>1030</b>	<b>30551</b>

Tabel Data Pensiun SDM Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya Tahun 2021

No.	Jenis Pensiun	Jumlah
1.	Batas Usia Pensiun	1.007
2.	Pemberhentian atas Permintaan Sendiri	28
3.	Pemberhentian Karena Tidak Cakap Jasmani dan/atau Rohani	6
4.	Pemberhentian dengan Hormat Tidak atas Permintaan Sendiri	3
5.	Pemberhentian Janda/Duda	320
6.	Pemberhentian Anumerta	8
<b>Total</b>		<b>1.337</b>

Tabel Formasi CPNS tahun 2021

No.	Jabatan	Jumlah
1.	Analisis Perkara Peradilan	1.540
2.	Analisis Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	303
3.	Pengelola Perkara	1.192
4.	Pengelola Barang Milik Negara	302
<b>Total</b>		<b>3.337</b>

Tabel Pelaksanaan Seleksi Penerimaan CPNS Tahun 2021

No	Rincian Seleksi	Jumlah
1.	Pendaftar	31.660
2.	Lulus Seleksi Administratif dan Sanggahan	30.015
3.	Lulus Seleksi Kompetensi Dasar	8.299
4.	Lulus Seleksi Kompetensi Bidang dan Wawancara	3.337
5.	Rekon Integrasi Hasil SKD dan SKB	3.337



## REKRUTMEN CALON HAKIM AD HOC

Tabel Rekapitulasi Seleksi Calon Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tahap XV Tahun 2021 (dalam orang)

NO.	Rincian Seleksi	Tingkat Banding	Tingkat Pertama	Jumlah
1.	Pendaftar	189	267	456
2.	Seleksi Administratif	147	196	343
3.	Peserta Ujian Tertulis	144	193	337
4.	Hasil Seleksi Tertulis	77	94	171
5.	Peserta Seleksi Wawancara dan Profile Assessment	70	92	161
6.	Hasil Seleksi Wawancara dan Profile Assessment	9	28	37

## REKRUTMEN JABATAN FUNGSIONAL

Tabel Jumlah dan Komposisi Formasi Jabatan Fungsional Tahun 2021

Jabatan	MA	Peradilan Umum		Peradilan Agama		Peradilan Militer		Peradilan TUN		Jumlah
		Tingkat Banding	Tingkat Pertama	Tingkat Banding	Tingkat Pertama	Tingkat Banding	Tingkat Pertama	Tingkat Banding	Tingkat Pertama	
Analisis Kebijakan	1									1
Analisis Kepegawaian	28	25	3	35	50		7	3	20	171
Analisis Pengelolaan Keuangan APBN	13	22	18	19	17		1	2	3	95
Arsiparis	20	23	143	21	144				11	362
Asesor SDM Aparatur	6									6
Auditor	36									36
Auditor Kepegawaian	9									9
Dokter	6									6
Peneliti	10									10
Penerjemah	8									8
Pengembang Teknologi Pembelajaran	3									3
Perancang Peraturan Perundang-undangan	1									1
Perawat	6									6
Perencana	6	2	3	1	1					13
Pranata Humas	3									3
Pranata Keuangan APBN	9	22	45	25	15				5	121

Jabatan	MA	Peradilan Umum		Peradilan Agama		Peradilan Militer		Peradilan TUN		Jumlah
		Tingkat Banding	Tingkat Pertama	Tingkat Banding	Tingkat Pertama	Tingkat Banding	Tingkat Pertama	Tingkat Banding	Tingkat Pertama	
Pranata Komputer	52	35	159	46	292			2	22	608
Pranata Peradilan	232									232
Pustakawan	13	5	4	4	2	1	1		3	33
Widyaiswara	10									10
<b>Total</b>	<b>472</b>	<b>134</b>	<b>375</b>	<b>151</b>	<b>521</b>	<b>1</b>	<b>9</b>	<b>7</b>	<b>64</b>	<b>1734</b>

Tabel Pengangkatan Jabatan Fungsional melalui Mekanisme Penyesuaian/Inpasing Tahun 2021

No	Jabatan	Jumlah
1.	Pranata Keuangan APBN	123
2.	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN	97
3.	Analisis Kepegawaian	39
4.	Pranata Komputer	12
5.	Pustakawan	3
6.	Analisis Kebijakan	1
7.	Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur	1
<b>Total</b>		<b>276</b>

Tabel Pengangkatan Jabatan Fungsional Melalui Perpindahan dari Jabatan lain Tahun 2021

No.	Jabatan	Jumlah
1.	Perencana	3
2.	Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur	5
<b>Total</b>		<b>8</b>

Tabel Pengalihan Jabatan Fungsional Peneliti Tahun 2021

No.	Jabatan	Jumlah
1.	Peneliti ke BRIN	8
2.	Peneliti ke Pranata Peradilan	1
3.	Tetap di Mahkamah Agung dengan status Peneliti (sampai dengan 24 Agustus 2022)	2
<b>Total</b>		<b>11</b>

## JABATAN FUNSIONAL PRANATA PERADILAN

Tabel Pengangkatan Jabatan Fungsional Pranata Peradilan Tahun 2021

No.	Jabatan	Jumlah
1.	Pranata Peradilan Ahli Madya	42
2.	Pranata Peradilan Ahli Muda	143
3.	Pranata Peradilan Ahli Pertama	47
<b>Total</b>		<b>232</b>

## PENETAPAN JABATAN FUNSIONAL PANITERA PENGGANTI, JURUSITA, DAN JURUSITA PENGGANTI

Tahun 2021 Mahkamah Agung dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah melaksanakan ekspose pembentukan jabatan fungsional panitera pengganti, jurusita, dan jurusita pengganti. Namun, Pemerintah melalui Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/639/M.SM.02.00/2021 tanggal 3 November 2021 tentang Moratorium Pengusulan Jabatan Fungsional Baru, untuk sementara waktu, melakukan penghentian sementara (moratorium) terhadap penetapan jabatan fungsional baru.

## PENUGASAN ANGGOTA MILITER PADA LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG

Tabel Penugasan Anggota Militer pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya Tahun 2021

No.	Jabatan	Jumlah
1.	Direktur Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Militer	1
2.	Hakim Utama	1
3.	Hakim Militer Tinggi	3
4.	Sekretaris Pengadilan Militer Tinggi	1
5.	Kepala Bagian Pengamanan	1
6.	Panitera Pengadilan Pengadilan Militer Utama	1
7.	Panitera Pengganti Dilmil II-08 Jakarta	1
8.	Panitera Pengganti Dilmil II-09 Bandung	2
Total		11

Tabel Anggota Militer yang Keluar dari Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya Tahun 2021

No.	Jabatan	Jumlah
1.	Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta	1
2.	Panitera Pengadilan Militer Utama	1
3.	Panitera Pengganti Dilmil II Jakarta.	1
Total		3

## PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Tabel Capaian Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2021

No.	Unit Eselon II	Target (orang)	Realisasi (orang)	Capaian (%)
1.	Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknis Peradilan	3.670	4.244	115,64
2.	Pusat Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan	6.030	13.478	223,51
Total		9.700	17.722	182,70

## PENGEMBANGAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA DI BIDANG TEKNIS PERADILAN

Pada tahun 2021 Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknis Peradilan telah mendidik dan melatih tenaga teknis peradilan sebanyak 4.244 orang dengan capaian kerja sebesar 115,64 % dari target kerja sebanyak 3.670 orang. Berikut peincian kegiatan pendidikan dan pelatihan di bidang teknis peradilan.

### PENDIDIKAN DAN PELATIHAN CALON HAKIM (PPC) TERPADU

Tabel Pendidikan dan Pelatihan Calon Hakim (PPC) Terpadu Tahun 2021

No.	Pola Diklat	Target (orang)	Lulus (orang)	Capaian (%)
1.	Pendidikan dan Pelatihan Calon Hakim Terpadu Peradilan Militer	40	26	65
Total		40	26	65

### PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SERTIFIKASI

Tabel Program Pelatihan Sertifikasi Prioritas Nasional Tahun 2021

No.	Pola Diklat	Target (orang)	Lulus (orang)	Capaian (%)
1.	Pelatihan Sertifikasi Hakim Niaga	50	55	110
2.	Pelatihan Sertifikasi Hakim Mediator	500	548	109,60
3.	Pelatihan Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup	160	174	108,75
4.	Pelatihan Sertifikasi SPPA Terpadu	160	193	120,62
Total		870	970	111,49

**Tabel Program Pelatihan Sertifikasi Nonprioritas Nasional Tahun 2021**

No.	Pola Didat	Target (orang)	Lulus (orang)	Capaian (%)
1.	Pelatihan Sertifikasi Perikanan	40	45	112,5
2.	Pelatihan Sertifikasi Hakim Pengadilan Hubungan Industrial	40	91	227,5
3.	Pelatihan Sertifikasi Hakim dalam Tindak Pidana Korupsi	80	196	245
4.	Pelatihan Sertifikasi Ekonomi Syariah	80	81	101,25
<b>Total</b>		<b>240</b>	<b>413</b>	<b>172,08</b>

### Program Pelatihan Teknis Fungsional

**Tabel Program Pelatihan Teknis Fungsional Tahun 2021**

No.	Pola Didat	Peserta (orang)	Lulus (orang)	Capaian (%)
1.	Pelatihan Teknis Yudisial Bukti Elektronik	40	37	92,50
2.	Pelatihan Teknis Yudisial Akses Perempuan terhadap Keadilan	40	44	110
3.	Pelatihan Teknis Yudisial Narkotika	40	58	145
4.	Pelatihan Teknis Yudisial Gugatan Sederhana	80	64	80
5.	Pelatihan Teknis Yudisial Hak Kekayaan Intelektual	40	43	107,50
6.	Pelatihan Teknis Yudisial Akad Syariah	80	98	122,50
7.	Pelatihan Teknis Yudisial Jinayat	40	44	110
8.	Pelatihan Teknis Yudisial Penyetaraan Ekonomi Syariah	80	78	97,50
9.	Pelatihan Teknis Yudisial Terorisme	40	48	120
10.	Pelatihan Teknis Yudisial Blasphemy	40	50	125

No.	Pola Didat	Peserta (orang)	Lulus (orang)	Capaian (%)
11.	Pelatihan Teknis Yudisial Humaniter	40	40	100
12.	Pelatihan Teknis Yudisial Tata Usaha Militer	40	39	97,50
13.	Pelatihan Teknis Yudisial Perizinan Pacsa UU Cipta Kerja	40	45	112,50
14.	Pelatihan Teknis Yudisial Sengketa Pertanahan Pasca UU Cipta Kerja	40	38	95
15.	Pelatihan Teknis Yudisial Keputusan dan Bukti Elektronik	40	37	92,50
16.	Pelatihan Teknis Yudisial Pengujian Unsur Penyalahgunaan Wewenang	40	38	92
17.	Pelatihan Teknis Yudisial Sengketa Tindakan Pemerintah	40	32	80
18.	Pelatihan Teknis Yudisial Sengketa Barang dan Jasa	40	33	82,50
19.	Pelatihan Teknis Yudisial Kepailitan	40	45	112,50
20.	Pelatihan Teknis Yudisial Penyetaraan SPPA	40	32	80
<b>Total</b>		<b>840</b>	<b>943</b>	<b>112,26</b>

**Tabel Program Pelatihan Teknis Fungsional Panitera dan Jurusita**

No.	Pola Didat	Peserta (orang)	Lulus (orang)	Capaian (%)
1.	Pelatihan Teknis Yudisial Panitera Pengganti	800	813	101,62
2.	Pelatihan Teknis Yudisial Panitera Pengganti Berkelanjutan	200	52	26
3.	Pelatihan Teknis Yudisial Jurusita/ Jurusita Pengganti	240	314	130,83
<b>Total</b>		<b>1.240</b>	<b>1.179</b>	<b>95,08</b>

## KERJA SAMA PELATIHAN

- Mahkamah Agung dengan Kementerian Hukum dan HAM RI
- Mahkamah Agung dengan Kejaksaan Agung RI
- Mahkamah Agung dengan Kepolisian RI
- Mahkamah Agung dengan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
- Mahkamah Agung dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
- Mahkamah Agung dengan ECEL dan LEIP
- Mahkamah Agung dengan *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC)
- Mahkamah Agung dengan *Indonesian Center for Environmental Law* (ICEL)
- Mahkamah Agung dengan Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia
- Mahkamah Agung dengan *Indonesia Judicial Research Society* (IJRS))

## PENGEMBANGAN KOMPETENSI SDM DI BIDANG MANAJEMEN DAN KEPEMIMPINAN

Pada tahun 2021 Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) Manajemen dan Kepemimpinan telah mendidik dan melatih tenaga administrasi peradilan dan tenaga yudisial di bidang manajemen dan kepemimpinan sebanyak 13.478 orang dengan capaian kinerja sebesar 223,51% dari target kerja sebanyak 6.030 orang. Berikut ini merupakan rincian kegiatan pendidikan dan pelatihan di bidang manajemen dan kepemimpinan.

## PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DASAR CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (LATSAR CPNS)

Tabel Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2021

No.	Pelatihan	Jumlah
1.	Diklat Latsar Golongan III Gelombang I Daring	480
2.	Diklat Latsar Golongan II Gelombang I Daring	479
Total		959

## PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN

Tabel Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tahun 2021

No.	Pelatihan	Jumlah
1.	PKA	238
2.	PKP	806
Total		1.044

## PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS ADMINISTRASI UMUM

Tabel Pendidikan dan Pelatihan Teknis Administrasi Umum

No.	Pelatihan	Jumlah
1.	Mengelola Stres di Lembaga Peradilan	93
2.	Membangun Kerja Sama Tim Peradilan	105
3.	Menjadi Pemimpin Peradilan yang Lincah	44
4.	Mengelola Arsip Digital Pengadilan	155
5.	<i>Design Thinking</i> untuk Inovasi Peradilan	91
6.	<i>Coaching</i> untuk Peradilan	196
7.	Pola Kerja Produktif	98
8.	Berpikir Kreatif dan Inovatif	157
9.	<i>Coaching</i> untuk Milenial	66
10.	Pola Pikir Pertumbuhan	63
11.	Beradaptasi dengan <i>New Normal</i>	37
12.	Memimpin Tim <i>Virtual</i>	34
13.	Mengembangkan Budaya <i>Virtual</i>	44
14.	Optimalisasi Kolaborasi Lintas Generasi	48
15.	<i>Big Data, Artificial Intelligence</i> di Pengadilan	35
16.	Pemantauan Aksi Perubahan	424
17.	Literasi Digital Pengadilan	173
18.	Membangun Pola Pikir Berkelanjutan dan Kecepatan Pembelajaran	171
19.	Pemecahan Masalah Praktis	158
20.	<i>Executive Summary</i>	680
21.	Kegiatan Humas di Pengadilan	437
22.	Publikasi Humas di Pengadilan	396
23.	<i>LIA Preparation Course for TOEFL</i>	39
24.	<i>General English for Adults 3 (Pre-Intermediate)</i>	1.285
25.	Diklat Pelayanan Prima	66

No.	Pelatihan	Jumlah
26.	Diklat Public Speaking and Effective Communication Program	377
27.	Efektivitas Pribadi	182
28.	Mengelola Orang Lain	82
29.	Ilmu Jurnalistik	295
30.	Argumentasi Gagasan di Media Massa	291
31.	Story Telling	49
32.	Basic 3D Mapping	91
33.	Basic Booklet Design with Adobe InDesign	405
34.	Basic Image Editing with Adobe Photoshop	216
35.	Basic Infographic Design with Adobe Illustrator	301
36.	Basic Modelling with 3D Max	108
37.	Basic Motion Graphic with Adobe After Effect	221
38.	Basic User Experience Design	214
39.	Basic User Interface Design	267
40.	Basic Video Editing	271
41.	Basic Video Production	281
42.	Teknik Pengelolaan Arsip Dinamis	180
43.	Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK)	454
44.	Manajemen Laporan Kinerja	741
45.	Manajemen ASN	229
46.	Pelatihan Online Teknik Penyusunan IKU dan Renstra	94
<b>Total</b>		<b>10.444</b>

## PENDIDIKAN DAN PELATIHAN JABATAN FUNSIONAL

Tabel Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Fungsional

No.	Pelatihan	Jumlah
1.	PPK dan Penyegaran PPK	236
2.	Pelatihan Manajemen Aset/BMN	578
3.	PPSPM dan Penyegaran PPSPM	217
<b>Total</b>		<b>1.031</b>

## PENGEMBANGAN HAKIM MILITER DAN ANGGOTA MILITER DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG

Tabel Pendidikan Pengembangan Umum Anggota Militer di Mahkamah Agung Tahun 2021

No.	Pendidikan	Jumlah
1.	Sekolah Staf Komando Angkatan Udara (Sesko AU)	2
2.	Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Polri	1
3.	Sekolah Komandan Kesatuan TNI AU	1
4.	Pendidikan Pembentukan Perwira TNI AD	2
5.	Pendidikan Kursus Bintara Manajemen Kejuruan	1
<b>Total</b>		<b>7</b>

Tabel Bimbingan Teknis Hakim dan Kepaniteraan Peradilan Militer Tahun 2021

No.	Nama Pelatihan	Jumlah
1.	Bimtek Hakim	132
2.	Bimtek Panitera	40
3.	Bimbingan Teknis Asesor di Lingkungan Peradilan Militer TA 2021	30
4.	Bimbingan Teknis Pelayanan Disabilitas di Lingkungan Peradilan Militer TA 2021	40
5.	Bimtek Hakim Militer dengan tema Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Peradilan Militer Tahun Anggaran 2021, 24–26 Maret 2021	40
6.	Bimtek Hakim Militer Tahun Anggaran 2021 dengan tema Penyelesaian Perkara Penyalahgunaan dan Peredaran Narkotika di Lingkungan Prajurit TNI Tanggal 9 s.d 11 Juni 2021 di Hotel Teraskita Cawang	40
7.	Bimtek Hakim III Tahun Anggaran 2021 dengan tema Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Illegal Logging di Lingkungan Peradilan Militer, 8--10 September 2021 di Park Hotel, Cawang, Jakarta	42
8.	Bimtek Panitera Pengadilan Militer Tahun Anggaran 2021 dengan tema Penyelesaian Permohonan Perkara Peninjauan Kembali Pidana Militer ke Mahkamah Agung RI di Lingkungan Peradilan Militer, 06--08 Oktober 2021 di Hotel Aryaduta, Menteng, Jakarta	40

No.	Nama Pelatihan	Jumlah
9.	Bimtek Asesor di Lingkungan Peradilan Militer, 22–24 Februari 2021 di Hotel Aryaduta, Menteng, Jakarta	30
10.	Bimtek Pelayanan Disabilitas di Lingkungan Peradilan Militer, 7--9 April 2021 di Hotel Aryaduta Menteng	40
Total		474

Tabel Pelatihan Peningkatan Kapasitas Hakim di Peradilan Militer Tahun 2021

No.	Pelatihan	Jumlah
1.	Pelatihan Peningkatan Kapasitas Hakim	49

## TANDA KEHORMATAN DAN SATYALANCANA KARYA SATYA

Tabel Penerima Penganugerahan Tanda Kehormatan Tahun 2021

No.	Nama	Penghargaan	Keterangan
1.	Dr. Artijo Alkostar, S.H., L.L.M.	Tanda Kehormatan Bintang Mahaputera Utama	Keputusan Presiden RI Nomor : 78/TK/tahun 2021 Tanggal : 12 Agustus 2021 Tentang : Penganugerahan Tanda Kehormatan Bintang Mahaputera

Tabel Penerima Penganugerahan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya Tahun 2021

No.	Penghargaan	Jumlah
1.	Satyalancana Karya Satya XXX	1.153
2.	Satyalancana Karya Satya XX	622
3.	Satyalancana Karya Satya X	1.909
Total		3.684

Tabel Penerima Penganugerahan Tanda Kehormatan Karya Satya Tahun 2021

No.	Penghargaan	Jumlah
1.	Karya Satya Sewindu	576
2.	Karya Satya Dwiwindu	1.079
Total		1.655

## PROMOSI DAN MUTASI BADAN URUSAN ADMINISTRASI (BUA)

Badan Urusan Administrasi (BUA) telah melaksanakan promosi dan mutasi SDM nonteknis di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya sebanyak 1.039 orang dengan perincian sebagai berikut.

Tabel Promosi dan Mutasi SDM Nonteknis di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya Tahun 2021

No.	Jabatan	Unit Kerja	Jumlah
1.	Eselon I	Mahkamah Agung dan Eselon I Lainnya	1
2.	Eselon II	Mahkamah Agung	8
3.	Eselon III	Mahkamah Agung	49
4.	Eselon IV	Mahkamah Agung	71
5.	Eselon II	Peradilan di bawah MA	28
6.	Eselon III	Peradilan di bawah MA	106
7.	Eselon IV	Peradilan di bawah MA	467
8.	Pelaksana	Peradilan di bawah MA	179
9.	Mutasi Antarinstansi	ke Mahkamah Agung	130
Total			1.039

Tabel Kenaikan Pangkat Otomatis SDM Nonteknis di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya Tahun 2021

No.	Pangkat	Jumlah
1.	I/c	5
2.	I/d	3
3.	II/a	4
4.	II/b	26
5.	II/c	124
6.	II/d	105
7.	III/a	57
8.	III/b	412
9.	III/c	549
10.	III/d	884
11.	IV/a	206
12.	IV/b	82
Total		2.457

Tabel Kenaikan Pangkat Nonotomatis SDM Nonteknis di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya Tahun 2021

No.	Pangkat	Jumlah
1.	III/a	1
2.	III/b	3
3.	III/c	4
4.	III/d	19
5.	IV/a	98
6.	IV/b	75
7.	IV/c	18
8.	IV/d	3
<b>Total</b>		<b>221</b>

Badan Urusan Administrasi (BUA) telah melaksanakan kegiatan pelantikan dan penyempahan pada tahun 2021 sejumlah 187 orang dengan perincian sebagai berikut.

No.	Pelantikan	Tanggal	Jumlah
1.	Pejabat Struktural (Eselon II), Hakim Tinggi Pengawas dan Jabatan Fungsional Tertentu	8 Januari 2021	19
2.	Ketua Pengadilan Tingkat Banding	13 Januari 2021	5
3.	Panitera Pengganti	28 Januari 2021	23
4.	Panitera Mahkamah Agung RI	03 Februari 2021	1
5.	Pejabat Struktural (Eselon III, IV) dan Jabatan Fungsional Tertentu	04 Februari 2021	53
6.	Ketua Pengadilan Tingkat Banding	08 Februari 2021	5
7.	Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Kasasi dan Hakim Ad Hoc Pengadilan Hubungan Industrial Tingkat Kasasi	16 April 2021	3
8.	Ketua Pengadilan Pajak	07 Mei 2021	1
9.	Ketua Muda Pengawasan	07 Mei 2021	1
10.	Ketua Pengadilan Tingkat Banding	02 Juli 2021	12

No.	Pelantikan	Tanggal	Jumlah
11.	Pejabat Struktural (Eselon II, III) dan Jabatan Fungsional Tertentu	30 Agustus 2021	26
12.	Ketua Pengadilan Tingkat Banding	22 September 2021	17
13.	Pejabat Struktural (Eselon III)	27 September 2021	1
14.	Panitera Muda	08 Oktober 2021	1
15.	Hakim Agung	19 Oktober 2021	7
16.	Panitera Muda	19 Oktober 2021	3
17.	Badan Pemeriksa Keuangan	03 November 2021	1
18.	Hakim Tinggi Pengawas	11 November 2021	7
19.	Ketua Pengadilan Tingkat Banding	30 Desember 2021	1
<b>Total</b>			<b>187</b>

## DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM

Tabel Mutasi dan Promosi SDM Nonteknis Ditjen Badilum Mahkamah Agung RI Tahun 2021

No.	Jabatan	Promosi/Mutasi Keluar	Mutasi/Rotasi Lingkup Ditjen
1.	Eselon III	5	5
2.	Eselon IV	15	15
3.	Pelaksana	5	5
<b>Total</b>		<b>25</b>	<b>25</b>

Tabel Pensiun SDM Nonteknis Ditjen Badilum Mahkamah Agung RI Tahun 2021

No.	Jabatan	Jumlah
1.	Eselon III	2
2.	Eselon IV	3
3.	Pelaksana	4
<b>Total</b>		<b>9</b>



Tabel Kenaikan Pangkat SDM Nonteknis Dirjen Badilum Mahkamah Agung RI Tahun 2021

NO.	KEPANGKATAN	JUMLAH
1.	Kenaikan Pangkat Otomatis	4
2.	Kenaikan Pangkat Pilihan	15
Total		19

Tabel Promosi dan Mutasi Hakim Peradilan Umum Tahun 2021

No.	Kegiatan	Pelaksanaan	Keterangan	Jumlah
1.	Rapat Pimpinan	3 Februari 2021	Hakim Tk. Banding	4
2.	Rapat TPM ke-1	27 April 2021	Hakim Tk. Pertama Hakim Tk. Banding Hakim Ad Hoc	460 82 69
3.	Rapat TPM ke 2	8 September 2021	Hakim Tk. Pertama Hakim Tk. Banding	396 50
4.	Rapat TPM ke-3	27 Desember 2021	Hakim Tk. Pertama Hakim Tk. Banding Hakim Ad Hoc	400 62 73
Total				1.596

Tabel Promosi dan Mutasi Kepaniteraan Peradilan Umum Tahun 2020

No.	Jabatan	Tingkat Banding	Tingkat Pertama	Jumlah
1.	Panitera	14	186	200
2.	Panitera Muda	26	421	447
3.	Mutasi Panitera Pengganti	103	199	302
4.	Pengangkatan Panitera Pengganti	0	170	170
5.	Mutasi Jurusita	0	25	25
6.	Pengangkatan Jurusita	0	88	88
7.	Lepas Jabatan	0	12	12
Total				1.244

## DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA

Tabel Mutasi dan Promosi SDM Nonteknis Ditjen Badilag Tahun 2021

No.	Jabatan	Promosi/ Mutasi Keluar	Promosi/ Mutasi Masuk	Mutasi/Rotasi Lingkup Ditjen
1.	Eselon III	2	0	8
2.	Eselon IV	0	0	17
3.	Fungsional	7	1	0
4.	Pelaksana	0	0	3
Total		9	1	28

Tabel Kenaikan Pangkat SDM nonteknis Ditjen Badilag Tahun 2021

No.	Kepangkatan	Jumlah
1	Kenaikan Pangkat Otomatis	4
2	Kenaikan Pangkat Pilihan	20
Total		24

Tabel Pensiun SDM Non Teknis Ditjen Badilag Tahun 2021

No.	Jabatan	Purnatugas/ Pensiun
1.	Eselon IV	3
Total		3

Tabel Promosi dan Mutasi Hakim Peradilan Agama Tahun 2021

No.	Kegiatan	Pelaksanaan	Jumlah
1.	Rapat TPM 1	14 Januari 2021	398
2.	Rapat Pimpinan Mahkamah Agung	16 Juni 2021	22
3.	Rapat TPM 2	22 Juni 2021	487
4.	Rapat TPM 3	10 Agustus 2021	496
Total			1.403

Tabel Kenaikan Pangkat Hakim Peradilan Agama Tahun 2021

No.	Kegiatan	Pelaksanaan	Jumlah
1.	Kenaikan Pangkat Hakim	April 2021	383
		Oktober 2021	422
Total			805

Tabel Pensiun Hakim Peradilan Agama Tahun 2021

No.	Jabatan	Jumlah
1.	Pensiun	152
2.	Meninggal Dunia	47
Total		805

Tabel Promosi dan Mutasi Kepaniteraan Peradilan Agama Tahun 2021

No.	Jabatan	Jumlah
1.	Panitera PTA/MS Aceh	13
2.	Panitera Muda PTA/MS Aceh	16
3.	Panitera Pengganti PTA/MS Aceh	75
4.	Panitera PA/MS Kelas IA	31
5.	Panitera Muda PA/MS Kelas IA	71
6.	Panitera Pengganti PA/MS Kelas IA	126
7.	Panitera PA/MS Kelas IB	44
8.	Panitera Muda PA/MS Kelas IB	122
9.	Panitera Pengganti PA/MS Kelas IB	65
10.	Panitera PA/MS Kelas II	77
11.	Panitera Muda PA/MS Kelas II	154
12.	Panitera Pengganti PA/MS Kelas II	24
13.	Pemberhentian Panitera Pengganti	4
14.	Jurusita PA/MS Kelas IA	61
15.	Jurusita Pengganti PA/MS Kelas IA	21
16.	Jurusita PA/MS Kelas IB	41
17.	Jurusita Pengganti PA/MS Kelas IB	17
18.	Jurusita PA/MS Kelas II	50
19.	Jurusita Pengganti PA/MS Kelas II	39
20.	Pemberhentian Jurusita	2
Total		1.053

## DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN TATA USAHA NEGARA

Tabel Jumlah SDM Non Teknis Ditjen Badilmiltun Tahun 2021

No.	Jabatan	Jumlah
1.	Eselon I	1
2.	Eselon II	3
3.	Eselon III	15
4.	Eselon IV	45
5.	Pelaksana	12 PNS 7 TNI
6.	PPNPN	21
Total		104

Tabel Promosi SDM Nonteknis Ditjen Badilmiltun Tahun 2021

No.	Jabatan	Jumlah
1.	Eselon III	1
2.	Pelaksana	6
Total		15

Tabel Mutasi SDM Nonteknis SDM Ditjen Badilmiltun Tahun 2021

No.	Jabatan	Jumlah
1.	Eselon II	1
2.	Eselon III	1
3.	Eselon IV	5
4.	Pelaksana	32
Total		39

Tabel Kenaikan Pangkat SDM Nonteknis Ditjen Badilmiltun Tahun 2021

No.	Kepangkatan	Jumlah
1.	Kenaikan Pangkat Otomatis	2
2.	Kenaikan Pangkat Pilihan	12
Total		14

**Tabel Pensiun SDM Pegawai Nonteknis Ditjen Badilmiltun Tahun 2021**

No.	Jabatan	Jumlah
1.	Eselon III	1
2.	Eselon IV	6
Total		7

**Tabel Kenaikan Pangkat Hakim dan Kepaniteraan Peradilan Militer Tahun 2021**

No.	Kegiatan	Jumlah
1.	Kenaikan Pangkat Hakim	17
2.	Kenaikan Pangkat Panitera	8
Total		25

**Tabel Promosi dan Mutasi Hakim Peradilan Militer Tahun 2021**

No.	Jabatan	Jumlah
1.	Kadilmiltama	1
2.	Wakadilmiltama	1
3.	Hakim Militer Utama	4
4.	Kadilmilti	3
5.	Waka Dilmilti	6
6.	Panmudmil MA RI	1
7.	Hakim Tinggi	18
8.	Kadilmil	17
9.	Wakadilmil	13
10.	Hakim Militer	33
11.	Hakim Yustisial	1
Total		98

**Tabel Pensiun Hakim dan Kepaniteraan Peradilan Militer Tahun 2021**

No.	Jabatan	Jumlah
1.	Hakim Militer Utama	1
2.	Hakim Militer Tinggi	7
3.	Hakim Militer	3
4.	Panmud Dilmilti	1
5.	Panitera Pengganti Dilmil	2
Total		14

**Tabel Promosi dan Mutasi Hakim Peradilan Tata Usaha Negara Tahun 2021**

No.	Kegiatan	Pelaksanaan	Keterangan	Jumlah
1.	Rapat Pimpinan	18 Januari 2021	Hakim Tk. Pertama	2
2.	Rapat TPM ke-1	22 Juni 2021	Hakim Tk. Pertama Hakim Tk. Banding	76 8
3.	Rapat TPM ke-2	8 September 2021	Hakim Tk. Pertama Hakim Tk. Banding	1 5
4.	Rapat TPM ke-3	26 Oktober 2021	Hakim Tk. Pertama	46
Total				138

**Tabel Promosi dan Mutasi Kepaniteraan Peradilan Militer Tahun 2021**

No.	Jabatan	Jumlah
1.	Panitera Pengganti Dilmiltama	1
2.	Panmud Pidana Dilmilti	2
3.	Panitera Hukum Dilmilti	2
4.	Panmud TUM Dilmilti	3
5.	Panitera Pengganti Dilmilti	5
6.	Panitera Dilmil	12
7.	Panmud Pidana Dilmil	10
8.	Panmud Hukum Dilmil	2
9.	Panitera Pengganti Dilmil	11
Total		147

**Tabel Kenaikan Pangkat Hakim dan Kepaniteraan Peradilan Tata Usaha Negara Tahun 2021**

No.	Kepangkatan	Jumlah
1.	Kenaikan Pangkat Otomatis	59
2.	Kenaikan Pangkat Pilihan	15
3.	Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah	14
Total		88

Tabel Promosi dan Mutasi Kepaniteraan Peradilan Tata Usaha Negara Tahun 2021

No.	Jabatan	Jumlah
1.	Panitera Tingkat Pertama	8
2.	Panitera Muda Tingkat Pertama	22
3.	Panitera Pengganti Tingkat Pertama	26
4.	Jurusita Pengganti Tingkat Pertama	8
5.	Panitera Muda Tingkat Banding	3
6.	Panitera Pengganti Tingkat Banding	4
7.	Demosi Jabatan Tingkat Pertama	2
Total		73

\*) Catatan : Demosi/turun jabatan: Wakil Panitera menjadi Panitera Pengganti

Tabel Pensiun Hakim Peradilan Tata Usaha Negara Tahun 2021

No.	Jabatan	Jumlah
1.	Pensiun	8
2.	Meninggal Dunia	5
Total		13

Tabel Kenaikan Pangkat Hakim dan Kepaniteraan Peradilan Tata Usaha Negara Tahun 2021

No.	Kepangkatan	Jumlah
1.	Kenaikan Pangkat Otomatis	47
2.	Kenaikan Pangkat Pilihan	14
Total		61

## BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN HUKUM DAN PERADILAN

Tabel Mutasi Hakim Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI Tahun 2021

No.	Jabatan	Mutasi Masuk	Mutasi Keluar
1.	Hakim Tinggi/Hakim Yustisial	9	3
2.	Pelaksana	12	1
Total		21	4

Tabel Promosi SDM Non Teknis Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI Tahun 2021

No.	Jabatan	Jumlah
1.	Eselon IV	5
2.	Pengembang Teknologi Pembelajaran	3
3.	Analisis Kepegawaian	1
Total		9

## BADAN PENGAWASAN

Tabel Promosi dan Mutasi Hakim pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI Tahun 2021

No.	Promosi dan Mutasi	Jumlah
1.	Hakim Tinggi	18
2.	Hakim Yustisial	13
Total		31

Tabel Promosi dan Mutasi Jabatan Fungsional pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI Tahun 2021

No.	Promosi dan Mutasi	Jumlah
1.	Auditor Muda	3
2.	Analisis Kepegawaian Muda	1
3.	Analisis Kepegawaian Pertama pada Badan Pengawasan MARI	1
4.	Pranata Komputer Terampil	1
Total		6

## PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI

Tabel Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Mahkamah Agung Tahun 2021

No.	Jabatan	Jumlah Pendaftaran	Seleksi Administrasi	Assessment Center	Formasi
1.	Direktur Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Militer	4	3	3	1
2.	Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan	10	9	8	1

No.	Jabatan	Jumlah Pendaftaran	Seleksi Administrasi	Assessment Center	Formal
3.	Kepala Biro Hukum dan Humas	13	11	11	1
4.	Sekretaris Kepaniteraan Mahkamah Agung	8	6	6	1
5.	Sekretaris Pengadilan Militer Utama	4	2	2	1
6.	Sekretaris Pengadilan Tinggi Semarang	13	12	11	1
7.	Sekretaris Pengadilan Tinggi Pekanbaru	9	4	3	1
8.	Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Palembang	19	11	10	1
9.	Sekretaris Pengadilan Militer Tinggi I Medan	8	3	3	1
10.	Sekretaris Pengadilan Negeri Bekasi	6	2	2	1
<b>Total</b>		<b>94</b>	<b>63</b>	<b>59</b>	<b>10</b>

## PENGANGKATAN PEJABAT FUNGSIONAL TERTENTU

Tabel Pengangkatan Pejabat Fungsional di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya Tahun 2021

No.	Jabatan	Jumlah
1.	Pranata Keuangan APBN	123
2.	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN	97
3.	Analisis Kepegawaian	39
4.	Pranata Komputer	12
5.	Pustakawan	3
6.	Analisis Kebijakan	1
7.	Perencana	3
8.	Pranata Peradilan	232
9.	Assessor Sumber Daya Manusia Aparatur	6
10.	Staf Khusus Pimpinan	12
<b>Total</b>		<b>528</b>

Tabel Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Mahkamah Agung Tahun 2021

No.	Jabatan	Jumlah Pelamar	Lulus Seleksi Administrasi
1.	Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum	8	8
2.	Kepala Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan	3	3
3.	Kepala Badan Pengawasan	6	6
4.	Kepala Biro Kesekretariatan Pimpinan	8	6
5.	Sekretaris Pengadilan Tinggi Denpasar	4	3
6.	Sekretaris Pengadilan Tinggi Pontianak	14	12
7.	Sekretaris Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus	5	4
8.	Sekretaris Pengadilan Negeri Tangerang Kelas IA Khusus	8	5
<b>Total</b>		<b>56</b>	<b>47</b>

## FIT AND PROPER TEST

Uji kepatutan dan kelayakan (*fit and proper test*) telah dijadikan sebagai mekanisme standar dalam seleksi calon pejabat struktural dan pimpinan pengadilan. Sepanjang tahun 2021, Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya telah menyelenggarakan *uji kepatutan dan kelayakan* untuk mendapatkan calon pejabat struktural dan pimpinan pengadilan yang memiliki kompetensi manajerial, sosiokultural, dan teknis yang sesuai dengan persyaratan jabatan. Pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum sebanyak 570 orang dan yang lulus sebanyak 332 orang. Pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama sebanyak 365 orang dan yang lulus sebanyak 343 orang. Pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara sebanyak 105 orang dan yang lulus sebanyak 77 orang.

## PELAKSANAAN KEBIJAKAN NASIONAL

### PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SERTIFIKASI HAKIM NIAGA

Mahkamah Agung telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Peningkatan Efisiensi dan Transparansi Penanganan Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Di Pengadilan dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung No.109/KMA/SK/IV/2020 Tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

### PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SERTIFIKASI HAKIM MEDIATOR

Mahkamah Agung melalui Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknis Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan sertifikasi Hakim Mediator kepada sebanyak 548 orang Hakim di tahun 2021. Pendidikan dan Pelatihan ini juga merupakan bagian dari Program Prioritas Nasional di tahun 2021.

### PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SERTIFIKASI HAKIM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK (SPPA) TERPADU

Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi Hakim Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) Terpadu pada tahun 2021 dilaksanakan terhadap 193 orang hakim yang diharapkan dapat menghasilkan sumber daya hakim yang mampu menangani perkara pidana anak secara arif, bijaksana, berempati, bermoral, dan berkeadilan dengan mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.

### PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SERTIFIKASI HAKIM LINGKUNGAN HIDUP

Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan sertifikasi hakim lingkungan hidup pada tahun 2021 terhadap 174 orang hakim dilakukan dengan metode pembelajaran jarak jauh/daring dengan memanfaatkan system e-Learning pada Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI.

### PELATIHAN YANG MENDUKUNG KEMUDAHAN BERUSAHA

Tabel Pelatihan yang Mendukung Kemudahan Berusaha Tahun 2021

No.	Kegiatan	Target (orang)	Realisasi (orang)	Capaian (%)
1.	Pelatihan Sertifikasi Hakim Niaga	50	55	110
2.	Bimbingan Teknis Pedoman Penyelesaian Perkara HKI	44	44	100
Total		44	44	100



## PROGRAM PEMBARUAN

### TATA KELOLA KEUANGAN BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI

Penggunaan sistem berbasis TI pada pengelolaan keuangan negara diimplementasikan melalui aplikasi Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran (Krisna), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKAKL), Sistem Aplikasi Satker (SAS), Gaji Pegawai Pusat (GPP), Sistem *Monitoring* dan Evaluasi Kinerja Terpadu (SMART), *Online Monitoring* Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OMSPAN), Sistem Pengelolaan Rekening Terintegrasi (SPRINT), Sistem Informasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Online (Simponi), Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua (SAIBA), dan e-Rekon&LK.

Selain penggunaan aplikasi yang dikembangkan oleh Kementerian Keuangan, Mahkamah Agung juga mengembangkan aplikasi internal untuk menunjang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara yang dikelolanya, yaitu sebagai berikut.

- 1) Aplikasi SIMARI (Sistem Informasi Mahkamah Agung Republik Indonesia) digunakan untuk pengelolaan dan pelaporan data penerimaan negara bukan pajak (PNBP).
- 2) Aplikasi e-BIMA (*electronic Budgeting Implementation Monitoring and Accountability*) digunakan untuk melakukan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan negara, keuangan perkara, dan uang titipan pihak ketiga sehingga dapat memudahkan para pimpinan satuan kerja untuk melakukan pengawasan dan pemantauan secara akurat dan *real time*.
- 3) Aplikasi Komunikasi Data Nasional (Komdanas) dipergunakan oleh seluruh satker di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya

### MARI JAGA ASET NEGARA

Slogan "MARI (Mahkamah Agung Republik Indonesia) Jaga Aset Negara" menjadi sebuah pesan yang kuat dalam semangat pembaharuan dan perubahan pola pikir tata kelola aset negara bagi aparatur peradilan di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.

## PEMBAHARUAN TEKNOLOGI INFORMASI

Dalam rangka mendukung peradilan modern, saat ini Mahkamah Agung telah menerapkan sistem peradilan berbasis teknologi informasi. Hal ini dilakukan untuk mendorong birokrasi di lembaga peradilan menjadi ringkas, cepat, dan berbiaya ringan. Mahkamah Agung berkomitmen untuk selalu konsisten melakukan perbaikan, pembaruan, dan reformasi sistem peradilan yang ada di Indonesia.

## MANAJEMEN KEUANGAN LAPORAN KEUANGAN MAHKAMAH AGUNG TAHUN 2021 PADA MASA PANDEMI COVID-19

Dalam rangka peningkatan tata kelola keuangan negara yang dengan mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas untuk mempertanggungjawabkan setiap rupiah yang telah dibelanjakan, selama tahun 2021 Biro Keuangan Badan Urusan Mahkamah Agung telah melakukan inovasi antara lain sebagai berikut.

### Peluncuran Aplikasi E-BIMA (*Electronic-Budgeting Implementation, Monitoring & Accountability*)

Pada tanggal 11 Oktober 2021 Y.M. Ketua Mahkamah Agung secara resmi meluncurkan aplikasi E-BIMA yang merupakan suatu sistem yang dibangun sebagai sarana bantu untuk melakukan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan negara, keuangan perkara, dan uang titipan pihak ketiga sehingga dapat memudahkan para pimpinan satuan kerja untuk melakukan pengawasan dan monitoring secara akurat dan *real time*.

Aplikasi ini dimaksudkan untuk membantu mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel serta memiliki tiga fungsi sebagai berikut:

- a) mitigasi pelaporan keuangan untuk mengurangi risiko dalam pelaporan keuangan yang tidak sesuai dengan standar pelaporan;
- b) menjadi dasar bagi pimpinan satuan kerja dalam mengambil keputusan terkait dengan pengelolaan

- dan perubahan pagu anggaran; dan
- c) menjadi dasar bagi pimpinan dalam menerapkan penilaian kinerja pengelolaan anggaran berbasis *reward and punishment*.

### Revisi Pedoman Akuntansi Berbasis AkruaI dan Pelaporan Keuangan di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di bawahnya

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) perlu ditetapkan pedoman dalam bentuk Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung. Adapun tujuan revisi pedoman tersebut, antara lain, adalah:

- a) sebagai pedoman para penyusun laporan keuangan di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya untuk melaksanakan sistem dan prosedur lingkup pemerintah pusat yang berbasis akrual;
- b) untuk keseragaman dalam penerapan perlakuan akuntansi berbasis akrual dan penyajian laporan keuangan di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya; dan
- c) untuk mewujudkan Laporan Keuangan Mahkamah Agung sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI dan menyajikan informasi yang berguna bagi pengambilan keputusan serta untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepada Mahkamah Agung.

### LAPORAN KEUANGAN MAHKAMAH AGUNG BERBASIS AKRUAL BERDASARKAN PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK)

Pemerintah telah menetapkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) Pemerintah Pusat yang selanjutnya direvisi menjadi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Penerapan,



Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) Pemerintah Pusat. Seluruh entitas akuntansi dan entitas pelaporan pada Mahkamah Agung wajib melaksanakan PMK tersebut.

Sesuai dengan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 861/SEK/SK/VIII/2021 tentang Tim Penilai Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Mahkamah Agung RI, penilaian PIPK sudah dilakukan oleh tim penilai yang bertugas membantu manajemen dalam melaksanakan penilaian PIPK yang bertujuan untuk memberikan keyakinan bahwa pelaporan keuangan dilaksanakan dengan pengendalian intern yang memadai.

Selain itu, sesuai dengan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 932/SEK/SK/IX/2021 tentang Penetapan Akun Signifikan Penilaian Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Mahkamah Agung Tahun 2021, ditetapkan dua akun signifikan, yaitu akun Konstruksi dalam Pengerjaan (136211) dan akun Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan (425131) yang diterapkan dalam PIPK di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya pada Tahun Anggaran 2021 oleh Tim PIPK Mahkamah Agung.

Berdasarkan surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 2483/SEK/KU.03/11/2021 tanggal 11 November 2021 hal Perubahan Sampling PIPK, pada tahun 2021 dilakukan penilaian PIPK atas akun Konstruksi dalam Pengerjaan (136211) sebanyak 33 satuan kerja di seluruh Indonesia yang dilakukan secara daring dengan menggunakan aplikasi E-BIMA serta untuk akun Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan (425131) sebanyak 15 satuan kerja wilayah Jawa Barat dilakukan penilaian oleh Tim Penilai PIPK dengan cara tatap muka langsung.

## PENGANGGARAN BERBASIS KINERJA

### Penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja

Anggaran berbasis kinerja (*performance based budgeting*) merupakan sistem penganggaran yang berorientasi pada keluaran (*output*) organisasi dan berkaitan erat dengan visi, misi, dan rencana strategis organisasi. Anggaran yang tidak efektif dan tidak berorientasi pada kinerja akan menggagalkan perencanaan yang telah disusun. Pengukuran kinerja secara berkelanjutan akan memberikan umpan balik sehingga upaya perbaikan secara terus-menerus akan mencapai keberhasilan pada masa yang akan datang.

### Prinsip dan Tujuan Penganggaran Berbasis Kinerja

Unsur-unsur penting yang harus diperhatikan dalam penganggaran berbasis kinerja adalah sebagai berikut.

- 1) Alokasi anggaran berorientasi pada kinerja (*output and outcome oriented*)
- 2) Fleksibilitas
- 3) *Money Follow Program*

Dalam PMK Nomor 112 Tahun 2020 diatur besaran satuan biaya penyelesaian perkara per perkara dengan perincian sebagai berikut.

### Standar Biaya Keluaran (SBK) Penyelesaian Perkara di Mahkamah Agung

1	Perkara Pidana Umum	Rp13.514,00 untuk volume 1.800 perkara
2	Perkara Pidana Khusus	Rp12.319.345.000,00 untuk volume 7.072 perkara
3	Perkara Pidana Militer	Rp378.520.000,00 untuk volume 350 perkara
4	Perkara PHI < 150 jt	Rp816.686.000,00 untuk volume 600 perkara

## PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2021

### Pagu Alokasi Anggaran

#### Pagu Per Unit Eselon I

No.	Nama Program	Pagu Awal 2021	Tahap I	Tahap II	Pagu Menjadi
1.	Kepaniteraan	190.819.514.000,00		3.337.152.000,00	187.482.362.000,00
2.	Badan Peradilan Umum	138.579.535.000,00		4.313.373.000,00	134.266.162.000,00
3.	Badan Peradilan Agama	90.307.567.000,00		2.100.798.000,00	88.206.769.000,00
4.	Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara	29.213.195.000,00		1.427.000.000,00	27.786.195.000,00
5.	Badan Urusan Administrasi	10.577.820.992.000,00	326.937.533.000,00	151.517.401.000,00	10.099.366.058.000,00
6.	Badan Pengawasan	40.121.263.000,00		15.375.687.000,00	24.745.576.000,00
7.	Badan Litbang Diklat Kumdil	172.085.320.000,00		19.052.794.000,00	153.032.526.000,00
<b>Total</b>		<b>11.238.947.386.000,00</b>	<b>326.937.533.000,00</b>	<b>197.124.205.000,00</b>	<b>10.714.885.648.000,00</b>

Tabel Perkembangan Anggaran Mahkamah Agung dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021

No.	Tahun Anggaran	Belanja Pegawai (Rp)	Belanja Barang (Rp)	Belanja Modal (Rp)	Total Anggaran (Rp)
1.	2017	6.299.873.673.000,00	1.282.853.174.000,00	598.608.448.000,00	8.181.335.295.000,00
2.	2018	6.502.571.088.000,00	1.391.065.704.000,00	584.505.090.000,00	8.478.141.882.000,00
3.	2019	6.626.485.409.000,00	1.731.265.814.000,00	687.999.037.000,00	9.045.750.260.000,00
4.	2020	7.079.514.631.000,00	2.125.156.095.000,00	650.235.304.000,00	9.854.906.030.000,00
5.	2021	7.248.801.219.000,00	2.308.362.816.000,00	1.681.783.351.000,00	11.238.947.386.000,00

### Hibah

Untuk pengelolaan hibah, Mahkamah Agung per tanggal 31 Desember 2021 telah menerima hibah langsung dari dalam negeri sebesar Rp45.538.013.452,00 (Empat puluh lima miliar lima ratus tiga puluh delapan juta tiga belas ribu empat ratus lima puluh dua rupiah) yang terdiri atas:

- hibah langsung berupa barang sebesar Rp39.988.013.452,00 (Tiga puluh sembilan miliar sembilan ratus delapan puluh delapan juta tiga belas ribu empat ratus lima puluh dua rupiah) yang Rp31.874.068.873,00 (Tiga puluh satu miliar delapan ratus tujuh puluh empat juta enam puluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh tiga rupiah) di antaranya merupakan hibah TAYL (tahun anggaran yang lalu); dan
- hibah langsung berupa uang dari Pemerintah Daerah Cibinong kepada Pengadilan Negeri Cibinong sebesar Rp5.500.000.000,00 (Lima miliar lima ratus juta rupiah); dan Pemerintah Kabupaten Bangkalan kepada Pengadilan Negeri Bangkalan sebesar Rp50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah).

## REALISASI ANGGARAN

LAPORAN REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN TAHUN 2021 PER PROGRAM PER TANGGAL 31 DESEMBER 2021						
NO	PROGRAM	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	%	SISA ANGGARAN (Rp)	%
1	Badan Urusan Administrasi	10.093.877.817.000,00	9.883.311.774.723,00	97,91%	210.566.042.277,00	2,09%
	Program Dukungan Manajemen	10.093.877.817.000,00	9.883.311.774.723,00	97,91%	210.566.042.277,00	2,09%
2	Kepaniteraan	198.502.362.000,00	198.224.938.680,00	99,86%	277.423.320,00	0,14%
	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	11.026.581.000,00	11.002.569.633,00	99,78%	24.011.367,00	0,22%
	Program Dukungan Manajemen	187.475.781.000,00	187.222.369.047,00	99,86%	253.411.953,00	0,14%
3	Ditjen Badan Peradilan Umum	135.789.782.000,00	131.644.367.910,00	96,95%	4.145.414.090,00	3,05%
	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	88.321.486.000,00	84.358.511.879,00	95,51%	3.962.974.121,00	4,49%
	Program Dukungan Manajemen	47.468.296.000,00	47.285.856.031,00	99,62%	182.439.969,00	0,38%
4	Ditjen Badan Peradilan Agama	90.917.866.000,00	89.809.097.301,00	98,78%	1.108.768.699,00	1,22%
	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	54.048.597.000,00	53.201.316.085,00	98,43%	847.280.915,00	1,57%
	Program Dukungan Manajemen	36.869.269.000,00	36.607.781.216,00	99,29%	261.487.784,00	0,71%
5	Ditjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara	27.456.195.000,00	26.088.477.281,00	95,02%	1.367.717.719,00	4,98%
	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	9.884.611.000,00	8.964.288.144,00	90,69%	920.322.856,00	9,31%
	Program Dukungan Manajemen	17.571.584.000,00	17.124.189.137,00	97,45%	447.394.863,00	2,55%
6	Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan	156.563.027.000,00	156.388.657.339,00	99,89%	174.369.661,00	0,11%
	Program Dukungan Manajemen	156.563.027.000,00	156.388.657.339,00	99,89%	174.369.661,00	0,11%
7	Badan Pengawasan	24.745.576.000,00	23.802.403.029,00	96,19%	943.172.971,00	3,81%
	Program Dukungan Manajemen	24.745.576.000,00	23.802.403.029,00	96,19%	943.172.971,00	3,81%
	Jumlah	10.727.852.625.000,00	10.509.269.716.263,00	97,96%	218.582.908.737,00	2,04%

Sumber data <http://spanint.kemenkeu.go.id/>

LAPORAN REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN TAHUN 2021 MENURUT UNIT ESELON I PER TANGGAL 31 DESEMBER 2021						
NO	UNIT ESELON I	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	%	SISA ANGGARAN (Rp)	%
1	Badan Urusan Administrasi	10.093.877.817.000,00	9.883.311.774.723,00	97,91%	210.566.042.277,00	2,09%
	- Eselon I Pusat	2.837.768.339.000,00	2.800.003.198.205,00	98,67%	37.765.140.795,00	1,33%
	- Daerah	7.256.109.478.000,00	7.083.308.576.518,00	97,62%	172.800.901.482,00	2,38%
2	Kepaniteraan	198.502.362.000,00	198.224.938.680,00	99,86%	277.423.320,00	0,14%
3	Ditjen Badan Peradilan Umum	135.789.782.000,00	131.644.367.910,00	96,95%	4.145.414.090,00	3,05%
	- Eselon I Pusat	55.171.874.000,00	54.840.623.982,00	99,40%	331.250.018,00	0,60%
	- Daerah	80.617.908.000,00	76.803.743.928,00	95,27%	3.814.164.072,00	4,73%
4	Ditjen Badan Peradilan Agama	90.917.866.000,00	89.809.097.301,00	98,78%	1.108.768.699,00	1,22%
	- Eselon I Pusat	42.042.248.000,00	41.785.282.500,00	99,39%	256.965.500,00	0,61%
	- Daerah	48.875.618.000,00	48.023.814.801,00	98,26%	851.803.199,00	1,74%
5	Ditjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara	27.456.195.000,00	26.088.477.281,00	95,02%	1.367.717.719,00	4,98%
	- Eselon I Pusat	20.626.834.000,00	20.472.109.495,00	99,25%	154.724.505,00	0,75%
	- Daerah	6.829.361.000,00	5.616.367.786,00	82,24%	1.212.993.214,00	17,76%
6	Badan Litbang Diklat Kumdil	156.563.027.000,00	156.388.657.339,00	99,89%	174.369.661,00	0,11%
7	Badan Pengawasan	24.745.576.000,00	23.802.403.029,00	96,19%	943.172.971,00	3,81%
	Jumlah	10.727.852.625.000,00	10.509.269.716.263,00	97,96%	218.582.908.737,00	2,04%

Sumber data <http://spanint.kemenkeu.go.id/>

LAPORAN REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN TAHUN 2021 PER JENIS BELANJA PER TANGGAL 31 DESEMBER 2021						
NO	BELANJA	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	%	SISA ANGGARAN (Rp)	%
1	Belanja Pegawai	6.920.337.809.000,00	6.780.139.256.969,00	97,97%	140.198.552.031,00	2,03%
2	Belanja Barang	2.206.535.688.000,00	2.136.596.491.604,00	96,83%	69.939.196.396,00	3,17%
3	Belanja Modal	1.600.979.128.000,00	1.592.533.967.690,00	99,47%	8.445.160.310,00	0,53%
	Jumlah	10.727.852.625.000,00	10.509.269.716.263,00	97,96%	218.582.908.737,00	2,04%

Sumber data <http://spanint.kemenkeu.go.id/>

LAPORAN REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN TAHUN 2021 PER ESELON I PER TANGGAL 31 DESEMBER 2021						
NO	UNIT ESELON I	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	%	SISA ANGGARAN (Rp)	%
1	Badan Urusan Administrasi	2.837.768.339.000,00	2.800.003.198.205,00	98,67%	37.765.140.795,00	1,33%
2	Kepaniteraan	198.502.362.000,00	198.224.938.680,00	99,86%	277.423.320,00	0,14%
3	Ditjen Badan Peradilan Umum	55.171.874.000,00	54.840.623.982,00	99,40%	331.250.018,00	0,60%
4	Ditjen Badan Peradilan Agama	42.042.248.000,00	41.785.282.500,00	99,39%	256.965.500,00	0,61%
5	Ditjen Badan Peradilan Militer Dan TUN	20.626.834.000,00	20.472.109.495,00	99,25%	154.724.505,00	0,75%
6	Badan Litbang Diklat Kumdil	156.563.027.000,00	156.388.657.339,00	99,89%	174.369.661,00	0,11%
7	Badan Pengawasan	24.745.576.000,00	23.802.403.029,00	96,19%	943.172.971,00	3,81%
	Jumlah	3.335.420.260.000,00	3.295.517.213.230,00	98,80%	39.903.046.770,00	1,20%

Sumber data <http://spanint.kemenkeu.go.id/>

REALISASI ANGGARAN COVID-19 PER AKUN TAHUN 2021 PER TANGGAL 31 DESEMBER 2021							
NO	AKUN	URAIAN	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	%	SISA ANGGARAN (Rp)	%
1	521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	8.666.356.000,00	8.459.957.873,00	97,62%	206.398.127,00	2,38%
2	521241	Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	5.766.518.000,00	5.176.691.055,00	89,77%	589.826.945,00	10,23%
3	521841	Belanja Barang Persediaan - Penanganan Pandemi COVID-19	10.153.683.000,00	10.099.465.389,00	99,47%	54.217.611,00	0,53%
4	522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	20.089.486.000,00	19.123.644.124,00	95,19%	965.841.876,00	4,81%
5	523114	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan - Penanganan Pandemi COVID-19	40.140.000,00	36.117.272,00	89,98%	4.022.728,00	10,02%
6	524115	Belanja Perjalanan Dinas - Penanganan Pandemi COVID-19	34.125.000,00	18.191.996,00	53,31%	15.933.004,00	46,69%
	Jumlah		44.750.308.000,00	42.914.067.709,00	95,90%	1.836.240.291,00	4,10%

Sumber data <http://spanint.kemenkeu.go.id/>

## PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) MAHKAMAH AGUNG TAHUN ANGGARAN 2021

REALISASI PENDAPATAN MAHKAMAH AGUNG 2021 PER AKUN PER 31 DESEMBER 2021			
No.	Kode Akun	Jenis Pendapatan	Realisasi
1.	425121	Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan	306.224.500,00
2.	425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	1.707.342.248,00
3.	425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	1.811.006.124,00
4.	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	10.309.654.974,00
5.	425231	Pendapatan Pengesahan Surat di Bawah Tangan	182.800.000,00
6.	425232	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan	2.827.582.501,00
7.	425233	Pendapatan Ongkos Perkara	24.387.725.028,00
8.	425239	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	48.854.015.140,00
9.	425699	Pendapatan Jasa Lainnya	1.416,00
10.	425764	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	97.922.265,00
11.	425773	Pendapatan dari Pelaksanaan Treasury National Pooling	264.036,00
12.	425791	Pendapatan Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	36.522.974,00
13.	425793	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pihak Lain/Pihak Ketiga	66.300.000,00
14.	425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	1.740.462.541,00
15.	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	1.226.175.432,00
16.	425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	2.059.481.039,00
17.	425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	543.119.259,00
18.	425931	Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan PNS	277.369.054,00
19.	425991	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	46.867.886,00
20.	425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	1.190.254,00
Jumlah			96.482.026.671,00

## PENGUNAAN DANA PNBP

NO.	PERADILAN	PAGU	REALISASI	PERSENTASE
1.	Peradilan Umum	1.523.620.000,00	1.225.373.464,00	80,40%
2.	Peradilan Agama	2.711.097.000,00	2.446.945.989,00	90,26%
3.	Peradilan Militer Tata Usaha Negara	120.000.000,00	56.352.022,00	46,96%
Total		4.354.717.000,00	3.728.671.475,00	85,62%

## PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA PADA MAHKAMAH AGUNG TAHUN 2021 (TGR)

No.	Status Penyelesaian	Jumlah Kerugian		Pembayaran							
				Angsuran		Selesai (Lunas)		Pembebasan		Sisa	
		Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)
<b>A. SUDAH PENETAPAN</b>											
1.	TGR BENDAHARA	4	1.114.246.950,00	-	-	3	303.824.891	1	810.422.059	-	-
2.	TGR NON BENDAHARA	248	3.100.214.047,00	2	49.500.000,00	243	2.793.714.047,00	1	241.500.000,00	2	15.500.000,00
3.	PIHAK KETIGA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>JUMLAH A</b>		<b>252</b>	<b>4.214.460.997,00</b>	<b>2</b>	<b>49.500.000,00</b>	<b>246</b>	<b>3.097.538.938,00</b>	<b>2</b>	<b>1.051.922.059,00</b>	<b>2</b>	<b>15.500.000,00</b>
<b>B. PROSES PENETAPAN</b>											
1.	TGR BENDAHARA	1	22.772.000,00	-	-	-	-	1	22.772.000,00	-	-
2.	TGR NON BENDAHARA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	PIHAK KETIGA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>JUMLAH B</b>		<b>1</b>	<b>22.772.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>22.772.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>JUMLAH A + B</b>		<b>253</b>	<b>4.237.232.997,00</b>	<b>2</b>	<b>49.500.000,00</b>	<b>246</b>	<b>3.097.538.938,00</b>	<b>3</b>	<b>1.074.694.059,00</b>	<b>2</b>	<b>15.500.000,00</b>
<b>C. INFORMASI</b>											
1.	BPK	459	26.094.131.702,00	-	-	436	23.609.746.840,00	23	2.484.384.862,00	-	-
2.	APIP	16	541.749.962,00	1	21.975.421,00	14	460.316.315,00	1	23.206.000,00	1	36.252.2256,00
<b>JUMLAH C</b>		<b>475</b>	<b>26.635.881.664,00</b>	<b>1</b>	<b>21.975.421,00</b>	<b>450</b>	<b>24.070.063.155,00</b>	<b>24</b>	<b>2.507.590.862,00</b>	<b>1</b>	<b>36.252.2256,00</b>
<b>JUMLAH A + B + C</b>		<b>728</b>	<b>30.873.114.661,00</b>	<b>3</b>	<b>71.475.421,00</b>	<b>696</b>	<b>27.167.602.093,00</b>	<b>27</b>	<b>3.582.284.921,00</b>	<b>3</b>	<b>51.752.226,00</b>

## MANAJEMEN ASET

### CAPAIN KINERJA PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA

Dari total 1.827 Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB) yang tersebar di seluruh Indonesia, nilai BMN Mahkamah Agung pada Laporan BMN Tingkat K/L Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya dalam Laporan Keuangan Kementerian Lembaga (LKKL) Tahunan Tahun Anggaran 2021 (Data E-Rekon hasil rekon internal Mahkamah Agung Periode Laporan per 31 Desember 2021) adalah sebesar Rp29.740.067.468.500,00 Nilai BMN ini mengalami mutasi tambah/kurang sebesar Rp953.492.394.821,00 jika dibandingkan dengan nilai BMN pada tahun 2020 *audited* sebesar Rp28.786.575.073.679,00.

Tabel Perbandingan Nilai BMN DI Neraca TA 2021 per 31 Desember 2021 dan TA 2020 Audited

No.	Akun Neraca	Nilai BMN per Periode Laporan		Mutasi + / (-)	
		31 Desember 2021	2020 Audited	(5) = (4)-(3)	%
(1)	(2)	(4)	(3)	(5) = (4)-(3)	%
A.	Aset Lancar	25.792.582.817,00	25.956.660.542,00	-164.077.725,00	-0,64%
1.	Persediaan	25.792.582.817,00	25.956.660.542,00	-164.077.725,00	0,64%
B.	Aset Tetap	33.930.924.635.530,00	32.762.941.243.206,00	1.167.983.392.324,00	3,44%
1.	Tanah	19.866.219.405.327,00	19.866.238.947.020,00	-19.541.693,00	-0,01%
2.	Peralatan dan Mesin	3.668.535.829.847,00	3.422.382.641.931,00	246.153.187.916,00	6,71%
3.	Gedung dan Bangunan	8.940.973.278.137,00	8.743.802.063.295,00	197.171.214.842,00	2,21%
4.	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	258.274.065.752,00	257.545.948.592,00	728.117.160,00	0,28%
5.	Aset Tetap Renovasi	22.227.728.204,00	22.227.728.204,00	0,00	0,00%
6.	Aset Tetap Lainnya	50.315.072.542,00	50.176.245.793,00	138.826.749,00	0,28%
7.	Konstruksi Dalam Pengerjaan	1.124.379.255.721,00	400.567.668.371,00	723.811.587.350,00	64,37%
C.	Aset Lainnya	221.631.634.647,00	177.430.916.507,00	44.200.718.140,00	19,94%
1	Aset Tak Berwujud	58.358.867.497,00	47.696.472.847,00	10.662.394.650,00	18,27%
2	Aset Henti Guna	163.272.767.150,00	129.734.443.660,00	33.538.323.490,00	20,54%
D.	Total Intrakomptabel	34.178.348.852.994,00	32.966.328.820.255,00	1.212.020.032.739,00	3,55%
E.	Penyusutan Intrakomptabel	4.444.279.285.719,00	4.184.174.500.188,00	260.104.785.531,00	5,85%
F.	Nilai Aset Netto Intrakomptabel (D-E)	29.734.069.567.275,00	28.782.154.320.067,00	951.915.247.208,00	3,20%
G.	Aset Ekstrakomptabel	21.596.331.669,00	19.670.922.966,00	1.925.408.703,00	8,92%
H.	Penyusutan Aset Ekstrakomptabel	15.598.430.444,00	15.250.169.354,00	348.261.090,00	2,23%
I.	Nilai Aset Netto Ekstrakomptabel (G-H)	5.997.901.225,00	4.420.753.612,00	1.577.147.613,00	26,29%
J.	Total Aset Intrakomptabel & Ekstrakomptabel Sebelum Penyusutan(D+G)	34.199.945.184.663,00	32.985.999.743.221,00	1.213.945.441.442,00	3,55%
K.	Total Aset Intrakomptabel & Ekstrakomptabel Setelah Penyusutan(F+I)	29.740.067.468.500,00	28.786.575.073.679,00	953.492.394.821,00	3,21%

## Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara

Usulan	TA 2023				
	Jumlah	Setuju	%	Tidak	%
Pengadaan	1.569	192	12,23	1.377	87,76
Pemeliharaan	15.327	11.450	74,70	3.877	25,30
Total	16.896	11.642	68,90	5.254	31,10



### Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara

No.	Kewenangan	Jenis Aset BMN	Penetapan Status Penggunaan			
			TA 2021		TA 2020	
			Jumlah SK PSP	Nilai SK PSP	Jumlah SK PSP	Nilai SK PSP
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(4)	(5)
1.	Pengelola Barang	BMN yang memiliki bukti kepemilikan berupa tanah, bangunan, kendaraan dinas, dan BMN selain tanah, bangunan, kendaraan dinas yang tidak memiliki bukti kepemilikan dengan nilai > Rp100.000.000,00 per unit/satuan/item	191	286.644.860.260,00	399	1.640.770.872.014,00
2.	Pengguna Barang	BMN selain tanah, bangunan, dan kendaraan dinas yang tidak memiliki bukti kepemilikan dengan nilai sampai dengan Rp100.000.000,00 per unit/satuan/item	350	151.260.429.641,00	241	137.600.691.895,00

### Pemanfaatan dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara

Pada tahun 2021 pemanfaatan BMN yang dikelola oleh Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya mencatatkan beberapa hal sebagai berikut.

1. Terdapat 3 satker yang melakukan alih fungsi peruntukan bangunan gedung negara. Pengalihan fungsi tersebut meliputi pengalihan fungsi dari kantor lama menjadi mes dan rumah negara menjadi gedung kantor permanen.
2. Terdapat 151 satker yang mendapatkan penetapan sewa dari Pengguna Barang untuk melaksanakan sewa BMN kepada pihak lain dalam jangka waktu tertentu dengan total nilai sebesar Rp1.704.295.121,00 (satu miliar tujuh ratus empat juta dua ratus sembilan puluh lima ribu seratus dua puluh satu rupiah) dan memperoleh pemasukan yang dibayarkan kepada kas negara.

Di sisi lain, yaitu pemindahtanganan BMN, terdapat beberapa hal yang patut dicatat, antara lain, sebagai berikut.

1. Sebanyak 115 Persetujuan Penjualan dan 30 Persetujuan Bongkaran melalui mekanisme penjualan dengan total nilai limit/nilai penjualan melalui lelang sebesar Rp640.284.156,00 (enam ratus empat puluh juta dua ratus delapan puluh empat ribu seratus lima puluh enam rupiah). Sebagai perbandingan, nilai perolehan/harga perolehan BMN tersebut sebesar Rp142.079.233.554,00 (seratus empat puluh dua miliar tujuh puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus lima puluh empat rupiah).
2. Sebanyak 3 persetujuan pemusnahan BMN yaitu pada PN Rembang, PN Pati, dan PA Majalengka atas pemusnahan aset takberwujud dengan nilai perolehan BMN tersebut sebesar Rp36.800.000,00 (tiga puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah).
3. Sebanyak 4 satker dengan 4 naskah Perjanjian Hibah, yaitu pada PA Barru, PA Sukadana, PA Pangkalan Balai, dan PN Mataram yang melakukan hibah keluar barang milik negara ke pemerintah daerah dengan total nilai Rp3.374.079.467,00 (tiga miliar tiga ratus tujuh puluh empat juta tujuh puluh sembilan ribu empat ratus enam puluh tujuh rupiah).
4. Hibah masuk tahun berjalan sampai dengan Desember 2021 senilai Rp41.322.805.096,00 (empat puluh satu miliar tiga ratus dua puluh dua juta delapan ratus lima ribu sembilan puluh enam rupiah) di 143 pengadilan dengan 143 Naskah Perjanjian Hibah/BAST yang sudah disahkan.

## Percepatan Sertifikasi Tanah Pemerintah

Tabel Sertifikasi BMN Berupa Tanah Tahun Anggaran 2021 berdasarkan Lingkungan Peradilan

NO.	PERADILAN	SUDAH SERTIFIKAT ATAS NAMA PEMERINTAH RI	BELUM SERTIFIKAT AN. PEMERINTAH RI	TOTAL SUDAH DAN BELUM BERSERTIFIKAT
1.	Eselon I, Kantor Pusat	43 bidang, luas 164.220 m <sup>2</sup>	4 bidang, luas 15.617 m <sup>2</sup>	47 bidang, luas 179.837 m <sup>2</sup>
2.	Umum	2.278 bidang, luas 4.192.455 m <sup>2</sup>	166 bidang, luas 344.581 m <sup>2</sup>	2.444 bidang, luas 4.537.036 m <sup>2</sup>
3.	Agama	966 bidang, luas 2.160.939 m <sup>2</sup>	78 bidang, luas 239.867m <sup>2</sup>	1.047 bidang, luas 2.400.806 m <sup>2</sup>
4.	Militer	29 bidang, luas 63.256 m <sup>2</sup>	2 bidang, luas 6.412 m <sup>2</sup>	31 bidang, luas 69.668 m <sup>2</sup>
5.	Tata Usaha Negara	87 bidang, luas 194.237 m <sup>2</sup>	9 bidang, luas 19.823 m <sup>2</sup>	96 bidang, luas 214.060 m <sup>2</sup>
Total Keseluruhan		3.406 bidang, luas 6.775.107 m <sup>2</sup> (92,93%)	259 bidang, luas 626.300 m <sup>2</sup> (7,07%)	3.665 bidang, luas 7.401.407 m <sup>2</sup>

Sumber Data: E-SADEWA per 31 Desember 2021

## Kelanjutan Pembangunan Bertahap 85 Gedung Pengadilan Baru

Pembangunan secara bertahap 85 gedung pengadilan baru yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 13 sampai dengan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan Pengadilan Baru telah dimulai sejak tahun 2020. Pada tahun 2020 sebanyak 25 pengadilan baru telah dimulai pembangunannya dan dilanjutkan pada tahun 2021. Berikut adalah data progres pembangunan gedung pengadilan tahun 2020 s.d. 2021.

No.	Nama Pengadilan	Tahun 2020--2021	
		Belum Selesai	Selesai
Wilayah Barat			
1.	PN Suka Makmue		100% (Tahun 2021)
2.	Msy Suka Makmue		100% (Tahun 2021)
3.	PN Sei Rampah		100% (Tahun 2021)
4.	PA Sei Rampah		100% (Tahun 2021)
5.	PN Pulau Punjung		100% (Tahun 2021)
6.	PA Pulau Punjung		100% (Tahun 2021)
7.	PN Teluk Kuantan		100% (Tahun 2021)
8.	PN Pangkalan Balai		100% (Tahun 2021)
9.	PN Koba		100% (Tahun 2021)
10.	PN Mukomuko		100% (Tahun 2021)
11.	PA Kepahiang		100% (Tahun 2021)
12.	PN Gedong Tataan		100% (Tahun 2021)
13.	PA Mesuji		100% (Tahun 2021)
14.	PN Cikarang		100% (Tahun 2021)

No.	Nama Pengadilan	Tahun 2020--2021	
		Belum Selesai	Selesai
Wilayah Timur			
1.	Pengadilan Negeri Nanga Bulik	80% (Tahun 2021)	
2.	Pengadilan Negeri Kuala Kurun		100% (Tahun 2021)
3.	Pengadilan Negeri Pulang Pisau		100% (Tahun 2021)
4.	Pengadilan Negeri Penajam		100% (Tahun 2021)
5.	Pengadilan Negeri Melonguane		100% (Tahun 2021)
6.	Pengadilan Negeri Belopa		100% (Tahun 2021)
7.	Pengadila Negeri Lasusua		100% (Tahun 2021)
8.	Pengadilan Agama Lolak		100% (Tahun 2021)
9.	Pengadilan Agama Ampana		100% (Tahun 2021)
10.	Pengadilan Agama Malili		100% (Tahun 2021)
11.	Pengadilan Agama Lasusua		100% (Tahun 2021)

Selanjutnya, pada tahun 2021 sebanyak 12 pengadilan baru memulai pembangunan dengan skema tahun jamak (*multi years*) dan direncanakan selesai pada tahun 2022. Total biaya untuk pembangunan gedung kantor pengadilan baru pada tahun 2021 dengan jumlah 12 satker adalah sebesar Rp332.908.100.000,00 (tiga ratus tiga puluh dua miliar sembilan ratus delapan juta seratus ribu rupiah). Data pembangunan gedung kantor pengadilan baru yang dimulai pada tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut.

No.	Nama Pengadilan	Tahun 2021--2022	
		Progress	Penyelesaian
Wilayah Barat			
1.	PN Blangpidie	80% (Termin I)	Tahun 2022
2.	PN Mentok	80% (Termin I)	Tahun 2022
3.	PA Pringsewu	80% (Termin I)	Tahun 2022
4.	PA Sukadana	80% (Termin I)	Tahun 2022
5.	PA Prabumulih	80% (Termin I)	Tahun 2022
6.	PTUN Pangkal Pinang	80% (Termin I)	Tahun 2022
Wilayah Timur			
7.	PN Namlea	80% (Termin I)	Tahun 2022
8.	PN Wangi-Wangi	80% (Termin I)	Tahun 2022
9.	PA Penajam	80% (Termin I)	Tahun 2022
10.	PA Namlea	80% (Termin I)	Tahun 2022
11.	PA Belopa	80% (Termin I)	Tahun 2022
12.	PA Suwawa	80% (Termin I)	Tahun 2022

### Penyusunan Standardisasi Sarana dan Prasarana Pengadilan

Dalam menyikapi kebutuhan layanan peradilan yang dinamis dan berbeda pada setiap lingkungan peradilan (umum, agama, militer, dan Tata Usaha Negara), Mahkamah Agung terus berupaya merumuskan suatu standar pedoman sarana dan prasarana layanan peradilan dan ruang kerja pada gedung kantor pengadilan.

### Pembangunan Rumah Susun Mahkamah Agung

Mahkamah Agung telah menjalin kerja sama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1/PRT/M/2018 tentang Bantuan Pembangunan dan Pengelolaan Rumah Susun untuk Membangun Rusun bagi Hakim dan Pejabat Pengadilan di Wilayah DKI Jakarta yang berlokasi di Jalan Jenderal A. Yani No. 1, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Pulogadung, Kota Administrasi Jakarta Timur. Lokasi pembangunan rusun ini merupakan optimalisasi terhadap aset bangunan gedung kantor eks Pengadilan Negeri Jakarta Timur dengan luas tanah sebesar 2490 m<sup>2</sup>. Pembangunan rusun yang berjumlah 8 lantai dan terdiri atas 69 unit itu dilaksanakan sejak tanggal 27 Agustus tahun 2021 dan diharapkan selesai pada bulan Juni tahun 2022. Progres pembangunan rusun sudah mencapai 35% per 31 Desember 2021.



Gambar Pembangunan Rusun MA

### Pengasuransian Barang Milik Negara (BMN)

Mahkamah Agung telah melakukan pengasuransian BMN tahun 2021 sebanyak 1 aset, yaitu Bangunan Tower MA, nilai BMN sebesar Rp163.932.385.681,00 dengan nilai premi sebesar Rp26.789.284,00 selama 1 bulan (Desember 2021). Hal itu dilakukan sebagai upaya pengamanan aset sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.06/2019 tentang Pengasuransian Barang Milik Negara.

### Peresmian Transformasi Aplikasi Siperhari menjadi e-Sadewa

Aplikasi Siperhari bertransformasi menjadi *electronic State Asset Development and Enhancement Work Application* yang disingkat menjadi e-Sadewa. Aplikasi e-Sadewa adalah sebuah aplikasi kerja elektronik pengembangan dan pemberdayaan BMN yang dikelola oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya. Tidak hanya memiliki fungsi pemantauan terhadap data BMN di seluruh satuan kerja, aplikasi ini juga memfasilitasi kebutuhan layanan administrasi pengelolaan dan penatausahaan BMN di satuan kerja pengadilan. Peningkatan sistem dari aplikasi Siperhari sebelumnya diharapkan dapat mengemban tugas dan tantangan dalam melakukan pemantauan, penganalisisan, dan percepatan proses administrasi dalam hal pengelolaan barang milik negara.

Peresmian transformasi aplikasi Siperhari menjadi e-Sadewa dilaksanakan secara langsung oleh Ketua Mahkamah Agung pada tanggal 8 Desember 2021 bertempat di Hotel Grand Mercure Kemayoran, Jakarta Pusat. Pemberlakuan aplikasi e-Sadewa telah disahkan melalui Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 246/KMA/SK/XII/2021 tentang Pemberlakuan *Electronic State Asset Development and Enhancement Work Application* (e-Sadewa) tanggal 7 Desember 2021.

### Langkah Strategis Pengelolaan BMN


Beberapa langkah strategis pengelolaan BMN yang telah dan akan terus ditingkatkan oleh Mahkamah Agung adalah sebagai berikut:

- 1) pelaporan data aset yang valid, mudah diakses, dan dapat diolah dengan cepat sebagai bahan dasar pengambilan kebijakan pimpinan terkait pengelolaan aset melalui aplikasi e-Sadewa;
- 2) pengembangan pola kerja secara digital dalam pengelolaan dan penatausahaan barang milik negara melalui aplikasi e-Sadewa;
- 3) perubahan prinsip 3T bertambah menjadi 4T (tertib fisik, tertib administratif, tertib hukum, dan tingkatkan PNBPN);
- 4) peningkatan *asset awareness* oleh *asset manager*, yaitu penggunaan dan pemanfaatan aset harus dilakukan secara optimal oleh seorang *asset manager*;
- 5) peningkatan mitigasi risiko yang tepat terhadap laporan permasalahan seputar aset; dan
- 6) percepatan integrasi aplikasi digital yang mendukung pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara (e-Sadewa, e-Bima, Sikep, dll.)

### MANAJEMEN TEKNOLOGI INFORMASI

Mahkamah Agung turut berpartisipasi dan mendukung penyelenggaraan SPBE dengan melakukan pembaharuan serta inovasi melalui pemanfaatan teknologi informasi. Beberapa pengembangan sistem informasi yang dilakukan oleh Mahkamah Agung sepanjang tahun 2021 adalah sebagai berikut.

- Aplikasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (e-PPID) Mahkamah Agung
- Sistem Informasi Mahkamah Agung RI-Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
- Website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIIH) Mahkamah Agung RI
- Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Versi 4.2.0
- Aplikasi e-Court
- Sistem Penanganan Perkara Tindak Pidana secara Terpadu Berbasis Teknologi Informasi (SPPT-TI) Mahkamah Agung RI



## PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN HUKUM DAN PERADILAN DAN PUTUSAN- PUTUSAN PENTING (*LANDMARK DECISIONS*)

### PROGRAM PEMBARUAN

Pembaruan yang dilakukan Puslitbang Kumdil dalam rangka mewujudkan organisasi MA RI yang berbasis pengetahuan (*knowledge based organization*) berupa pengelolaan pengetahuan (*knowledge management*) yang merupakan modal penting menuju MA RI sebagai organisasi pembelajar. Untuk itu, Puslitbang Kumdil harus mampu mengelola sumber pengetahuan, menyediakan referensi yang memadai dalam pembuatan putusan, dan memanfaatkannya untuk digunakan sebagai sarana informasi pengetahuan di bidang hukum dan peradilan bagi masyarakat pengguna layanan peradilan dan masyarakat secara umum.

Puslitbang Kumdil telah melakukan berbagai terobosan dan inovasi dengan pemanfaatan teknologi informasi sebagai berikut.

1. Melakukan otomatisasi bisnis proses penelitian dan pengembangan yang mendukung kinerja Puslitbang Kumdil dalam melakukan penelitian menjadi efektif dan efisien melalui sistem informasi penelitian dan pengembangan (*sislitbang*).
2. Mendesain metode penelitian terkait pengumpulan data dan wawancara secara daring untuk menggali sumber-sumber data yang berkaitan dengan permasalahan penelitian yang dikaji untuk mengatasi hambatan pelaksanaan penelitian secara teknis di lokasi penelitian akibat pandemi Covid-19. Untuk menjamin kualitas penelitian dan akurasi data, teknik penelitian dilakukan dengan model diskusi kelompok terpumpun (DKT) atau *focus group discussion* (FGD) secara daring dengan ahli, sedangkan penyebaran kuesioner *online* dilakukan dengan memanfaatkan sarana teknologi informasi yang tersedia.
3. Memublikasi hasil penelitian Puslitbang Kumdil sesuai dengan standar ilmiah oleh penerbit resmi untuk menjamin standar mutu dan kualitas penelitian. Hasil penelitian tersebut kemudian diterbitkan oleh lembaga penerbitan bereputasi nasional (*publishing house*) dan juga disajikan dalam bentuk buku elektronik (*e-book*) yang dapat diakses oleh publik pada situs [www.bldk.mahkamahagung.go.id](http://www.bldk.mahkamahagung.go.id).

4. Melakukan uji similarity terlebih dahulu melalui aplikasi *Turnitin* dengan batas maksimal kesamaan 30%, sebagai bentuk tanggung jawab ilmiah dan kompetensi, terhadap hasil penelitian sebelum dilakukan pencetakan atau penerbitan
5. Menyajikan setiap substansi atau materi dalam publikasi kinerja penelitian dan pengembangan di bidang hukum dan peradilan dalam tiga bahasa, yaitu bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa Arab yang dapat diakses melalui situs [www.bldk.mahkamahagung.go.id](http://www.bldk.mahkamahagung.go.id).
6. Menyajikan putusan-putusan pengadilan yang dianggap penting (*landmark decision*) dalam pengembangan tata hukum di Indonesia dan mendapatkan perhatian nasional secara luas. Untuk memperluas jangkauan pembaca, dalam penyajian secara daring dialihbahasakan dalam bentuk tiga bahasa, yakni bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa Arab yang diakses melalui [www.bldk.mahkamahagung.go.id](http://www.bldk.mahkamahagung.go.id).
7. Mendesain model pengawasan, *memonitoring*, dan evaluasi secara elektronik dalam bentuk e-Monitoring dan e-Evaluasi untuk memudahkan pengawasan, *monitoring*, dan evaluasi terhadap setiap kegiatan program Puslitbang Kumdil secara efektif dan efisien.
8. Menggunakan e-Budgeting setiap belanja dan membuat pertanggungjawaban kegiatan program Puslitbang Kumdil dalam kerangka mendukung transparansi dan akuntabilitas.

## PROGRAM PENELITIAN, PENGEMBANGAN, DAN PENGAJIAN

Tabel Topik Penelitian Puslitbang 2021

1.	Meningkatnya Perkara Perceraian di Pengadilan pada Era Teknologi Informasi
2.	Formulasi Aksentuasi Jenis Uqubat terhadap Pelaku Jarimah Pemerksaan dan Pelecehan Seksual terhadap Anak
3.	Kewenangan Pengadilan Niaga dalam Mengadili Permohonan Keberatan atas Putusan KPPU
4.	Implemetasi Gugatan Lain-Lain dan Penyelesaiannya dalam Kepailitan dan PKPU
5.	Peningkatan Sengketa Pajak Pada Tingkat Peninjauan Kembali dan Peran Yurisprudensi
6.	Urgensi Penerapan Pidana Tambahan Pemecatan terhadap Prajurit TNI Pelaku Tindak Pidana Kesusilaan di Lingkungan Keluarga Besar TNI (KBT)
7.	Penyusunan Naskah Akademik Revisi SK KMA No. 140/KMA/SK/X/2008/tentang Panduan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan
8.	Kajian Hak Uji Materiel (Prioritas Nasional)
9.	Pengembangan Kebijakan Mahkamah Agung Terkait Mekanisme Pemeriksaan Hak Uji Materil (Prioritas Nasional)
10.	Tingkat Kepatuhan dan Implementasi terhadap Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI oleh Hakim di Pengadilan
11.	Kajian <i>Restoratif Justice</i> dalam Perspektif Normatif, Praktik, dan Persepsi Hakim
12.	Grand Design Kelembagaan Juru Sita (Prioritas Nasional)
13.	Pedoman Penyusunan Kebijakan Mahkamah Agung
14.	Perlindungan Hak-Hak Buruh Pascaterbitnya UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Sebagai Dasar Pertimbangan Memutus Hakim dalam Persidangan Hubungan Internasional
15.	Implementasi Yurisprudensi dalam Putusan-Putusan Hakim
16.	Implementasi Layanan Informasi di Mahkamah Agung dan Peradilan di Bawahnya Terkait Penilaian Keterbukaan Informasi Publik (KIP)
17.	Kajian Pembaruan Hukum Acara di Peradilan Tata Usaha Negara
18.	Analisis dan Inventarisasi Permasalahan Teknis Hukum atas Pengaruh UU Cipta Kerja terhadap Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara.

## PERAN SERTA DAN KERJA SAMA PERAN SERTA DALAM FORUM ILMIAH

Berbagai pemikiran bidang hukum dan peradilan telah disampaikan oleh SDM pada Puslitbang Kumdil dalam **konferensi internasional**, baik yang berada di Indonesia maupun di beberapa negara. Beberapa di antaranya tampak sebagai berikut.

- 1) *The Positions of The Host Country Agreement in Industrial Relations Dispute Cases Under Indonesian Law (Asean Foundation Case)* yang disampaikan oleh Sri Gilang M.S.R.P., S.H., M.H. pada International Conference on Law and Human Rights (ICLHR) 2021: Asean Diversities and Its Principles Toward Asean Legal Integration in Pandemic Era, pada 14--15 April 2021 di Universitas Kristen Indonesia.
- 2) Partisipasi sebagai presenter oleh Zulfia Hanum Alfi Syahr dan Muhamad Zaky Albana dalam The 2<sup>nd</sup> International Conference On Law And Human Rights 2021 "Restructuring Law and Human Rights in New-Normal Society" oleh Kementerian Hukum dan HAM dan Universitas Indonesia pada 3--6 Mei 2021 dengan judul paper "Virtual Legal Aid Post (Posbakum) in The New Normal Era."
- 3) Presentasi oleh Peneliti Ahli Madya, Ismail Rumadhan dengan judul paper *Government Policy in Settlement of Bankruptcy Applications and Postponement of Debt Payment Obligations in the Covid-19 Pandemic Crisis in Indonesia*. Paparan tersebut disampaikan pada 2<sup>nd</sup> International Conference on Law Reform (INCLAR): Between Fulfilling Human Rights and Restorative Justice oleh Universitas Muhammadiyah Malang pada 23 September 2021, sedangkan Peneliti Ahli Muda, Agus Suntoro, S.H., M.H. dan Nurrahman Aji Utomo, S.H., M.H. menyampaikan paparan dengan judul *The Challenge of Anti-Corruption during the Covid-19 Pandemic: Considering the Utilization of Interception, Protection of Human Rights and Criminal Justice System*.
- 4) Partisipasi sebagai pemakalah oleh Agus Suntoro, S.H., M.H., Nurrahman Aji Utomo, S.H., M.H., M. Ikbar Andi Endang, S.H., M.H. dan M. Ridha Hakim, S.H., M.H. dengan artikel "Intergenerational Justice and Judges Decisions in Citizens Lawsuits with an Environmental Aspect". Serta artikel dari Zulfia Hanum Alfi Syahr, S.Pd., M.M.; Muhamad Zaky Albana, S.Sos.; Tumbur Palti D. Hutapea, S.H., M.H.; Dr. Christina N.M. Tobing, S.H., M.H. (dosen UPH) dengan "Protection of The Rights of Women and Children Dealing with The Law Through Psychologist's Role". Dua artikel tersebut dipresentasikan pada International Conference on Current Legal Issue and Human Security yang diselenggarakan oleh Universitas Atma Jaya, pada 24 November 2021.
- 5) Partisipasi sebagai pemakalah oleh Agus Suntoro, S.H., M.H. pada 5th Conference on Human Rights: Human Rights and Human Security in Asia during the Covid-19 Pandemic yang diselenggarakan oleh the Centre for Human Rights, Multiculturalism and Migration (CHRM2) at the University of Jember, Indonesia dan the Sydney Southeast Asia Centre at the University of Sydney, Australia pada 25 November 2021 dengan judul *Reformulation of Agrarian Regulation within Human Rights Framework*.
- 6) Partisipasi oleh Agus Suntoro, S.H., M.H. dalam Crimes against Humanity and the International Criminal Court: Nature, Procedure, and the Implication on the Philippine Situation yang diselenggarakan oleh The University of the Philippines Law Center Institute of Human Rights and Institute of International Legal Studies with the Integrated Bar of the Philippines pada 25 Juni 2021.

Tabel Daftar Aktivitas Publikasi Internasional Peneliti Puslitbang

No.	Penulis	Judul	Publikasi
1.	Dr. Budi Suhariyanto	Liability Incorporate between Transnational Corruption Cases Indonesia and the United States of America	Journal of Legal, Ethical and Regulatory
2.	Dr. Ismail Rumadan	Interpretation of The Legal Values and Justice in The Living Law Related to Court Decision	Sociological Jurisprudence Journal
3.	Dr. Ismail Rumadan	Implementation of Mining Business License and Intergenerational Justice in Indonesia	The International Journal of Humanities & Social Studies



No.	Penulis	Judul	Publikasi
4.	Agus Suntoro, S.H., M.H. dan Nurrahman Aji Utomo, S.H., M.H.	The Challenge of Anti-Corruption During the Covid-19 Pandemic: Considering the Utilization of Interception and the Protection of Human Rights	Atlantis Press
5.	Dr. Ismail Rumadan	Government Policy in Settlement of Bankruptcy Applications and Postponement of Debt Payment Obligations in the Covid-19 Pandemic Crisis in Indonesia	Atlantis Press
6.	Zulfa Hanum Alfi Syahr dan Muhamad Zaky Albana	Virtual Legal Aid Post (Posbakum) in The New Normal Era	Atlantis Press
7.	Zulfa Hanum Alfi Syahr dan Muhamad Zaky Albana	Bailiffs' Training Needs Analysis for Supporting The Digitalization of Judicial Processes in Indonesia in The Pandemic Era	European Alliance for Innovation

Dalam kerangka penyebarluasan pengetahuan bidang hukum dan peradilan **pada tingkat nasional**, secara khusus SDM dalam Puslitbang Kumdil juga terlibat dalam penyusunan kebijakan tingkat nasional yang diselenggarakan oleh berbagai lembaga negara dan kementerian. Beberapa di antaranya sebagai berikut.

- 1) Dr. Andi Akram, S.H., M.H., Kapuslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung selaku narasumber pada Webinar "Memutus Rantai Kekerasan dan Memulihkan Korban: Refleksi 17 Tahun UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga" yang diselenggarakan oleh Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan pada 27 September 2021.
- 2) Keterlibatan Peneliti Ahli Madya Dr. Budi Suhariyanto dalam penyusunan Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang diselenggarakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada 5 Januari 2021.
- 3) Finalisasi Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha yang diselenggarakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada 2 Februari 2021 yang diwakili oleh Dr. Budi Suhariyanto, peneliti ahli madya.
- 4) Sarasehan Jilid III: Penguatan Instrumen Hukum Perdata dan Komersil Lintas Negara sebagai Modalitas Diplomasi Ekonomi dalam Mendukung Pemulihan Ekonomi di Indonesia yang diselenggarakan oleh Dirjen Hukum dan Perjanjian Internasional Kementerian Luar Negeri pada 25 Februari 2021 yang diwakili oleh Dr. Marsudin Nainggolan, S.H., M.H. selaku hakim tinggi/peneliti.
- 5) Dr. Nurul Huda, S.H., M.H. sebagai narasumber dalam Webinar Nasional Hukum Waris Adat dalam Praktik Peradilan, penyelenggara Asosiasi Pengajar Hukum Adat (APHA Indonesia) dengan Asosiasi Pimpinan Perguruan Tinggi Hukum Indonesia (APPTHI) tanggal 18 Maret 2021.
- 6) Pembahasan mengenai Kelompok Kerja Mediasi-Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam Kerangka Penyelenggaraan Pelatihan Sertifikasi dimediasi oleh Mahkamah Agung yang diselenggarakan pada 24 Maret 2021 diwakili oleh Dr. Budi Suhariyanto, peneliti ahli madya.
- 7) Materi Muatan Model Law Perjanjian Mutual Legal Assistance (MLA) di Bidang Perdata dan Komersial Lintas Negara yang disampaikan Sri Gilang M.S.R.P., S.H., M.H. pada FGD Penyusunan Undang-Undang MLA Perdata oleh Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional Kementerian Luar Negeri pada 3--5 Mei 2021.
- 8) Diskusi terfokus dengan judul "Implementasi Kebijakan Hukum Mati Ditinjau dari Aspek Hak Asasi Manusia" yang diselenggarakan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kemenkumham pada 24 Mei 2021 yang dihadiri oleh Peneliti Ahli Madya, Dr. Moch. Ridwan, S.H., M.H.
- 9) Keterlibatan dalam Serap Aspirasi Publik Penyempurnaan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) No. 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengawasan dan Penanganan Perkara Kemitraan demi menjamin kepastian hukum yang

- diselenggarakan oleh KPPU pada 19 Agustus 2021 dan dihadiri oleh Dr. Marsudin Nainggolan, S.H., M.H., hakim tinggi/peneliti.
- 10) Keterlibatan dalam pembahasan Grand Design Reformasi Hukum Ekonomi dengan judul "Penyempurnaan Hukum Ekonomi: Mekanisme Eksekusi Perdata" yang diselenggarakan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia pada tanggal 25 Agustus 2021 diikuti oleh Dr. Marsudin Nainggolan, S.H., M.H. selaku hakim tinggi/peneliti.
  - 11) Dr. Marsudin Nainggolan S.H., M.H. sebagai penanggap FGD Online Review temuan studi penghitungan kerugian keuangan negara dalam korupsi sumber daya alam pada tanggal 7 Oktober 2021, penyelenggara Komisi Pemberantasan Korupsi bekerja sama dengan Universitas Gajah Mada.
  - 12) Dr. Andi Akram, S.H., M.H., Kapuslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung serta Dr. Marsudin Nainggolan S.H., M.H. terkait pembahasan kerja sama penelitian kepaillitan di sektor jasa keuangan yang diselenggarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tanggal 12 Oktober 2021.
  - 13) Dr. Marsudin Nainggolan S.H., M.H. sebagai narasumber Webinar Serap Aspirasi Publik Terkait Penyempurnaan Peraturan KPPU No. 3 Tahun 2009 tentang penerapan Pasal 1 angka 10 tentang Pasar Bersangkutan (Relevant Market) tanggal 18 Oktober 2021, penyelenggara KPPU.
  - 14) Dewi Asimah, S.H., M.H. menjadi narasumber dalam Diskusi Publik "Membedah Problem Implementasi Perma No. 2 Tahun 2019: Apakah Membatasi Akses Pencari Keadilan?". Diskusi ini berupaya menggali persepektif PMH oleh penguasa yang dimaksud dalam Perma a quo, serta implementasinya di peradilan. Diskusi publik ini diselenggarakan oleh LBH Jakarta, pada 19 Oktober 2021.
  - 15) Dr. Budi Suhariyanto, S.H., M.H. menjadi narasumber dalam FGD dengan topik "Dialog Kekuasaan Kehakiman dalam Kerangka Pembangunan Hukum Berbasis Putusan Pengadilan". Diskusi ini diselenggarakan oleh Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga pada Jumat, 29 Oktober 2021.
  - 16) Diskusi "Pemanfaatan Mediator sebagai Upaya Penyelesaian Sengketa Pertanahan" pada Oktober, November, dan Desember 2021 dan Diskusi "Pembatalan Hak atas Tanah Pemerintah/BUMN sebagai Pelaksanaan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Pertanahan untuk Mewujudkan Kepastian Hukum" pada 1 November 2021, dimoderatori oleh Peneliti Tumbur Palti D. Hutapea, S.H., MH.
  - 17) Dr. Andi Akram, S.H., M.H., Kapuslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung sebagai pembahas dalam upaya peningkatan kapasitas hakim yang diselenggarakan oleh Komisi Yudisial pada 6 Desember 2021.
  - 18) Keterlibatan dalam Diskusi Kelompok Terpumpun yang membahas Evaluasi RPJPN 2005--2025 Bidang Hukum dan Persiapan Background Study RPJPN 2025-2-045 oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas RI, pada tanggal 1--2 Desember 2021, diikuti oleh Dr. Marsudin Nainggolan, S.H., M.H.
  - 19) Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan materi Lanjutan Pembahasan Masukan terkait "Restorative Justice dalam RUU tentang KUHP" dan Pembahasan RUU tentang KUHP dengan materi "Pembahasan Isu Krusial dan Isu Penting dalam RUU tentang KUHP" yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan HAM pada 22 September dan 22 November 2021 yang dilakukan oleh Dr. Budi Suhariyanto, peneliti ahli madya.
  - 20) Dr. Marsudin Nainggolan S.H., M.H. sebagai narasumber dalam Seminar Nasional Himpunan Kurator dan Pengurus Indonesia (HKPI) tentang pengawasan hakim dalam perkara kepaillitan dan PKPU tanggal 25 November 2021, penyelenggara HKPI.
  - 21) Dr. Marsudin Nainggolan S.H., M.H. sebagai anggota Pokja Perancang Perma tentang Hukum Lingkungan, penyelenggara *Indonesian Center for Environment Law* (ICEL) dan Mahkamah Agung RI.

Secara aktif para Peneliti Puslitbang Kumdil juga terlibat pada penyebarluasan gagasan serta pengetahuan bidang hukum dan peradilan pada berbagai forum ilmiah melalui seminar dan konferensi tingkat nasional di antaranya :

- 1) Dinamika Hubungan Hukum Internasional dan Hukum Nasional dalam Sistem Hukum Indonesia yang disampaikan Sri Gilang M.S.R.P., S.H., M.H. pada Seminar Nasional-Call for Paper "Artificial Intelligence dalam Bidang Hukum di Era Teknologi Informasi: Tantangan dan Peluang yang diselenggarakan Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya Malang pada 24--25 Mei 2021.
- 2) Implementasi Teknologi Informasi oleh Juru Sita Pengadilan dalam Melaksanakan Eksekusi yang disampaikan Tumbur Palti D. Hutapea, S.H., M.H. pada Seminar Nasional-Call for Paper "Artificial Intelligence dalam Bidang Hukum di Era Teknologi Informasi: Tantangan dan Peluang" yang diselenggarakan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang pada 24--25 Mei 2021.

Peran aktif dan keterlibatan para Peneliti di Puslitbang Kumdil dalam bidang hukum dan peradilan, baik level internasional maupun nasional juga mendapat apresiasi dari berbagai pihak, salah satunya Dr. Budi Suhariyanto menerima penghargaan sebagai Peringkat I, Periset Berprestasi Bidang Ilmu Sosial oleh Pengurus Pusat Himpunan Peneliti Indonesia (Himpenindo) Tahun 2021.

### KERJA SAMA

Diseminasi Hasil Penelitian Puslitbang Hukum dan Peradilan mengenai "Konstruksi Perma Mengenai Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Menyongsong Peradilan Modern" disampaikan secara langsung oleh Dr. Hasbi Hasan, Sekretaris Mahkamah Agung bekerja sama dengan Universitas Islam Negeri Raden Inten Lampung pada Kamis, 27 Mei 2021. Kegiatan tersebut diliput oleh berbagai media massa salah satunya media Lampung, di antaranya <https://www.rumpunmedia.com/puslitbang-ma-jalin-kerjasama-dengan-uin-raden-intan.html>.

Menuju pergantian tahun 2021, Sekretaris Mahkamah Agung dan Kepala Balitbangdiklat Mahkamah Agung memperluas kerja sama dalam penelitian dan

pengembangan hukum dengan Forum Rektor Penguat Karakter Bangsa (FRPKB) di Universitas Lampung. Kegiatan kerja sama pada tanggal 23 Desember 2021 tersebut, memperluas pintu kerja sama yang akan bermanfaat dalam pengembangan di Mahkamah Agung. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Dr. Zarof Ricar, S.H., S.Sos., M.Hum., selaku Kepala Balitbangdiklat Mahkamah Agung, dan kerja sama tersebut ditandatangani oleh Prof. Dr. Hasbi Hasan, M.H. selaku Sekretaris Mahkamah Agung.

### PELAKSANAAN KONFERENSI DAN PUBLIKASI

#### The 1<sup>st</sup> International Conference on Law and Human Rights (ICLHR 2021)

Puslitbang Hukum dan Peradilan menjadi mitra setrategis dalam pelaksanaan The 1st International Conference on Law and Human Rights (ICLHR 2021) yang diselenggarakan oleh Universitas Kristen Indonesia (UKI) pada tanggal 14--15 April 2021. Kerja sama tersebut berkaitan dengan pelibatan para peneliti Puslitbang sebagai presenter dan pemuatan paper atau publikasi dari para peserta yang telah diseleksi dalam *Jurnal Hukum dan Peradilan*, khususnya untuk terbitan pada tahun 2021. Pelaksanaan konferensi tersebut melibatkan 553 partisipan dan 219 presenter dari berbagai ahli, akademisi, peneliti, dan praktisi yang ada di 6 negara, yaitu Indonesia, Belanda, Australia, Jerman, Thailand, dan Malaysia.

#### International Conference & Call For Paper on Current Legal Issues and Human Security

Puslitbang Hukum dan Peradilan bekerja sama dengan Universitas Atma Jaya Katolik Jakarta, Tarlac State University, Fu Jen Catholic University, and International Committee of the Red Cross (ICRC) menyelenggarakan International Conference & Call For Paper on Current Legal Issues and Human Security yang dilakukan pada 24--25 November 2021.

### PENGUATAN PEMAHAMAN HUKUM MELALUI MEDIA MASSA

- 1) Hasil penelitian dengan judul "Efektivitas Perma Nomor 13 Tahun 2016 dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus dengan Pelaku Korporasi" yang secara khusus diliput dalam [Ringkasan Eksekutif Laporan Tahunan 2021  
Mahkamah Agung Republik Indonesia](https://jateng.</a></li>
</ol>
</div>
<div data-bbox=)

- [tribunnews.com/amp/2021/06/22/mahkamah-agung-dan-fh-unsoed-purwokerto-gelar-diseminasi-ilmiah](https://tribunnews.com/amp/2021/06/22/mahkamah-agung-dan-fh-unsoed-purwokerto-gelar-diseminasi-ilmiah).
- 2) Penelitian dan pembahasan materi dalam Aksentuasi Jenis Uqubat bagi Pelaku Jarimah Pemerksaan dan Pelecehan Seksual terhadap Anak yang secara khusus dimuat dalam
    - a) <https://mitrapol.com/2021/10/06/badan-litbangkumdil-mahkamah-agung-ri-adakan-fgd-aksentuasi-jenis-uqubat-jinayah-di-banda-aceh-ada-apa/>;
    - b) <https://waspadaaceh.com/kalitbang-ma-sebut-hukum-cambuk-bagi-pelaku-pelecehan-dan-pemerksaan-anak-tidak-tepat/>;
    - c) <https://anteroaceh.com/news/mahkamah-agung-nilai-hukuman-cambuk-untuk-pelaku-pemerksaan-dan-pelecehan-seksual-terhadap-anak-kurang-tepat/index.html>
  - 3) Pembahasan diskursus Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagai dasar pertimbangan putusan hakim dalam persidangan Hubungan Industrial dan relasinya dengan perlindungan hak-hak buruh yang ditampilkan oleh <https://jurnalsoreang.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-1011948002/akademisi-ungkit-perlindungan-hak-atas-pekerjaan-dalam-uu-cipta-kerja-yang-masih-lemah>; dan <https://bandungmu.com/dr-dede-kania-nilai-perlindungan-hak-pekerja-dalam-uu-cipta-kerja-masih-lemah/>.

## JURNAL HUKUM DAN PERADILAN

Puslitbang Kumdil dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan di bidang ilmu pengetahuan melalui penyediaan hasil riset ataupun hasil kajian di bidang hukum dan peradilan telah melakukan peningkatan standar kualitas publikasi pada Jurnal Hukum dan Peradilan. Upaya tersebut dilakukan untuk meningkatkan reputasi *Jurnal Hukum dan Peradilan* dari terindeks Sinta Dua (S2) pada pemeringkat nasional oleh Kementerian Riset dan

Teknologi/Badan Riset. Oleh karena itu, penerbitan *Jurnal Hukum dan Peradilan* Volume 10 Tahun 2021 edisi Maret, Juli, dan November telah dipublikasi dalam bahasa Inggris yang dapat diakses secara daring melalui situs [www.jurnalhukumdanperadilan.org](http://www.jurnalhukumdanperadilan.org).

**Tabel Asal negara terbanyak yang mensitasi/mengutip Jurnal Hukum dan Peradilan**

No.	Negara	Jumlah Sitasi	Persentase
1.	Indonesia	36.061	93,09 %
2.	United States	570	1,47 %
3.	Malaysia	273	0,70 %
4.	India	141	0,36 %
5.	Bahrain	111	0,29 %
6.	United Kingdom	103	0,27 %
7.	China	79	0,20 %
8.	Singapore	74	0,19 %
9.	Brazil	68	0,18 %
10.	Australia	56	0,14%

Hasil peningkatan kualitas terbitan *Jurnal Hukum dan Peradilan* dapat terlihat dari pengakuan penulis internasional yang ditandai dengan disitasinya artikel *Jurnal Hukum dan Peradilan* dalam tulisan-tulisan yang diterbitkan oleh jurnal-jurnal terindeks scopus mencapai 81 pengutipan hingga tahun 2021. Selain telah banyak dikutip, *Jurnal Hukum dan Peradilan* juga sedang berproses untuk menjadi salah satu jurnal hukum terindeks Scopus yang telah melalui beberapa tahapan persyaratan.

Berbagai judul paper dalam *Jurnal Hukum dan Peradilan* yang mendapatkan sitasi dari berbagai penulis, praktisi hukum, dan akademisi tersebar mulai dari persoalan hukum acara, sistem pemidanaan, dan praktik restorative justice, perlindungan anak dalam berhadapan dengan hukum, kontrak komersial, pengaturan mengenai kepapilitan dan persaingan usaha, pidana mati, dan korupsi.

Tabel Artikel *Jurnal Hukum dan Peradilan* disitasi/dikutip terbanyak hingga tahun 2021

No.	Judul Artikel	Jumlah Sitasi
1.	Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Praktek Hukum Acara di Peradilan Agama	42
2.	Problem Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia dan Reorientasi Tujuan Pemidanaan	37
3.	Eksistensi Hukum Pidana Adat di Indonesia: Pengkajian Asas, Norma, Teori, Praktik, dan Prosedurnya	31
4.	Upaya Pelindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang	27
5.	Kompetensi absolut pengadilan tata usaha negara dalam konteks Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan	23
6.	Asas Proporsionalitas sebagai Landasan Pertukaran Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Kontrak Komersial	23
7.	Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Anak	21
8.	Penerapan Asas Kelangsungan Usaha dalam Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)	21
9.	Problematika Penerapan Pidana Mati dalam Konteks Penegakan Hukum di Indonesia	20
10.	Asas Pembalikan Beban Pembuktian terhadap Tindak Pidana Korupsi dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia Dihubungkan dengan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Antikorupsi 2003	20

Tabel Jumlah Pengunjung situs *Jurnal Hukum dan Peradilan*

No.	Bulan	Jumlah Halaman yang Dikunjungi/Tinjauan Laman/Page Views	Jumlah Pengunjung/ Kunjungan unik/unique visits	Pengunjung Baru/ Kunjungan Pertama/ First Time Visits	Pengunjung Lama/ Kunjungan Kembali/ Returning Visits
1.	Januari	10747	3738	2640	1098
2.	Februari	10061	3043	2059	984
3.	Maret	14813	5494	3732	1762
4.	April	14514	5896	4002	1894
5.	Mei	8413	3647	2583	1064
6.	Juni	8215	2934	2081	853
7.	Juli	7501	3323	2417	906
8.	Agustus	9514	3355	2379	976
9.	September	12847	5735	4252	1483
10.	Oktober	17538	8147	6061	2086
11.	November	18057	8044	5941	2103
12.	Desember	15506	7657	5701	1956
	Total	147726	61013	43848	17165

## PUTUSAN-PUTUSAN PENTING (LANDMARK DECISIONS)

### PIDANA

#### I. Perkara No. 358 K/Pid/2020

Nomor Perkara	: 358 K/Pid/2020 tanggal 30 April 2020
Terdakwa	: Heru Pamungkas
Jenis Perkara	: Tindak Pidana Penipuan
Majelis Hakim	: 1. Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H. 2. Soesilo, S.H., M.H. 3. Hidayat Manao, S.H., M.H.
Panitera Pengganti	: Nurjamal, S.H., M.H.
Kaedah Hukum	: Pelaksanaan tender berupa pekerjaan yang mengakibatkan kerugian, atau adanya kelalaian dan wanprestasi bukan merupakan tindak pidana.
Klasifikasi	: Lepas dari segala tuntutan hukum ( <i>ontslag van alle rechtsvervolging</i> );

#### II. Putusan No. 121 K/Pid.Sus/2020

Nomor Perkara	: 121 K/Pid.Sus/2020 tanggal 9 Maret 2020
Terdakwa	: Ir. GALAILA KAREN KARDINAH Alias KAREN GALAILA AGUSTIAWAN Alias KAREN AGUSTIAWAN;
Jenis Perkara	: Tindak Pidana Korupsi
Majelis Hakim	: 1. Dr. H. Suhadi, S.H., M.H. 2. Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H. 3. Prof. Dr. H. Abdul Latif, S.H., M.Hum. 4. Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H. 5. Prof. Dr. Mohammad Askin, S.H.
Panitera Pengganti	: Rudi Soewasono Soepadi, S.H., M.Hum.
Kaedah Hukum	: Kerugian akibat pelaksanaan <i>Business Judgment Rule</i> bukan merupakan tindak pidana sepanjang tidak terdapat kecurangan, benturan kepentingan, perbuatan melawan hukum dan kesalahan yang disengaja.
Klasifikasi	: Lepas dari segala tuntutan hukum ( <i>ontslag van alle rechtsvervolging</i> )

## PERDATA

### III. Nomor Perkara 578 K/Pdt.Sus-Pailit/2021

Nomor Perkara	: Nomor 578 K/Pdt.Sus-Pailit/2021
Para Pihak	: <b>KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR WILAYAH DJP SUMATERA SELATAN DAN KEPULAUAN BANGKA BELITUNG</b> cq <b>KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA PALEMBANG</b> , yang diwakili oleh Plh. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Madya Palembang, Fadli, berkedudukan di Jalan Tasik Kambang Iwak, Palembang 30135, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dewi Sulakminijati, S.H., M.Kn., dan kawan-kawan, Para Advokasi Direktorat Peraturan Perpajakan II Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Oktober 2020; Pemohon Kasasi;  Lawan  <b>TIM KURATOR TININDO INTER NUSA (Dalam Pailit)</b> , yang diwakili oleh Anthony Raimond Tampubolon, S.H., Direktur, berkedudukan di Jalan Ahmad Yani Nomor 46, Kota Pangkal Piang, Provinsi Bangka Belitung, dalam hal ini memberi kuasa kepada Yandi Suhendra, S.H., CLA., dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Taman Dutamas Blok B1/8, Jalan Kusuma, Kelurahan Wijaya Kusuma, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat 11460, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Februari 2021;
Jenis Perkara	: Kepailitan (renvoi prosedur)
Majelis Hakim	: 1. Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D. 2. Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H. 3. Dr Ibrahim, S.H., M. H., LL.M.
Panitera Pengganti	: Endang Wahyu Utami, S.H., M.H.
Kaedah Hukum	: Renvoi prosedur mengenai keberatan terhadap daftar piutang tetap harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum dilakukan pengesahan atas perdamaian baik dalam perdamaian PKPU maupun perdamaian pemberesan utang setelah insolvensi.

## AGAMA

## Perkara No 881 K/Ag/2021

Nomor Perkara	Tingkat Pertama Nomor 2616/Pdt.G/2019/PA.JT. Tingkat Banding Nomor 88/Pdt.G/2020/PTA.JK. Tingkat Kasasi Nomor 881 K/Ag/2020
Para Pihak	Drs. CIPTO SULISTIO, bertempat tinggal di Jalan Raya Jatiwaringin Nomor 9 Pangkalan Jati Kota Jakarta Timur. Dalam hal ini memberi kuasa kepada: Syarif Fadillah, S.H., M.H. dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Gedung Eastonia Office Lantai 4 Jalan Raya Jatiwaringin Pangkalan Jati Kota Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Agustus 2020; <b>Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat;</b> L a w a n : 1. MOHAMAD ALATAS, bertempat tinggal di Jalan Masjid Baru Nomor 18 RT. 012 RW. 001 Kelurahan Pejaten Timur Kecamatan Pasar Minggu Kota Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Tedy Mujoko, S.H., M.H. dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Raya Baru Tanjung Barat Nomor 142B Kota Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 September 2020; 2. PT BANK PERMATA Tbk., berkedudukan di Jakarta Gedung WTC II Jalan Jenderal Sudirman Kavling 29-31 Kota Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada: M. Yusuf Adidana, S.H., M.H. dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Cikatomas II Nomor 1A Rawa Barat Kebayoran Baru Kota Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 September 2020; <b>Para Termohon Kasasi/Para Pembanding/Para Tergugat;</b> d a n : HERRY SETIAWAN, S.H., M.Kn. alias HERRY SOSIAWAN, S.H., M.Kn., Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), berkantor di Gedung Graha Adhiyasa Kisamaun Nomor 1 Kelurahan Sukasari Kecamatan Tangerang Kota Tangerang; <b>Turut Termohon Kasasi/Turut Terbanding/Turut Tergugat;</b>
Jenis/Klasifikasi Perkara	Ekonomi Syariah/Perbuatan Melawan Hukum.
Majelis Hakim	1. Dr. Drs. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M. 2. Dr. H. A. Mukti Arto, S.H., M.Hum. 3. Dr. H. Abdul Manaf, M.H.
Panitera Pengganti	Dr. Mardi Candra, S.Ag., M.Ag., M.H.
Kaidah Hukum	- Tindakan <i>hawalatul haq</i> atau <i>cessie</i> (pengalihan piutang) dari <i>Muhal</i> (pihak yang memberikan piutang) kepada <i>Muhal Alaih</i> (pihak yang menerima pengalihan piutang) disebabkan <i>Muhil</i> (pihak yang berutang) tidak memenuhi kewajibannya dalam pembayaran utang, tidak termasuk dalam perbuatan melawan hukum (PMH). - Penyelesaian sengketa <i>hawalatul haq</i> atau <i>cessie</i> (pengalihan piutang) perlu mempertimbangkan perspektif pemenuhan prinsip-prinsip ekonomi syariah, seperti berasaskan <i>mu'awanah</i> (saling percaya), asas <i>manfaat</i> , asas <i>antaradhin</i> (kerelaan), dan asas <i>al-bir wa al-taqwa</i> (kebaikan dan proporsional), untuk memberi kesempatan kepada <i>Muhil</i> (pihak yang berutang) melunasi utangnya.



## TATA USAHA NEGARA

### I. Perkara Nomor 3 PK/TUN/2021

Nomor Perkara	3 PK/TUN/2021
Para Pihak	MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, Sebagai Pemohon Peninjauan Kembali  Melawan  PT. PABRIK KERTAS INDONESIA (PT. PAKERIN), Sebagai Termohon Peninjauan Kembali
Jenis Perkara	Perizinan
Majelis Hakim	1. Prof. Dr. H. Supandi, S.H.,M.Hum 2. Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H 3. H. Is Sudaryono, S.H., M.H.
Panitera Pengganti	Dr. Teguh Satya Bhakti, S.H., M.H
Kaidah Hukum	Surat Keputusan pejabat TUN berdasarkan pelaksanaan putusan PTUN yang telah berkekuatan hukum tetap tidak dapat dijadikan objek sengketa TUN dikarenakan Hakim Peradilan Tata Usaha Negara tidak diperbolehkan duduk di kursi pemerintahan guna menilai sikap konsistensi tersebut.
Klasifikasi	Pemberian hak pengusahaan hutan tanaman industri pulp atas areal hutan.

### II. Perkara Nomor 17 P/HUM/2021

Nomor Perkara	17 P/HUM/2021
Para Pihak	LEMBAGA KERAPATAN ADAT ALAM MINANGKABAU (LKAAM) SUMATERA BARAT Sebagai Pemohon; Melawan 1. MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA Sebagai Termohon I; 2. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA Sebagai Termohon II; 3. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA Sebagai Termohon III;
Jenis Perkara	Hak Uji Materiil
Majelis Hakim	1. Dr. H. Yulius, S.H., M.H. 2. Dr. Irfan Fachruddin, S.H., CN. 3. H. Is Sudaryono, S.H., M.H.
Panitera Pengganti	Dr. Agus Budi Susilo, S.H., M.H.
Klasifikasi	Surat Keputusan Bersama Mendikbud, Mendagri dan Menag
Kaidah Hukum	1. Surat Keputusan Bersama menjadi objek hak uji materiil karena sifat berlakunya terus menerus, objek normanya berulang-ulang, subjek pengaturannya bersifat umum, luas dan berlaku ke luar, serta perilaku yang dirumuskan bersifat abstrak dan tertulis. 2. Penggunaan seragam dan atribut dengan kekhasan agama tertentu kepada penganutnya tidak dapat dimaknai sebagai bentuk intoleransi.

## MILITER

### I. Perkara Nomor 135 K/MIL/2020

Nomor Perkara	:	Nomor 135 K/MIL/2020
Terdakwa	:	<b>GUS FADHOL</b>
Jenis Perkara	:	*Dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas*
Majelis Hakim	:	1. Dr. Burhan Dahlan, SH.,MH. (Ketua Majelis) 2. Prof.Dr.Drs. H. Dudu D. Machmudin, SH.,MH. (Hakim Anggota) 3. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H. (Hakim Anggota)
Panitera Pengganti	:	Sunardi, S.H.
Klasifikasi	:	Militer yang tidak mentaati perintah dinas
Kaidah Hukum	:	Perbuatan melakukan hubungan sesama jenis di kalangan prajurit TNI merupakan perbuatan dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas



# PENGAWASAN

## PROGRAM PEMBARUAN

### PENGEMBANGAN APLIKASI EVALUASI SISTEM MANAJEMEN ANTI PENYUAPAN (SMAP).

Badan Pengawasan Mahkamah Agung sebagai pelaksana pengawasan pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya telah menginisiasi pembangunan Sistem Manajemen Antipenyuapan sebagai salah satu wujud dari pelaksanaan Visi Mahkamah Agung "Mewujudkan Badan Peradilan yang Agung". Dalam melakukan pembangunan sistem manajemen antipenyuapan tersebut, Badan Pengawasan Mahkamah Agung bekerja sama dengan beberapa pihak dengan hasil 7 (tujuh) satuan kerja yang terdiri atas Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pengadilan Negeri Yogyakarta, Pengadilan Negeri Denpasar, Pengadilan Negeri Ternate, Pengadilan Negeri Makassar, Pengadilan Negeri Padang, dan Pengadilan Negeri Pangkal Pinang. Pada tanggal 30 Desember 2019 ke 7 (tujuh) satuan kerja tersebut telah mendapatkan sertifikat ISO 37001:2016 SMAP.

Sebagai kelanjutan dari pembangunan sistem manajemen antipenyuapan, Badan Pengawasan Mahkamah

Agung telah membuat petunjuk pelaksanaan evaluasi untuk memastikan berjalannya sistem manajemen antipenyuapan melalui Surat Keputusan Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung Nomor 41/BP/SK/VIII/2021 tanggal 25 Agustus 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Sistem Manajemen Antipenyuapan di Pengadilan Negeri dan Surat Keputusan Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung Nomor 42/BP/SK/VII/2021 tentang Tim Pelaksana Evaluasi Sistem Manajemen Antipenyuapan di Pengadilan Negeri.

### PENGEMBANGAN APLIKASI SIWAS TERINTEGRASI DENGAN APLIKASI EPOST.

Badan Pengawasan Mahkamah Agung telah membangun Aplikasi Elektronik Persuratan Otomasi Sistem (*ePost*) yang terintegrasi dengan Aplikasi Sistem Informasi Pengawasan (SIWAS). E-Post hadir menyediakan solusi dalam mempercepat proses disposisi, ekspedisi, dan tindak lanjut serta dapat mendeteksi setiap tahapan proses surat masuk. Kemudian para pimpinan diberikan kemudahan dalam memberikan disposisi dan memonitoring proses persuratan melalui perangkat selulernya. Selain itu,

seluruh surat masuk telah *didigitalisasi* ke dalam sistem sehingga seluruh pengguna dapat langsung membaca dan mempelajari isi surat serta melakukan konsep surat dan koreksi langsung dari aplikasi.

E-Post telah terintegrasi dengan aplikasi Sistem Informasi Pengawasan (Siwas) hal penanganan pengaduan dan Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP) hal autentikasi dan data pengguna. ePost dilengkapi juga dengan beberapa fitur, antara lain sebagai berikut.

1. Registrasi, registrasi surat untuk mendapatkan nomor surat.
2. Qr Code, kode batang untuk dipindai untuk melihat tahapan proses atau proses ekspedisi.
3. Disposisi, penentuan tindak lanjut surat;
4. Pengolahan, proses penyelesaian tindak lanjut surat.
5. *Redudansi*, mendeteksi dan menggabungkan surat yang sama atau identik.
6. Konsep surat, pembuatan surat dan koreksi secara digital.
7. Pengarsipan, pengalokasi arsip file digital yang tersinkronisasi dengan alokasi berkas fisik.

### PENGEMBANGAN INTEGRASI DATA APLIKASI PMPZI MAHKAMAH AGUNG DENGAN APLIKASI PMPZI KEMENPAN RB

Terdapat penambahan fitur pada aplikasi pmpzi.mahkamahagung.go.id, yakni fitur integrasi data dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) sehingga lalu lintas Lembar Kerja Evaluasi Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas beserta data dukung dapat dikirim secara cepat dan efektif, dan Kemenpan RB mengapresiasi atas kesesuaian usulan TPI dengan kelengkapan data dukung yang lengkap (mencapai 100%).

Tim pengembang aplikasi merespon kebutuhan unit kerja pada saat pelaksanaan survei eksternal yang dilaksanakan oleh Kemenpan RB diperlukan beberapa dokumen pendukung survei, yakni sebagai berikut.

1. Informasi Jumlah Responden SHPRBZI.
2. Permohonan Penggunaan Perangkat Terpusat.
3. Permohonan Penggunaan QRcode

### PENGELOLAAN SISTEM PENGAWASAN PENANGANAN PENGADUAN

Tabel Jumlah Pengaduan Tahun 2021

No.	Jenis Pengaduan	Masuk
1.	Pengaduan yang disampaikan langsung ke Badan Pengawasan	1.860
2.	Pengaduan dari instansi ( <i>stakeholder</i> Mahkamah Agung)	211
3.	Pengaduan Aplikasi Siwas	998
Jumlah		3.069

Tabel Tindak Lanjut Penanganan Pengaduan Tahun 2021

No.	Jenis Tindak Lanjut	Jumlah Tindak lanjut
1.	Masih dalam penyelesaian	267
2.	Selesai diproses	2.802
	a. Diperiksa Tim Bawas	64
	b. Delegasi ke Pengadilan Tingkat Banding	38
	c. Konfirmasi	96
	d. Klarifikasi	944
	e. Memorandum/Delegasi Internal	144
	f. Dijawab Surat	931
	g. Pelaksanaan pemantauan	106
	h. Diarsipkan	53
	i. Gabung berkas	418
	j. Dicabut	8
Jumlah		2.802

## SIDANG MAJELIS KEHORMATAN HAKIM

Pada tahun 2021 Mahkamah Agung bersama Komisi Yudisial, melaksanakan Sidang Majelis Kehormatan Hakim terhadap 3 (tiga) orang Hakim

## PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN

Tabel Hukuman Disiplin Tahun 2021

No.	Jabatan	Jumlah Hukuman Disiplin			Jumlah
		Berat	Sedang	Ringan	
1.	Hakim	25	23	84	132
	Hakim Ad Hoc	-	1	5	6
2.	Panitera	6	5	8	19
3.	Sekretaris	3	3	4	10
4.	Panitera Muda	11	3	8	22
5.	Panitera Pengganti	9	9	17	35
6.	Jurusita	1	7	2	10
7.	Jurusita Pengganti	6	1	4	11
8.	Pejabat Struktural	3	4	13	20
9.	Pejabat Fungsional	-	-	1	1
10.	Staff	10	4	4	18
Jumlah		74	60	150	284

Tabel Data Pemulihan Nama Baik Tahun 2021

No.	Jabatan	Jumlah
1.	Hakim	202
2.	Panitera	25
3.	Sekretaris	4
4.	Panitera Muda	17
5.	Panitera Pengganti	26
6.	Jurusita	8
7.	Jurusita Pengganti	2
8.	Pejabat Struktural	7
9.	Staf	1
10.	Calon Hakim	-
11.	PPNPN	5
Total		297

## KEGIATAN PEMERIKSAAN REGULER

Tabel Data Pengawasan Reguler Tahun 2021

Ungkungan Peradilan	Wilayah I	Wilayah II	Wilayah III	Wilayah IV	Jumlah
Peradilan Umum	5	11	8	2	26
Peradilan Agama	7	8	5	4	24
Peradilan Militer	-	-	-	-	-
Peradilan TUN	1	-	2	-	3
<b>Total</b>	<b>13</b>	<b>19</b>	<b>15</b>	<b>6</b>	<b>53</b>

Tabel Data Jumlah Temuan Pemeriksaan Reguler Tahun 2021

No	Bidang	Jumlah Temuan	Keterangan
1	Manajemen Peradilan	92	Program kerja, evaluasi kegiatan, standar pelayanan
2	Administrasi Persidangan	201	Persidangan, minutası berkas perkara, berita acara sidang dll.
3	Administrasi Perkara	251	Uang konsinyasi, bunga bank yang berasal dari rekening penampungan perkara belum disetor ke Bank, selisih pada penutupan seluruh pembukuan keuangan perkara, dll
4	Administrasi Umum	316	Kedisiplinan, laporan kinerja, panjar biaya eksekusi diterima tunai tidak melalui bank dan disimpan dalam brankas pengadilan, pengadaan alat pengolah data tidak menggunakan e-purchasing menyebabkan adanya indikasi kemahalan harga, dll
5	Kinerja Pelayanan Publik	165	Penanganan Pengaduan, Keterbukaan Informasi Publik, Pelayanan Bantuan Hukum (Posbakum).

## PEMANTAUAN ( MONITORING)

Tabel Data Pemantauan Tahun 2021

Lingkungan Peradilan	Wilayah I	Wilayah II	Wilayah III	Wilayah IV	Jumlah
Peradilan Umum	6	7	3	3	19
Peradilan Agama	2	4	4	1	11
Peradilan Militer	-	-	-	1	1
Peradilan TUN	1	-	-	1	2
<b>Total</b>	<b>9</b>	<b>11</b>	<b>7</b>	<b>6</b>	<b>33</b>

Tabel Data Jumlah Temuan Pemantauan Tahun 2021

No.	Bidang	Jumlah Temuan	Keterangan
1.	Manajemen Peradilan	75	Program kerja, monev kegiatan, standar operasional prosedur (sop), notulen rapat, pengawasan melekat, tugas dan wewenang pejabat/staf (pembagian tugas), laporan bulanan, sosialisasi dan laporan penanganan pengaduan, hakim pengawas bidang.
2.	Administrasi Persidangan	74	Jadwal Sidang tidak diinput dalam SIPP, Ketidaktepatan dalam pembuatan berita acara persidangan, penyelesaian perkara yang terlalu lama, hakim belum menandatangani berita acara sidang, biaya pemeriksaan setempat yang tidak terperinci, dalam daftar isi berkas tidak mencantumkan penunjukan jurusita oleh panitera, terdapat biaya penyerahan salinan putusan kepada para pihak, terdapat pelaksanaan persidangan perkara pidana yang tidak sesuai dengan jadwal sidang, ketidaksesuaian penetapan hari sidang dengan pelaksanaan sidang, terdapat pelaksanaan sidang perkara yang tidak sesuai agenda, terdapat putusan dan penetapan yang tidak tertulis tanggal putusan / penetapan di atas materai, ketidaksesuaian penulisan tanggal sidang pembacaan sidang dalam berita acara, terdapat beberapa amar dalam berita acara sidang tidak sama dengan amar dalam putusan, belum dipublikasikan daftar radius wilayah dan biaya pemanggilan pada situs website.
3	Administrasi Perkara	161	SK Penetapan Panjar Perkara, Ketidaksesuaian penulisan tanggal minutasia perkara dengan SIPP, Pemberitahuan Sisa Panjar, Pemungutan Pemberitahuan Pengembalian Sisa Panjar, Ketidaktertiban Pengisian Buku Register, Pengiriman Salinan Putusan, Laporan atas Perkara yang tidak dapat diselesaikan, Ketidaksesuaian dengan ketentuan antara SK Panjar Biaya dan Biaya Hak Kepaniteraan, Sisa Panjar Perkara yang tidak disetor ke Kas Negara, Pengelolaan Biaya (ATK), Penerimaan Uang secara Tunai tidak melalui bank, Ketidaktertiban Pelaksanaan Minutasia, Pengelolaan Biaya Proses tidak seperti sebagaimana mestinya, Jangka Waktu Penyelesaian Perkara, SK Penggunaan Biaya Proses.
4	Administrasi Umum	268	Sarana dan prasarana kurang memadai, kekurangan tenaga, tidak disiplin (dalam penggunaan tanda pengenal), jadwal piket belum ada, kedisiplinan kehadiran belum maksimal, terdapat kwitansi dimana materai tidak diberikan sesuai dengan waktu tanda tangan, laporan keuangan belum memberikan informasi yang memadai, belum membuat BAST penyerahan barang, Sasaran kerja pegawai yang disusun oleh hakim dan pegawai tidak berdasarkan RKT, fasilitas perpustakaan belum ada dan pengelolaan perpustakaan belum maksimal, kuitansi perjalanan dinas tidak mencantumkan tempat asal dan tempat tujuan.
5	Kinerja Pelayanan Publik	94	Pelayanan Bantuan Hukum, Standar Pelayanan Pengadilan, Laporan dan Biaya Perolehan Informasi, LHKPN/LHKSN, SK Meja Pengaduan, Sosialisasi Pedoman Pelayanan Informasi, Format Formulir Pelayanan Informasi, Informasi Panjar Biaya Perkara, Pelayanan Sidang dan Kebersihan, SK Penetapan PPID, Prosedur dan Tata Cara Penyampaian Pengaduan, Pemutakhiran SIPP, Prosedur Pelayanan dan Keterbukaan Informasi, Pengunggahan (Publikasi) dalam website, backup secara berkala antara aplikasi database website serta PTSP, Standar Biaya Perolehan Salinan Informasi.

## AUDIT KINERJA

Tabel Pelaksanaan Audit Kinerja Pada Pengadilan Tingkat Pertama Tahun 2021

Lingkungan Peradilan	Wilayah I	Wilayah II	Wilayah III	Wilayah IV	Jumlah
Peradilan Umum	9	5	8	2	24
Peradilan Agama	6	7	6	1	20
Peradilan Militer	-	1	-	1	2
Peradilan TUN	1	-	1	1	3
<b>Total</b>	<b>16</b>	<b>13</b>	<b>15</b>	<b>5</b>	<b>49</b>

### Catatan:

Wilayah I : Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, dan Bangka Belitung.

Wilayah II : Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.

Wilayah III : Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Selatan.

Wilayah IV : Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.

### Hasil Temuan Audit Kinerja Bidang Penyelesaian Perkara

Hasil Temuan Audit Kinerja bidang Penyelesaian Perkara menggambarkan bahwa temuan terkait ketepatan waktu penyelesaian perkara lebih dominan, yakni mencapai 138 (seratus tiga puluh delapan) temuan (46,3%) dari 298 (dua ratus sembilan puluh delapan) temuan sehingga diperlukan kebijakan baru berkaitan dengan ketepatan waktu penyelesaian perkara.

### Hasil Temuan Audit Kinerja Bidang Pelaksanaan Eksekusi

Hasil Temuan Audit Kinerja bidang Pelaksanaan Eksekusi menggambarkan bahwa temuan terkait kesesuaian pelaksanaan eksekusi lebih dominan yakni mencapai 46 (empat puluh enam) temuan (28,40%) dari 162 (seratus enam puluh dua) temuan sehingga diperlukan kebijakan baru berkaitan dengan kesesuaian pelaksanaan eksekusi.

### Hasil Temuan Audit Kinerja Bidang Keuangan Perkara dan Pengembalian Sisa Panjar Biaya Perkara

Hasil Temuan Audit Kinerja bidang Keuangan Perkara dan Pengembalian Sisa Panjar Biaya Perkara menggambarkan bahwa temuan terkait kesesuaian dan tarif biaya perkara lebih dominan yakni mencapai 62 (enam puluh dua) temuan (32,80%) dari 189 (seratus delapan puluh sembilan) temuan, sehingga perlu dilakukan langkah – langkah guna mendorong terlaksananya kesesuaian dan tarif biaya perkara.

### Hasil Temuan Audit Kinerja Bidang Sarana Prasarana dan Pengukuran Kualitas Layanan

Hasil Temuan Audit Kinerja bidang Sarana Prasarana dan Pengukuran Kualitas Layanan menggambarkan temuan terkait ketersediaan Sarana dan Prasarana mencapai 102 (seratus dua) temuan (77,27%) dari 132 (seratus delapan belas) temuan, sehingga perlu dilakukan langkah-langkah guna mendorong terlaksananya ketersediaan sarana dan prasarana sesuai aturan yang berlaku.

## EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA

Tabel Perbandingan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Tahun 2019 dan 2020

No.	PERMENPAN RB No 12 Tahun 2015			
	Nilai	Kategori	Jumlah Satker	
			2019	2020
1.	>90 - 100	AA	-	-
2.	>80 - 90	A	9	12
3.	>70 - 80	BB	57	53
4.	>60 - 70	B	7	9
5.	>50 - 60	CC	-	-
6.	>30 - 50	C	1	-
7.	0 - 30	D	-	-
Jumlah			74	74

## PENILAIAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK)

### I. Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)

#### A. Satker yang dievaluasi

Berdasarkan Tipe Unit Kerja

No.	Tipe Unit Kerja	Jumlah	Persentase
1.	Unit Eselon 1	1	0,68%
2.	Tingkat Banding	28	19,18%
3.	Tingkat Pertama	117	80,14%
Total		146	100%

Berdasarkan Kamar Peradilan

No.	Kamar Peradilan	Jumlah	Persentase
1.	Peradilan Umum	54	36,99%
2.	Peradilan Agama	77	52,74%
3.	Peradilan Militer dan TUN	15	10,27%
Total		146	100%

#### B. Sakter yang diusulkan

Berdasarkan Tipe Unit Kerja

No.	Tipe Unit Kerja	Jumlah	Persentase
1.	Unit Eselon 1	1	1,38%
2.	Tingkat Banding	17	23,28%
3.	Tingkat Pertama	55	75,34%
Total		73	100%

Berdasarkan Kamar Peradilan

No.	Kamar Peradilan	Jumlah	Persentase
1.	Peradilan Umum	21	28,76%
2.	Peradilan Agama	47	64,38%
3.	Peradilan Militer dan TUN	5	6,84%
Total		73	100%

#### C. Sakter yang tidak diusulkan

Berdasarkan Tipe Unit Kerja

No.	Tipe Unit Kerja	Jumlah	Persentase
1.	Unit Eselon 1	0	0%
2.	Tingkat Banding	11	15,06%
3.	Tingkat Pertama	62	84,94%
Total		73	100%

Berdasarkan Kamar Peradilan

No.	Kamar Peradilan	Jumlah	Persentase
1.	Peradilan Umum	33	45,20%
2.	Peradilan Agama	30	41,10%
3.	Peradilan Militer dan TUN	10	13,70%
Total		73	100%



## II. Wilayah Birokrasi Bebas dari Korupsi (WBK)

### A. Sakter yang dievaluasi

Berdasarkan Tipe Unit Kerja

No.	Tipe Unit Kerja	Jumlah	Persentase
1.	Unit Eselon 1	2	0,30%
2.	Tingkat Banding	35	5,22%
3.	Tingkat Pertama	633	94,48%
	Total	670	100%

Berdasarkan Kamar Peradilan

No.	Kamar Peradilan	Jumlah	Persentase
1.	Peradilan Umum	303	45,22%
2.	Peradilan Agama	328	48,96%
3.	Peradilan Militer dan TUN	39	5,82%
	Total	670	100%

### B. Sakter yang diusulkan

Berdasarkan Tipe Unit Kerja

No.	Tipe Unit Kerja	Jumlah	Persentase
1.	Unit Eselon 1	2	0,83%
2.	Tingkat Banding	21	8,71%
3.	Tingkat Pertama	218	90,46%
	Total	241	100%

Berdasarkan Kamar Peradilan

No.	Kamar Peradilan	Jumlah	Persentase
1.	Peradilan Umum	97	40,25%
2.	Peradilan Agama	128	53,11%
3.	Peradilan Militer dan TUN	16	6,64%
	Total	241	100%

### C. Sakter yang tidak diusulkan

Berdasarkan Tipe Unit Kerja

No.	Tipe Unit Kerja	Jumlah	Persentase
1.	Unit Eselon 1	0	0%
2.	Tingkat Banding	14	3,26%
3.	Tingkat Pertama	415	96,74%
	Total	429	100%

Berdasarkan Kamar Peradilan

No.	Kamar Peradilan	Jumlah	Persentase
1.	Peradilan Umum	208	48,48%
2.	Peradilan Agama	200	46,62%
3.	Peradilan Militer dan TUN	21	4,90%
	Total	429	100%

Hasil Evaluasi dan Penilaian yang dilaksanakan oleh TPI diuraikan sebagai berikut:

Jenis Predikat	Jumlah Usulan	Rekomendasi	
		Diusulkan	Tidak Diusulkan
Calon unit kerja berpredikat WBBM	146	73	73
Calon unit kerja berpredikat WBK	670	241	429
<b>Jumlah</b>	<b>816</b>	<b>314</b>	<b>502</b>

## PELAKSANAAN UNIT PEMBERANTASAN PUNGUTAN LIAR (UPP)

Selama tahun 2021 dari pengaduan yang masuk ke Siwas MARI mengenai pungli di pengadilan terdapat sejumlah 21 (dua puluh satu) pengaduan. Dari 21 pengaduan tersebut 19 pengaduan tidak terbukti dan 2 pengaduan ditindaklanjuti dengan pembentukan tim pemeriksa Badan Pengawasan Mahkamah Agung.

## HASIL IMPLEMENTASI PENGENDALIAN GRATIFIKASI

- Aturan pengendalian gratifikasi dilakukan revisi atas Keputusan Kepala Badan Pengawasan No. 31/BP/SK/VI/2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya dengan Keputusan Kepala Badan Pengawasan No. 28/BP/SK/III/2021 dengan penekanan perubahan pada saluran/media pelaporan gratifikasi dan diwajibkannya seluruh hakim dan aparaturnya membuat surat pernyataan penolakan, penerimaan, dan/atau pemberian gratifikasi setidaknya-tidaknya setahun sekali pada akhir bulan Desember.
- Unit Pengendalian Gratifikasi memperbaharui dan membentuk tim pelaksana UPG pada Mahkamah Agung RI melalui Keputusan Kepala Badan Pengawasan No. 27/BP/SK/III/2021 tentang Pembentukan tim Pelaksana UPG di Lingkungan Mahkamah Agung RI dengan masa kerja 2 (dua) tahun sejak tim dibentuk.
- Akun aplikasi Gratifikasi Online (GOL) KPK  
Telah ditunjuk petugas sebagai admin Aplikasi Gratifikasi On Line (GOL) dan Aktivasi akun GOL UPG Lembaga Mahkamah Agung RI telah aktif dan digunakan sejak Tahun 2020.
- Sosialisasi terkait kebijakan gratifikasi
  - Sosialisasi mandiri terkait Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya telah dilakukan di Badan Pengawasan dan Badan Urusan Administrasi BUA MA RI.
  - Public campaign* sangat masif dilakukan melalui pelaksanaan program pembangunan zona integritas di seluruh satuan kerja daerah melalui banner dan pamflet.
  - Kebijakan pemutaran audio dan kewajiban majelis pada saat memulai persidangan menyampaikan peringatan perilaku antigratifikasi melalui pelaksanaan Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung RI No. 17 Tahun 2019 yang pada pokoknya mengimbau kepada para pihak serta pengunjung persidangan untuk berperilaku bersih dengan cara

tidak menghubungi hakim dan aparaturnya peradilan lainnya, tidak menerima/memberi tip, sogokan, suap, atau janji dalam bentuk apa pun terkait perkara.

- Identifikasi titik rawan potensi gratifikasi  
Telah dilakukan identifikasi titik rawan potensi gratifikasi di lingkup unit Badan Pengawasan melalui Keputusan Kepala Badan Pengawasan No. 13a/BP/SK/2019 tentang Penetapan Matrik Identifikasi Penanganan Benturan Kepentingan Lingkup Badan Pengawasan MA RI Tahun 2019 dan telah diturunkan dalam SOP Penanganan Benturan Kepentingan.

Tabel Jumlah Pelaporan Gratifikasi 2018--2021

No.	Tgl Pelaporan	Inisial Pelapor	Status	Status verifikasi
1.	26/06/2021	IKD	Terverifikasi oleh UPG	Catat dan tidak perlu diproses
2.	05/04/2021	MA	Diterima oleh KPK	
3.	26/02/2021	MA	Diterima oleh KPK	
4.	20/11/2020	MA	Diproses oleh KPK	
5.	13/11/2020	MA	Diproses oleh KPK	
6.	22/07/2020	SF	Terverifikasi oleh UPG	Catat dan tidak perlu diproses
7.	23/03/2020	MRA	Diproses oleh KPK	
8.	19/12/2019	MPS	Diproses oleh KPK	
9.	19/12/2019	JB	Diproses oleh KPK	
10.	17/05/2019	DR	Diproses oleh KPK	
11.	17/05/2019	SN	Diproses oleh KPK	
12.	14/05/2019	SH	Diproses oleh KPK	
13.	30/07/2018	Syn	Diproses oleh KPK	
14.	26/06/2018	Hjh	Diproses oleh KPK	

## SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL (SPI)

Tabel Kegiatan Badan Pengawasan selaku APIP

No.	Kegiatan	Resume Hasil Pemeriksaan																														
1.	Reviu Laporan Keuangan dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK)	Laporan Keuangan Tahunan Tahun Anggaran 2020 dilaksanakan pada bulan Januari dan Februari 2021. Catatan: Laporan Keuangan MARI tahun 2020 memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksaan Keuangan RI. Laporan Keuangan Semester Pertama dan Laporan Triwulan III Komprehensif Tahun 2021 dilaksanakan pada bulan Juli dan bulan Oktober 2021																														
2.	Reviu RKA K/L	Pada unit kerja Eselon I Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI Tahun 2021.																														
3.	Reviu Pelaksanaan Anggaran PBJ	<p>Berdasarkan hasil reviu pelaksanaan anggaran sampai dengan Triwulan III 2021 dapat disimpulkan bahwa secara umum realisasi belanja telah mencapai 70,52% dari dari rencana penyerapannya dengan perincian sebagai berikut:</p> <p>a. belanja pegawai mencapai 76,40% senilai Rp5.289.385.324.524,00; b. belanja barang mencapai 64,57% senilai Rp1.420.287.236.847,00; dan c. belanja modal mencapai 53,24% senilai Rp852.372.435.06.</p> <p>Berdasarkan total realisasi sebesar 70,52% tersebut dikategorikan cukup tinggi karena jika penyerapan anggaran Mahkamah Agung dibandingkan dengan Rencana Penarikan Dana sampai dengan bulan September 2021 sebesar Rp7.887.635.692.960,00, persentase realisasinya sudah mencapai 95,87%. Selain itu, juga berdasarkan data dari spanint.kemenkeu.go.id berupa laporan peringkat realisasi belanja atas 87 K/L, Mahkamah Agung RI menduduki peringkat 6.</p> <p>Pengadaan barang dan jasa melalui tender yang sudah tanda tangan kontrak sampai dengan Triwulan III Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar 289 paket dengan nilai Rp1.123.410.705.355,00 atau 96% dari total PBJ tender yang sudah diinput di SIRUP dengan perincian sebagai berikut.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Posisi PBJ Melalui Tender</th> <th>Jumlah Paket</th> <th>Nilai (Rp)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Perencanaan PBJ melalui tender selama tahun 2021</td> <td>299</td> <td>1.379.828.543.000</td> </tr> <tr> <td>PBJ melalui tender yang belum diinput di SIRUP</td> <td>6</td> <td>206.121.473.000</td> </tr> <tr> <td>PBJ melalui tender yang sudah diinput di SIRUP</td> <td>293</td> <td>1.173.707.070.000</td> </tr> <tr> <td>PBJ melalui tender yang belum dilelang</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>PBJ melalui tender yang masih dalam proses lelang</td> <td>10</td> <td>9.381.244.000</td> </tr> <tr> <td>PBJ melalui tender yang sudah tanda tangan kontrak</td> <td>289</td> <td>1.123.410.705.355</td> </tr> <tr> <td>Progres fisik kontrak kurang dari 50%</td> <td>143</td> <td>554.538.545.150</td> </tr> <tr> <td>Progres fisik kontrak 50% - 99%</td> <td>58</td> <td>377.773.809.895</td> </tr> <tr> <td>Progres fisik kontrak 100% (PHO)</td> <td>98</td> <td>146.564.027.528</td> </tr> </tbody> </table> <p>Terdapat rencana PBJ melalui tender yang belum diinput ke dalam SIRUP sebesar 6 paket dengan nilai Rp206.121.473.000,00. Hal ini disebabkan oleh satuan kerja belum melakukan pemutakhiran data perencanaan pengadaan (RUP) pada aplikasi Sirup sesuai dengan revisi DIPA terakhir. Rencana tindak untuk menyelesaikan permasalahan tersebut adalah menghimbau satuan kerja yang melakukan revisi DIPA terakhir agar melakukan pemutakhiran data perencanaan pengadaan (RUP) pada aplikasi Sirup. Tidak terdapat rencana PBJ melalui tender yang belum dilelang.</p>	Posisi PBJ Melalui Tender	Jumlah Paket	Nilai (Rp)	Perencanaan PBJ melalui tender selama tahun 2021	299	1.379.828.543.000	PBJ melalui tender yang belum diinput di SIRUP	6	206.121.473.000	PBJ melalui tender yang sudah diinput di SIRUP	293	1.173.707.070.000	PBJ melalui tender yang belum dilelang	-	-	PBJ melalui tender yang masih dalam proses lelang	10	9.381.244.000	PBJ melalui tender yang sudah tanda tangan kontrak	289	1.123.410.705.355	Progres fisik kontrak kurang dari 50%	143	554.538.545.150	Progres fisik kontrak 50% - 99%	58	377.773.809.895	Progres fisik kontrak 100% (PHO)	98	146.564.027.528
Posisi PBJ Melalui Tender	Jumlah Paket	Nilai (Rp)																														
Perencanaan PBJ melalui tender selama tahun 2021	299	1.379.828.543.000																														
PBJ melalui tender yang belum diinput di SIRUP	6	206.121.473.000																														
PBJ melalui tender yang sudah diinput di SIRUP	293	1.173.707.070.000																														
PBJ melalui tender yang belum dilelang	-	-																														
PBJ melalui tender yang masih dalam proses lelang	10	9.381.244.000																														
PBJ melalui tender yang sudah tanda tangan kontrak	289	1.123.410.705.355																														
Progres fisik kontrak kurang dari 50%	143	554.538.545.150																														
Progres fisik kontrak 50% - 99%	58	377.773.809.895																														
Progres fisik kontrak 100% (PHO)	98	146.564.027.528																														

No.	Kegiatan	Resume Hasil Pemeriksaan
4.	Reviu Revisi Anggaran	Reviu revisi anggaran dilaksanakan sesuai dengan permintaan yang disampaikan kepada Kepala Badan Pengawasan dari 3 (tiga) Satuan Kerja di Lingkungan Mahkamah Agung RI, yakni <ol style="list-style-type: none"> <li>Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI dilaksanakan pada bulan April 2021;</li> <li>Pengadilan Militer II-08 Jakarta dilaksanakan pada bulan Juni 2021; dan</li> <li>Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI dilaksanakan pada bulan Agustus 2021.</li> </ol>
5.	Reviu Revisi Anggaran dalam rangka Penggunaan Anggaran PNBP	Reviu revisi anggaran dalam rangka Penggunaan Anggaran PNBP Tahun Anggaran 2021 atas realisasi PNBP Tahun 2020 pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, dan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI yang dilaksanakan pada bulan Juni dan Oktober 2021.
6.	Reviu Hibah	Reviu hibah dilaksanakan pada unit akuntansi penggunaan Anggaran Mahkamah Agung RI pada bulan Oktober 2021 dan satuan kerja Pengadilan Agama Curup pada bulan Januari 2021 dan Pengadilan Negeri Blitar pada bulan April 2021.
7.	Liaison Officer (LO)	Sampai dengan semester pertama tahun 2021 diperoleh informasi melalui <i>entry meeting</i> Badan Pemeriksa Keuangan tahun 2021 untuk melakukan pemeriksaan Laporan Keuangan Mahkamah Agung RI tahun 2020. Menurut Auditor Utama Keuangan Negara III BPK RI selaku penanggung jawab pemeriksa, diperlukan <i>liaison officer</i> untuk menjembatani tim pemeriksa BPK dengan audit yang ada di Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya agar pemeriksaan dapat berjalan efektif. Pendampingan dilakukan terhadap 31 satuan kerja. Untuk itu Badan Pengawasan Mahkamah Agung ditunjuk sebagai <i>liaison officer</i> pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI dengan hasil pemeriksaan dapat diselesaikan tepat waktu oleh tim pemeriksa BPK dengan capaian pemberian opini wajar tanpa pengecualian (WTP) yang kesembilan kalinya untuk Mahkamah Agung RI.
8.	Probitiy Audit	Badan Pengawasan sebagai auditor internal mempunyai peran untuk memberikan keyakinan memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi; memberikan peringatan dini; meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi organisasi; serta memberikan masukan yang dapat memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola proses bisnis organisasi, salah satunya terkait pengadaan barang/jasa. Probitoi audit dapat dilakukan pada saat pelaksanaan pengadaan barang/jasa ditenderkan sampai dengan pekerjaan selesai. Hal tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa pengadaan barang/jasa dilaksanakan dengan prinsip penegakan integritas, kebenaran, dan kejujuran serta untuk memenuhi ketentuan peraturan/perundang-undangan yang berlaku. Tahun 2021 <i>probitiy audit</i> dilaksanakan pada 28 (dua puluh delapan) satuan kerja.
9.	Audit PBJ	Audit PBJ ditujukan untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa pelaksanaan PBJ telah efektif, efisien, dan ekonomis serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pada tahun 2021, audit PBJ dilaksanakan pada 4 (empat) satuan kerja.
10.	Pemeriksaan Keuangan	Pemeriksaan keuangan difokuskan pada pelaksanaan dan tata kelola keuangan DIPA dan Keuangan Perkara tahun 2021. Pada tahun 2021 Pemeriksaan Keuangan dilaksanakan pada 8 (delapan) satuan kerja.

## TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BPK

Tahun 2021 Badan Pengawasan telah melakukan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan (TLHP) BPK sampai dengan Semester II Tahun 2021 yang terdiri dari 596 temuan dengan nilai temuan sebesar Rp48.748.371.155,87 dengan 1.313 rekomendasi dan nilai temuan penyetoran ke kas negara sebesar Rp36.782.386.014,06 dengan status sebagai berikut:

1. Tindak lanjut telah sesuai dengan rekomendasi sebanyak 1.302 (99,16%) dengan nilai penyelesaian rekomendasi sebesar Rp34.138.547.186,00 (92,81%).
2. Rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah sebanyak 11 (0,84%) dengan nilai penyelesaian rekomendasi sebesar Rp2.643.838.828,06 (7,19%).

Dengan demikian, penyelesaian tindak lanjut temuan pemeriksaan BPK tahun 2021 yang sudah dianggap selesai oleh BPK ialah sebanyak 1.313 rekomendasi atau sebesar 100%.

## IMPLEMENTASI APLIKASI SIWAS

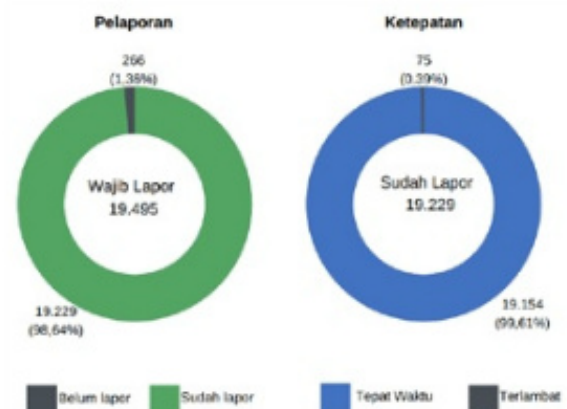
Tabel Jumlah Pelaporan Masyarakat melalui Siwas MA RI Tahun 2021

No.	Jenis Laporan	Jumlah
1.	Pelapor secara mandiri	772
2.	Meja Pengaduan 4 (empat) Lingkungan Peradilan dan Mahkamah Agung	156
3.	Inisiatif tingkat banding	70
Total		998

## LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN)

Seluruh penyelenggara negara di lingkungan Mahkamah Agung RI yang berada di bawahnya wajib untuk menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara. Pada tahun 2021 jumlah wajib lapor LHKPN sebanyak 19.495 dengan tingkat kepatuhan sebanyak 98,64%.

Grafik Kepatuhan Penyaman LHKPN Tahun 2021





# PERANSERTA DAN KERJASAMA

## KERJA SAMA MULTILATERAL

### COUNCIL OF ASEAN CHIEF JUSTICES (CACJ)

- Penyelenggaraan 9th Council of Asean Chief Justices (CACJ) Meeting sebagai Bentuk Forum Kerja Sama Pengadilan se-Asean Pada 7 Oktober 2021, dalam Pertemuan ini Ketua MA RI dipilih menjadi ketua CACJ 2021 -- 2022.
- Penyelenggaraan Webinar Pelatihan Yudisial bagi Pengadilan se-Asean pada 7 September 2021 bertema 'Judicial Education and Training in the Time of Pandemic: Challenges and Lessons'.
- Penyelenggaraan Lokakarya Daring (*Online Workshop*) Lingkungan Hidup untuk Hakim-Hakim di Asean Pada tanggal 1--4 November 2021.

## KERJA SAMA YUDISIAL BILATERAL

### FEDERAL COURT OF AUSTRALIA

- DISKUSI INTERNAL PENYUSUNAN PERMA 3 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENGAJUAN DAN PEMERIKSAAN KEBERATAN TERHADAP PUTUSAN KPPU DI PENGADILAN NIAGA tanggal 28 Juli 2021, bertajuk *Webinar on The Review of Business Competition Supervisory Commission Decisions Supreme Court of the Republic of Indonesia: Lesson and Challenges*.
- Sosialisasi Perma 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemeriksaan Keberatan terhadap Putusan KPPU pada tanggal 12 Oktober 2021 dan tanggal 28 Oktober 2021.
- Kelas Inspirasi Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual pada 6 Agustus 2021

### FAMILY COURT OF AUSTRALIA

- Dialog Ditjen Badilag MA RI dan Family Court of Australia: Perlindungan Hak dan Akses Keadilan bagi Perempuan dan Anak pada tanggal 5 Oktober 2021
- HOGE RAAD KERAJAAN BELANDA (HOGE RAAD VAN DER NEDERLANDEN) Kerja sama Mahkamah Agung dan Hoge Raad saat ini berlangsung di bawah payung *Memorandum of Understanding (MoU)* untuk periode 2018–2023.

### KERJA SAMA DENGAN MITRA PEMBANGUNAN

#### KERJA SAMA DENGAN ASIAN DEVELOPMENT BANK

- Kelas Inspirasi Hukum Kepailitan tentang Kebijakan Moratorium Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Bekerja sama dengan Asian Development Bank pada 5 November 2021

#### AUSTRALIA INDONESIA PARTNERSHIP FOR JUSTICE 2 (AIPJ2)

- **UMUM** : Kerja sama dengan AIPJ2 merupakan kerja sama yang berkelanjutan antara pemerintah RI dan pemerintah Australia yang dikoordinatori oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Kegiatan atau Event Internasional dengan Dukungan AIPJ2
  - Webinar Peran Kepemimpinan Hakim Perempuan dalam Peradilan di Indonesia, Malaysia, dan Australia pada tanggal 15 April 2021
  - Webinar Internasional: Meningkatkan Akses dan Layanan Keadilan bagi Perempuan dan Penyandang Disabilitas pada tanggal 29 September 2021
  - "Dialog Reformasi Peradilan: Bagaimana Dapat Mendukung Perjuangan Indonesia Melawan Korupsi?" kerja sama Mahkamah Agung dengan Transparency International pada hari Jumat, 15 Oktober 2021 secara daring.

### JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY (JICA)

Fokus utama kerja sama MA dengan JICA adalah meningkatkan kapasitas dan pengetahuan para hakim di bidang hak kekayaan intelektual (HKI). Dukungan JICA untuk MA diberikan melalui *Project for Efficient and Fair Disputes Resolution Mechanism and Legislative Drafting Capacity Development for Improving Business Environment* yang terakhir ditandatangani oleh JICA dan MA pada tanggal 6 April 2021.

### THE ASIA FOUNDATION (TAF)

The Asia Foundation mendukung Kelompok Kerja Perlindungan Perempuan dan Anak Mahkamah Agung RI dalam memenuhi mandat Peraturan Pemerintah RI Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Pemerintah RI Nomor 35 Tahun 2020.

### KEDUTAAN BESAR KERAJAAN NORWEGIA

- SERTIFIKASI HAKIM LINGKUNGAN HIDUP
- Pelatihan Penerapan Prinsip dan Kerangka Hukum Hak Asasi Manusia bagi Hakim pada Peradilan Umum Angkatan II

### KEDUTAAN BESAR KERAJAAN BELANDA

Pemerintah Kerajaan Belanda menyediakan bantuan untuk memperkuat kerja sama antarlembaga peradilan antarakedua negara sejak 2019 melalui program *Peer to Peer for Justice (P2P)*. Dukungan yang diberikan dalam kerangka kerja sama tersebut di Mahkamah Agung adalah penguatan sistem kamar, dukungan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknis Hukum dan Peradilan, serta dukungan untuk meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas anggaran melalui pendekatan *performance based budgeting*.

### **NORWEGIAN CENTRE FOR HUMAN RIGHTS UNIVERSITY OF OSLO**

Pusdiklat Teknis Peradilan Mahkamah Agung bekerja sama dengan Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan (LeIP) dan Norwegian Centre for Human Rights (NCHR) pada University of Oslo menyelenggarakan Pelatihan HAM Lanjutan untuk 29 orang terbaik dari 89 orang hakim yang telah mengikuti Pelatihan HAM pada periode 2020 dan 2021.

### **MINISTRY OF HOME AFFAIRS AUSTRALIA**

Dalam melanjutkan dukungan kepada proses uji coba modernisasi persidangan elektronik dalam bentuk fasilitas sidang *online portabel* pada 10 pengadilan di kawasan DKI Jakarta dan sekitarnya pada tahun 2020, pada tahun 2021 Ministry of Home Affairs Australia kembali memberikan hibah kepada Mahkamah Agung RI berupa seperangkat alat keamanan pengadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur dan Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk mendukung pelaksanaan Perma Nomor 5 Tahun 2020 tentang Protokol Persidangan dan Keamanan dalam Lingkungan Pengadilan.

### **PELAKSANAAN WEBINAR TENTANG MENINGKATKAN KESETARAAN GENDER DI PERADILAN**

Pada tanggal 25 Oktober 2021, Mahkamah Agung RI bekerja sama dengan International Commission of Jurist (ICJ) menyelenggarakan webinar Meningkatkan Kesetaraan Gender di Peradilan. Webinar ini menampilkan narasumber meliputi hakim Agung Dame Silvia Cartwright, Komisioner ICJ dari Selandia Baru, Hakim Agung Chinara Aidarbekova, Komisioner ICJ dari Kirgizstan, Nahla Haidar El Addal, Wakil Ketua Komite CEDAW dan Komisioner ICJ dari Lebanon.

### **PELAKSANAAN WEBINAR INTERNATIONAL "CRIMINAL COURT PROCEEDINGS DURING THE COVID-19 PANDEMIC"**

Pada 7 Oktober 2021 Mahkamah Agung bekerja sama dengan Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan (LeIP) dan Center for International Legal Cooperation (CILC) di Belanda melalui proyek Peer to Peer for Justice menyelenggarakan webinar dengan tema "*Criminal Court Proceedings During the Covid-19 Pandemic*".

### **PELAKSANAAN WEBINAR INTERNASIONAL: MEMBANGUN PERADILAN AGAMA MODERN BERKELANJUTAN MENUJU BIROKRASI BERKELAS DUNIA**

Pada tanggal 2 Maret 2021 Ditjen Badilag Mengadakan Seminar Internasional dalam acara Rapat Koordinasi Ditjen Badilag, Kamar Agama dan Seluruh Pengadilan Tinggi Agama se Indonesia. Seminar ini bertujuan untuk mengangkat isu-isu dan permasalahan yang terkait dengan hukum dan peradilan di beberapa negara.

### **PELAKSANAAN WEBINAR INTERNASIONAL: THE ROLE OF RELIGIOUS COURT IN REALIZING SOCIAL JUSTICE FOR SOCIETY**

Bekerja sama dengan Universitas Islam Indonesia, Ditjen Badilag mengadakan Webinar Internasional dengan tema Peran Peradilan Islam dalam Mewujudkan Keadilan Sosial di Masyarakat.

### **PELAKSANAAN WEBINAR INTERNATIONAL "PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA PASCA-2009: ANTARA HARAPAN DAN KENYATAAN"**

Webinar ini membahas hasil penelitian terkait pelaksanaan fungsi dan kinerja Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pasca-berlakunya UU Pengadilan Tipikor. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi kinerja, memetakan masalah dan tantangan, serta merumuskan rekomendasi untuk meningkatkan kualitas pengadilan tipikor.



## REFORMASI KEMUDAHAN BERUSAHA

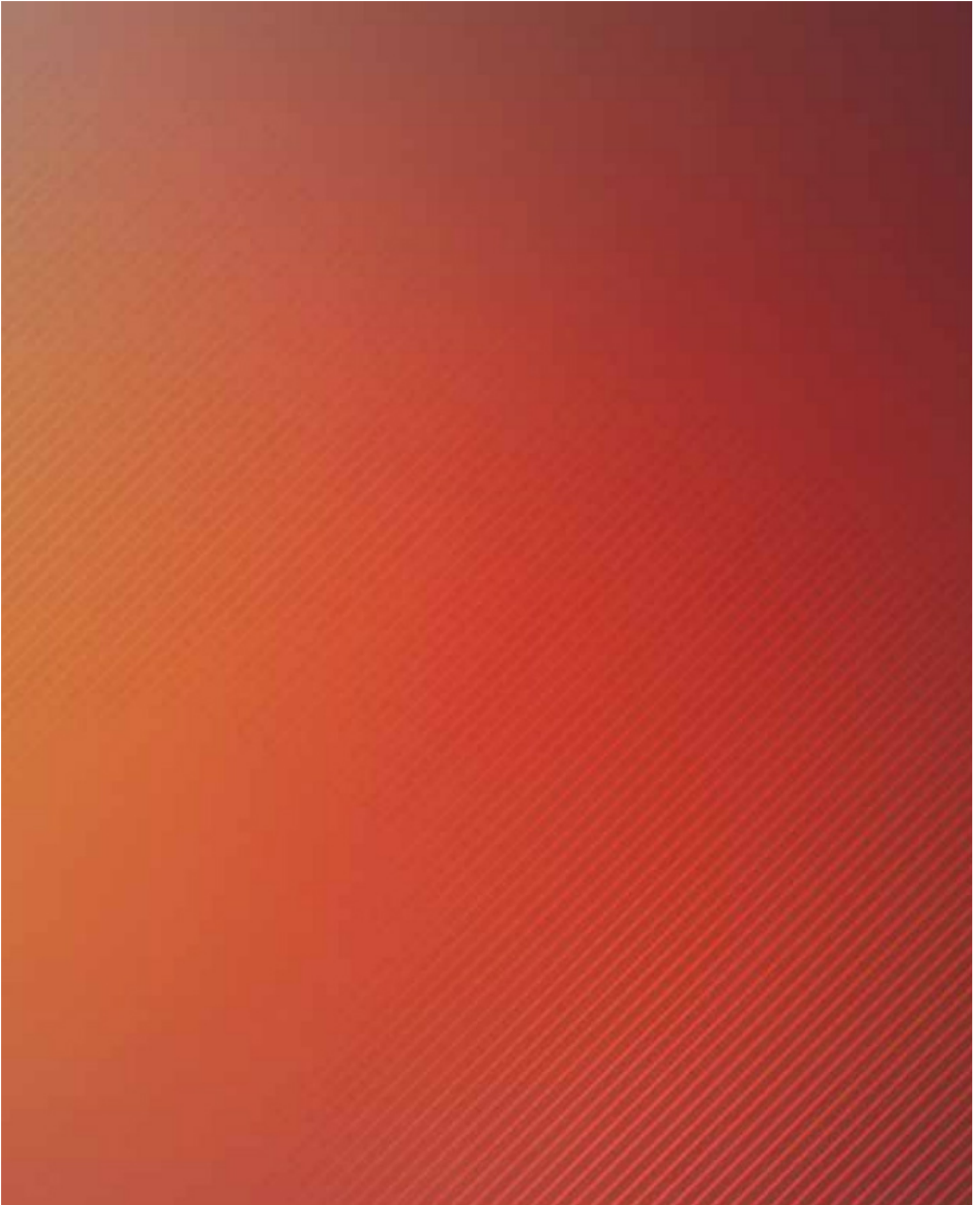
Pada 23 April 2021 Mahkamah Agung berinisiatif untuk mengadakan webinar bertajuk *Meningkatkan Peringkat Kemudahan Berusaha Indonesia-Perspektif Peradilan*. Webinar ini dilaksanakan oleh Kelompok Kerja Kemudahan berusaha Mahkamah Agung RI dan dimaksudkan untuk melakukan sosialisasi terhadap pembaruan yang telah dilakukan oleh Mahkamah Agung terkait dengan kemudahan berusaha.

Selanjutnya pada 26 November 2021 bekerja sama dengan Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan dan Kementerian Investasi/BKPM diadakan sosialisasi dan koordinasi dalam rangka evaluasi kemudahan berusaha di 37 provinsi di Indonesia dengan tujuan untuk mengetahui kemajuan implementasi kemudahan berusaha di wilayah-wilayah di luar area yang menjadi survei di World Bank.

## PARTISIPASI DALAM FORUM INTERNASIONAL

- Kehadiran Pada 2<sup>nd</sup> IUCN World Environmental Law Congress
- Kehadiran Pada International Forum on Judicial Cooperation
- Kehadiran Pada Cina Forum on International Legal Cooperation
- Kehadiran pada Forum Hukum Internasional Kawasan Asia Pasifik ke 11 (11<sup>th</sup> *International Legal Forum of the Asia-Pacific Region*)





# ***Akselerasi Perwujudan Peradilan Modern***



**Mahkamah Agung  
Republik Indonesia**

Jl. Medan Merdeka Utara No. 9-13  
Jakarta Pusat - DKI Jakarta, Indonesia 10110  
(021) 3843348, 3810350, 3457661  
[info@mahkamahagung.go.id](mailto:info@mahkamahagung.go.id)

